Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Gd. Manggala Wanabakti , Blok I lantai 14
Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Website : http://bp2sdm.menlhk.go.id

@bp2sdmklhk

Bp2sdm_lhk

BP2SDM LHK

Dokumen ini dapat diunduh melalui tautan:

http://bit.ly/LKJBadanP2SDMKLHK2023

LAPORAN KINERJA BADAN P2SDM TAHUN 2023

BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SDM

LAPORAN KINERJA BADAN P2SDM

2023

LAPORAN KINERJA 2023

BADAN P2SDM

Disusun dan diterbitkan oleh Sekretariat Badan P2SDM
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Naskah dan tata letak disiapkan oleh Iman Santoso, Hasto Nugroho, Sofian Hadi Prasetyo, Nindia Bella Ardianti. Editor Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Sekretariat Badan P2SDM mengucapkan terimakasih kepada Pusat Penyuluhan, Pusat Perencanaan Pengembangan SDM, Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK, Pusat Pengembangan Generasi LHK, 7 Balai Pelatihan LHK dan 5 SMKKN yang telah berkontribusi menyumbangkan data, gagasan, ide, serta dokumentasi sehingga Laporan Kinerja Badan P2SDM Tahun 2023 ini dapat tersusun.

Dokumen ini dapat diunduh melalui tautan :

http://bit.ly/LKJBadanP2SDMKLHK2023

Tenaga teknis menengah Kejuruan Kehutanan disiapkan untuk dapat mengisi tenaga kerja bidang LHK di tingkat tapak

Pengantar Kepala Badan P2SDM

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan P2SDM Tahun 2023 ini berjalan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menguraikan target kinerja yang telah diperjanjikan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi, serta upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja pada Badan P2SDM. Selanjutnya laporan ini diharapkan menjadi bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka *good governance* dan *clean government* di unit kerja Badan P2SDM kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait.

Kami mengapreasiasi kepada seluruh *stakeholder* serta masyarakat yang telah bekerjasama dan memberikan dukungan terhadap capaian kinerja Badan P2SDM. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya Badan P2SDM meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Tak lupa juga ungkapan terimakasih disampaikan kepada seluruh jajaran Badan P2SDM. Kami berpesan kepada seluruh jajaran BP2SDM agar selalu menjaga integritas, terus berkarya dan melakukan terobosan serta inovasi. Pada akhirnya kami mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dari semua pihak untuk membantu perbaikan dan peningkatan kinerja kami di masa yang akan datang.

Jakarta, 22 Januari 2024
Kepala Badan,

A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Setiap tahunnya Badan P2SDM senantiasa berusaha menjaga kinerja dalam upaya mendukung penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM sesuai dengan kebutuhan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kinerja yang baik ditunjukan dari rata-rata capaian kinerja tahun 2023 sebesar 109,61%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian kinerja meningkat sebesar 8,04% YoY. Peningkatan ini menunjukan bahwa Badan P2SDM dapat berkinerja lebih efektif dengan nilai efektivitas sebesar 1,08. Penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada Tahun 2023 sebesar Rp301.431.568.051,00 (98,76%) dari pagu anggaran sebesar Rp305.223.325.000,00, dengan demikian, nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,90.

Badan P2SDM merupakan Eselon I pendukung di Kementerian LHK yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Dukungan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 6 Indikator Kinerja Program yang ada di Badan P2SDM.

IKP 1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan mencapai kinerja sebesar 0,687 Triliun atau mencapai presentase maksimal 150% dari target kinerja Rp0,3 T. Menunjukan bahwa aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh KTH yang dibina sudah sesuai dengan target.

IKP 2 Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya mencapai kinerja sebanyak 6.475 orang (101,90% dari target) mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari realisasi tahun sebelumnya sebanyak 2.388 orang. Hal ini disebabkan adanya intervensi anggaran untuk pelaksanaan pelatihan dengan mekanisme kerjasama sehingga dapat diperhitungkan sebagai capaian kinerja pada perjanjian kinerja.

IKP 3 Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat mencapai kinerja sebanyak 472 orang (100% dari target).

IKP 4 Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan mencapai kinerja sebesar 74,55 Poin dari target 69 Poin (108,04%). Nilai ini menunjukan bahwa pengelolaan KHDTK sudah sesuai efektif dalam memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi.

IKP 5 Jumlah Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup mencapai kinerja 247 Lembaga dari target 247 Lembaga (100%). Capaian ini mengindikasikan semakin banyaknya komunitas yang peduli dan menerapkan upaya perlindungan lingkungan hidup.

IKP 6 Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mencapai kinerja sebesar 76,21 Poin dari target 78 Poin (97,71%). Badan P2SDM akan berupaya meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja sehingga capaian selanjutnya dapat sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 tidak terlepas dari kendala terutama belum optimalnya pencapaian kinerja untuk mencapai target Renstra Tahun 2020-2024. Sejumlah inisiatif (intervensi dan investasi) dilakukan oleh unsur-unsur pelaksana di Badan P2SDM dengan memanfatkan ITK (Informasi Teknologi dan komunikasi). Kegiatan Pendidikan/ pelatihan, penyuluhan/pendampingan secara online dirasakan sangat membantu dalam pencapaian-pencapaian tesebut.

POTRET KINERJA BP2SDM TAHUN 2023

IKP 1
Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan

150%

T : 0,3 T
R : 0,687 T

IKP 2
Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya

102%

T : 6.352 Orang
R : 6.475 Orang

IKP 3
Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat

100%

T : 472 Orang
R : 472 Orang

101,12%
Rata - Rata Capaian Kerja

99,51%
Realisasi Anggaran

IKP 4
Indeks efektifivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan

108%

T : 69,00 Poin
R : 74,55 Poin

IKP 5
Jumlah Lembaga/ Komunitas Serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup

100%

T : 247 Lembaga
R : 247 Lembaga

IKP 6
Nilai SAKIP Badan P2SDM

98%

T : 78,00 Poin
R : 76,21 Poin

PERAN BP2SDM DALAM MENDUKUNG KINERJA ESELON 1 LINGKUP KEMENTERIAN LHK

DAFTAR ISI

ii **PENGANTAR**

iv **RINGKASAN EKSEKUTIF**

vii **DAFTAR ISI**

viii **DAFTAR SINGKATAN**

1 **BAB 1 PENDAHULUAN**

7 **BAB 2 PERENCANAAN KINERJA**

8 Rencana Strategis (Renstra)

12 Rencana Kerja (Renja)

16 Perjanjian Kinerja (PK)

17 **BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA**

18 Reviu atas Dokumen Perencanaan

21 Reviu atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

22 Metode Pengukuran

23 Hasil Pengukuran Kinerja

83 Realisasi Anggaran

92 **PENUTUP**

Updating keilmuan menjadi kunci dan tujuan dalam transfer pengetahuan yang dilakukan oleh Balai pelatihan LHK

DAFTAR SINGKATAN

Badan P2SDM	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BPLHK	Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
GEMILANG	Gerakan Masyarakat Bela Lingkungan
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	Indikator Kinerja Program
KHDTK	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
KSDAE	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
KTH	Kelompok Tani Hutan
LHK	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LKj	Laporan Kinerja
LMS	*Learning Management System*
LP2UKS	Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya
LSP	Lembaga Sertifikasi Profesi
PBLHS	Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
PDASRH	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
PGL	Pengembangan Generasi Lingkungan
PHLHK	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PHL	Pengelolaan Hutan Lestari
PJJ	Pembelajaran Jarak Jauh
PK	Perjanjian Kinerja
PKTL	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
PPI	Pengendalian Perubahan Iklim
PPKL	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PSKL	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
PSLB3	Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun
PTM	Pembelajaran Tatap Muka
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDM	Sumber Daya Manusia
SMKK	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
TIPH	Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan
TKSH	Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan
TPHH	Teknik Produksi Hasil Hutan
TRRH	Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
TUK	Tempat Uji Kompetensi
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
YoY	*Year over Year*

1

PENDAHULUAN

Pembelajaran melalui praktik memastikan siswa SMK Kehutanan siap mengimplementasikan ilmunya dalam bekerja

LATAR BELAKANG

Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan memegang peranan sentral dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan keanekaragaman hayati. SDM yang kompeten dan memiliki pengetahuan luas dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam melaksanakan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta dapat mengembangakan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan seperti deforestasi, perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Mengingat hal tersebut di atas, pembangunan SDM LHK menjadi landasan utama untuk memangun masa depan yang ramah lingkungan, memastikan kelestarian ekosistem bagi generasi mendatang

Badan P2SDM akan selalu berkomitmen untuk terus mendukung tersedianya SDM LHK yang unggul dan berkualitas melalui pengembangan kompetensi SDM. Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor Peraturan Menteri LHK nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan P2SDM memiliki tanggungjawab dalam menyediakan SDM LHK yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai dinamika dan tantangan kekinian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam Pelaksanaan tugasnya, Badan P2SDM mendukung tiga program pada Kementerian LHK yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan serta Program Pendidikan dan pelatihan vokasi. Kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan program tersebut tertuang dalam 6 Indikator Kinerja Program yang diampu Badan P2SDM meliputi (1) Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (triliun); (2) Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya; (3) Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan bersertifikat; (4) Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan; (5) Jumlah Lembaga/Komunitas Serta Generasi Peduli dan /atau berbudaya Lingkungan Hidup (Lembaga); (6) Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pada Menteri LHK atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Badan P2SDM Tahun 2023.

Tersusunnya Laporan ini diharapkan dapat menjadi refleksi kinerja Badan P2SDM di tahun 2023 sehinga dapat menjadi umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pemantapan/reviu perencanaan kinerja dan upaya peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang.

"Refleksikan kinerja untuk menyiapkan lompatan perubahan"

Gallery Photo

2023

Design by Akmal Rafi M

BADAN PENYULUHAN DAN PEGEMBANGAN SDM

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan P2SDM merupakan Eselon I lingkup KLHK yang memiliki peran untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia guna mendukung tercapainya program-program di Kementerian LHK. Adapun tugas dan fungsinya sebagaimana berikut

TUGAS :

Menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan

FUNGSI :

Penyusunan kebijakan teknis penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup

Pelaksanan tugas administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan P2SDM didukung oleh Sekretariat Badan, 4 Pusat serta 12 Unit Pelayanan Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia. Struktur Organisasi pada Badan P2SDM sebagaimana berikut:

Kepala Badan P2SDM

Melaksanakan kordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan

Sekretaris Badan P2SDM

Kepala Pusat Penyuluhan

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan

Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber daya aparatur dan non aparatur LHK

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK

Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur LHK

Kepala Pusat Pengembangan Generasi LHK

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan generasi lingkungan hidup dan kehutanan

UPT BPLHK
1. BPLHK Pematangsiantar
2. BPLHK Pekanbaru
3. BPLHK Bogor
4. BPLHK Kadipaten
5. BPLHK Samarinda
6. BPLHK Makassar
7. BPLHK Kupang

UPT SMKKN
1. SMKK Negeri Pekanbaru
2. SMKK Negeri Kadipaten
3. SMKK Negeri Samarinda
4. SMKK Negeri Makassar
5. SMKK Negeri Manokwari

SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2023, Badan P2SDM memiliki sebanyak 775 orang pegawai ASN tersebar di 17 Satuan Kerja dengan proporsi pria sebesar 63,48% (492 orang) sedangkan Wanita sebesar 36,52% (283 orang). Kualitas SDM tidak terlepas dari latar belakang Pendidikan formal yang ditempuh, secara umum kualitas pegawai pada Badan P2SDM dapat dikategorikan baik karena didominasi oleh Tingkat Pendidikan sarjana atau lebih sebanyak 515 orang (66,45%). Tingkat Pendidikan menjadi salah satu hal yang penting untuk menunjang kompetensi umum pegawai dalam melaksanakan tugas, untuk itu Badan P2SDM juga memfasilitasi pegawai di lingkup KLHK untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui indkator kinerja karyasiswa S2 maupun S3. Berdasarkan golongan, ASN terbanyak berada pada golongan III (506 orang) diikuti golongan IV (162 orang), golongan II (85 orang) dan golongan I (3 orang). Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah ASN Badan P2SDM mengalami penurunan dari 854 orang menjadi 775 orang, hal ini disebabkan karena lebih banyaknya pegawai yang mutasi dan pension dibandingkan dengan penerimaan baru. Selain pegawai ASN, Badan P2SDM juga didukung oleh tenaga PPNPN sebanyak 363 orang.

Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin per Satker (ASN + PPNPN)

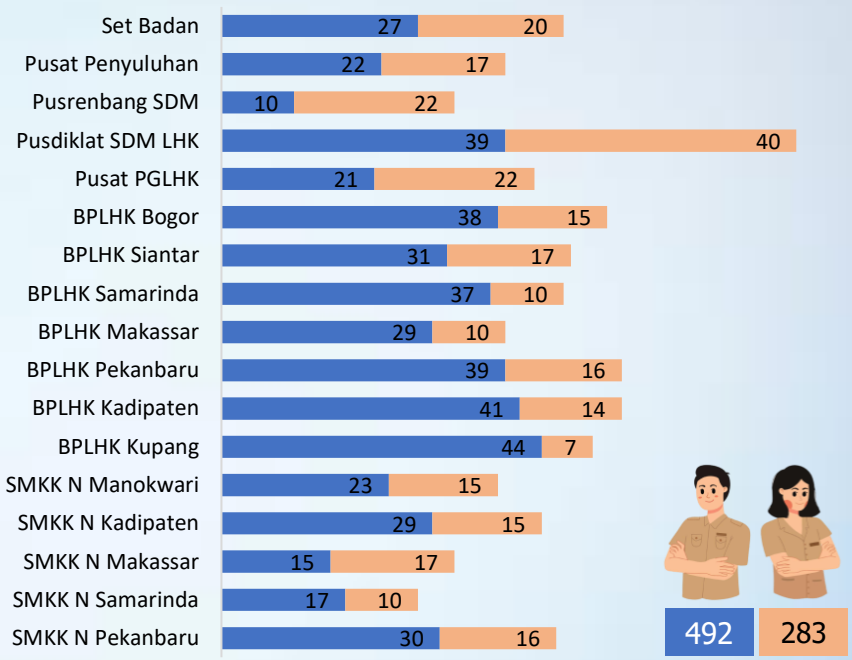

ASN berdasarkan Golongan

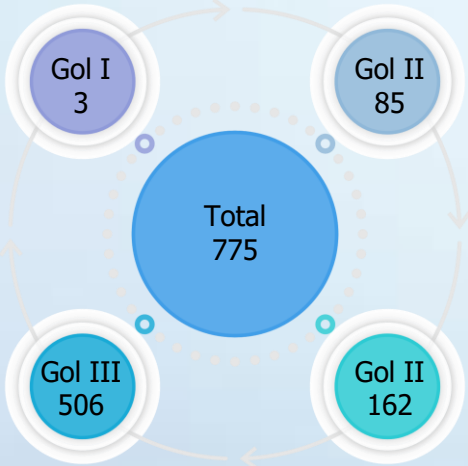

ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

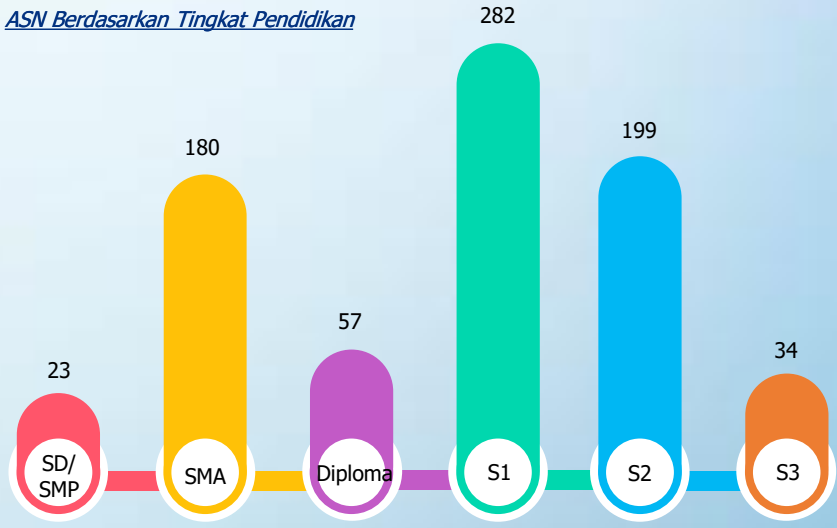

2

PERENCANAAN KINERJA

Penyuluh kehutanan sebagai pencerah wawasan, memberikan pandangan mendalam pada masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan untuk kesejahteraan bersama

PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN P2SDM

Pada tahun 2022 Badan P2SDM telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 revisi berdasarkan Keputusan Badan P2SDM nomor SK.9/P2SDM/SET.11/REN.2/4/2022. Berdasarkan dokumen tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya, Badan P2SDM mendukung tiga program yang ada di Kementerian LHK dengan penjabaran selanjutnya pada 5 Kegiatan Utama dan 1 Kegiatan Dukungan Manajemen yang masing-masing kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit Eselon II lingkup Badan P2SDM.

Program 1

Program Dukungan Manajemen

Sasaran 1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima

Sasaran 2 Meningkatnya Kompetensi SDM LHK

Program 2

Program Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Masyarakat

Program 3

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Sasaran 1 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat

Sasaran 2 Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK

CASCADING KINERJA

Sebagai penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis Kementerian LHK dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Badan P2SDM, disusun peta cascading arsitektur kinerja. Peta tersebut menggambarkan konsistensi antara rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian LHK dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah disusun Badan P2SDM. Adapun secara rinci, cascading arsitektur kinerja Badan P2SDM sebagai berikut:

Sasaran Strategis	IKU/ IKP (IOP)	IK BP2SDM	IKK BP2SDM
T4.S1 Meningkatnya SDM KLHK yang Berkualitas	T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	1. Lulusan Diklat Aparatur LHK 2. Lulusan Diklat Non Aparatur LHK 3. Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha 4. Lulusan pendidikan karya siswa 5. Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi 6. Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK 7. Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK
		T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	1. Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan Kompeten yang Kompeten dan Bersertifikat
		T4.S1.1.1.3 Indeks efektifivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	1. Nilai KHDTK yang Dikelola
		T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	1. Jumlah Satuan pendidikan dan lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan berbudaya LHK 2. Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang LHK pada lembaga masyarakat dan komunitas
T2.S2 Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang Berkelanjutan	T2.S2.1Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	1. Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal) 2. Jumlah KTH (KTH Mandiri) 3. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan
T4.S2 Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 2. Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 3. Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang Tertib dan Akuntabel 4. Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

POHON KINERJA BP2SDM

Pohon kinerja merupakan alat bantu untuk mengawal struktur logika hubungan sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan untuk menghasilkan *outcome*. Penyusunan pohon kinerja diibaratkan seperti mengurai jalur kinerja secara logis yang dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian *outcome*. Penjabaran kinerja Badan P2SDM untuk mencapai sasaran Strategis Kementerian LHK dijabarkan sebagaimana berikut:

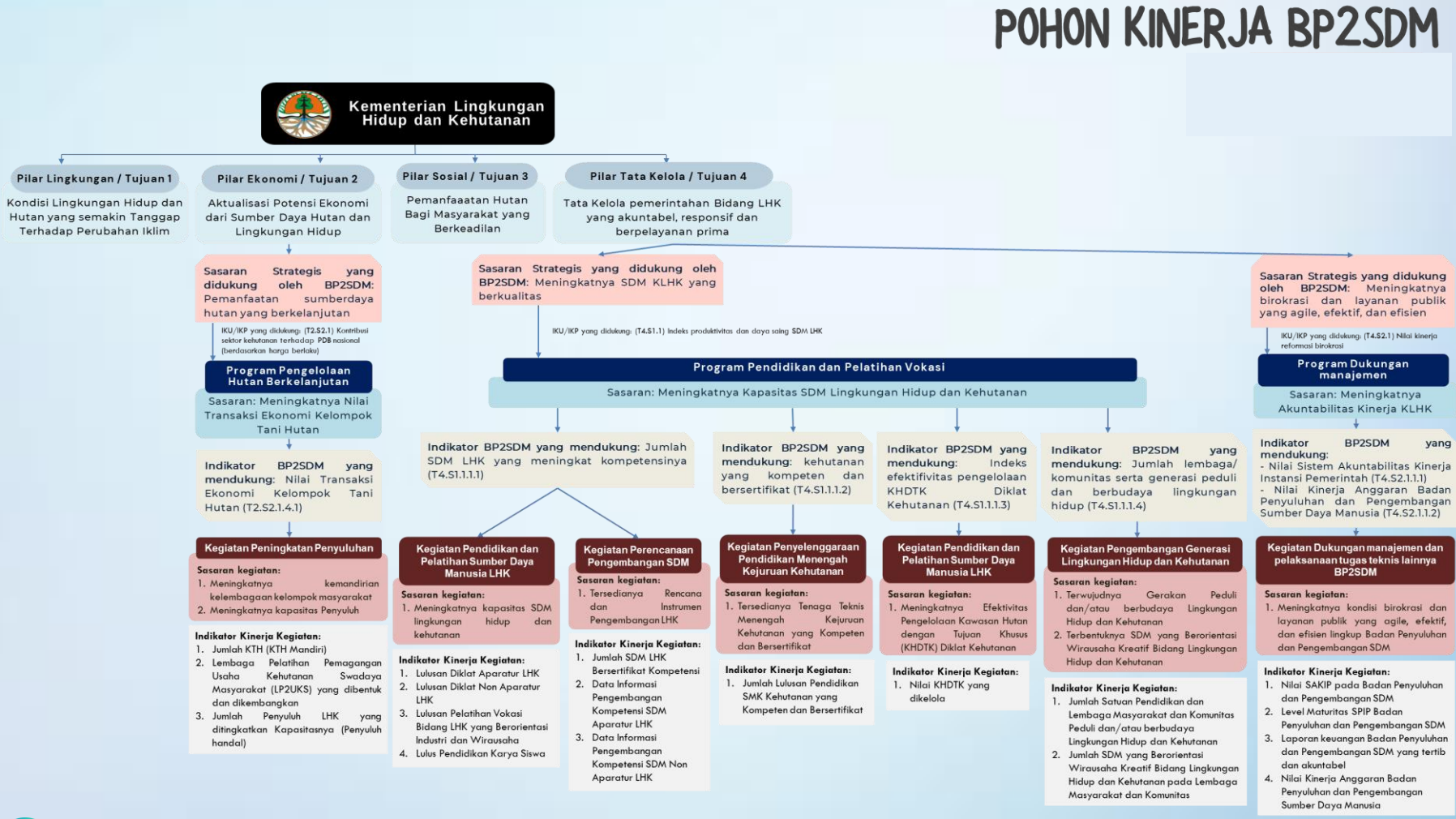

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2020-2024

Sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran Program pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM Tahun 2020-2024 dengan target sebagaimana berikut:

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024
IKP 1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (*)	Triliun rupiah	**2,5**	0	0	0	2	2,5
IKP 2 Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya	Orang	**91.104**	10.803	6.424	2.700	35.588	35.589
IKP 3 Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Orang	**2.364**	466	478	475	472	473
IKP 4 Indeks efektifivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan (*)	Poin	**70**	66,5	67	68	69	70
IKP 5 Jumlah Lembaga/Komunitas Serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Unit	**4.128**	77	260	230	1.780	1.781
IKP 6 Nilai SAKIP Badan P2SDM (*)	Poin	**80**	72	74	76	78	80

(*) kumulatif sampai dengan tahun 2024

TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023

Dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran rencana kerja Kementerian LHK Tahun 2023 dan Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024 (revisi) yang berisikan rincian kegiatan dan strategi pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Badan P2SDM dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan bidang LHK. Dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan P2SDM Nomor SK.29/P2SDM/SET.11/REN.0/12/2022. Mengingat keterbatasan anggaran, berdasarkan trilateral *meeting* (KLHK, Kementerian Keuangan dan Bappenas) target yang ditetapkan di Renja tahun 2023 tidak dapat sesuai dengan target yang ditetapkan di Renstra pada beberapa Indikator Kinerja Program.

Selama pelaksanaan tahun 2023, terdapat beberapa kali penyesuaian pagu pada BP2SDM yang menyebabkan adanya penambahan jumlah target pada beberapa kegiatan. Selain itu, satuan kerja di lingkup BP2SDM juga menjalin kerjasama dengan berbagai mitra. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian pada target kinerja BP2SDM Tahun 2023. Adapun target kinerja pada Indikator Kinerja Program Tahun 2023 sebagai berikut:

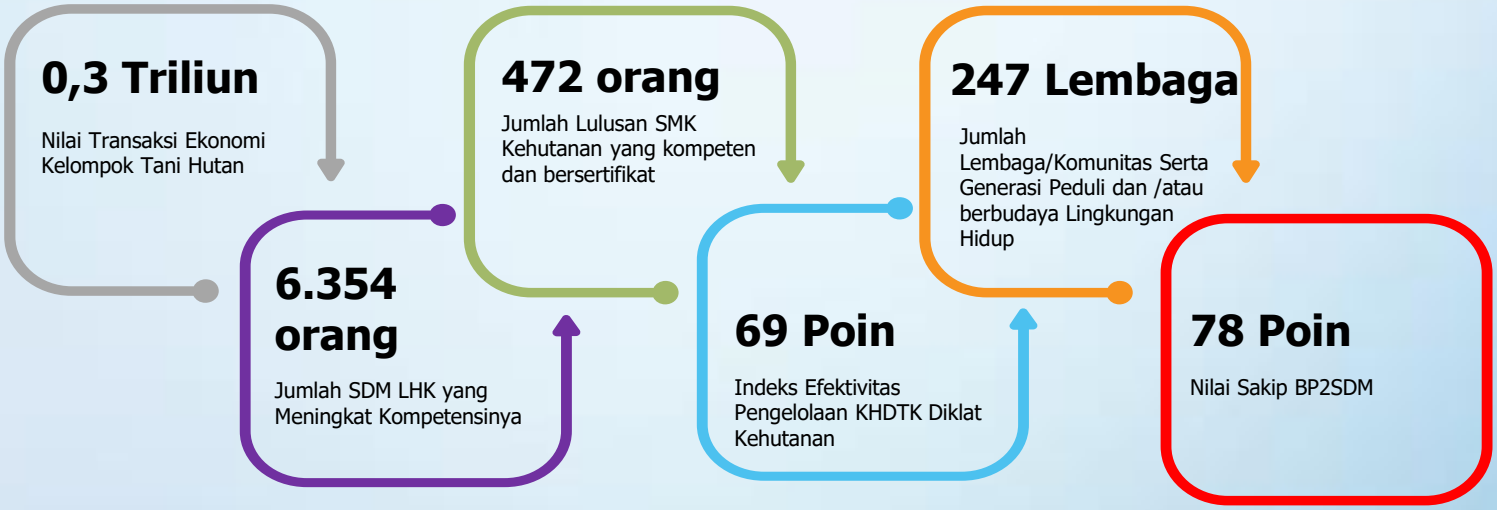

TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023

Indikator Kinerja Program (IKP) yang diampu oleh Badan P2SDM kemudian dijabarkan melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tanggungjawab Eselon II di lingkup Badan P2SDM. Adapun rincian IKK yang telah di revisi pada Tahun 2023 beserta targetnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel Target Indikator Kinerja Kegiatan Badan P2SDM Tahun 2023 Revisi

Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
5439	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM** Sasaran: *Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi dan birokrasi pada unit Badan P2SDM*	**Nilai SAKIP Badan P2SDM, 78 Poin**
		Level Maturitas SPIP, level 3
		Laporan Keuangan Badan P2SDM yang tertib dan akuntabel, 1 Laporan
5444	**Peningkatan Penyuluhan** Sasaran : *Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat*	Jumlah KTH (KTH Mandiri), 30 Unit
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS yang terbentuk dan dikembangkan, 20 Unit
		Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (penyuluh handal), 1.000
6745	**Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK** Sasaran: *Meningkatnya kapasitas SDM LHK*	**Lulusan diklat aparatur LHK, 2.549 Orang**
		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK, 2.022 Orang
		Lulusan Pendidikan Karyasiswa, 10 Orang
		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha, 883 Orang
		Nilai KHDTK yang dikelola, 69 Poin

Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
6746	**Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan** Sasaran : *Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan*	**Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat, 472 orang**
6747	**Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan** Sasaran: *Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup*	**Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga yang peduli dan Berbudaya LHK, 247 Unit**
		Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang LHK pada lembaga masyarakat dan komunitas, 662 Orang
6748	**Perencanaan dan Pengembangan SDM** Sasaran: *Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten*	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK, 5 Jenis Jabatan
		Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK, 5 Jenis Jabatan
		Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi, 900 orang

IKK yang dicetak tebal merupakan IKU/IKP Badan P2SDM

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2023

Dalam rangka mendukung pembiayaan kegiatan pada Badan P2SDM, pada Tahun 2023 Badan P2SDM didukung alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp296.154.950.000,00. Seiring perjalanan selama tahun 2023, Badan P2SDM melakukan 6 kali penyesuaian anggaran akibat adanya Penambahan pagu anggaran PNBP, Realokasi Belanja Pegawai, Penambahan anggaran untuk penyelenggaraan orientasi PPPK, Realokasi Blokir AA non Belanja Pegawai, dan Penambahan anggaran belanja pegawai dari BSILHK sehingga pada akhir tahun anggaran pagu Badan P2SDM menjadi sebesar Rp305.223.325.000,00. Adapun rincian anggaran pada tahun 2023 sebagai berikut:

Proporsi pagu anggaran per Satker

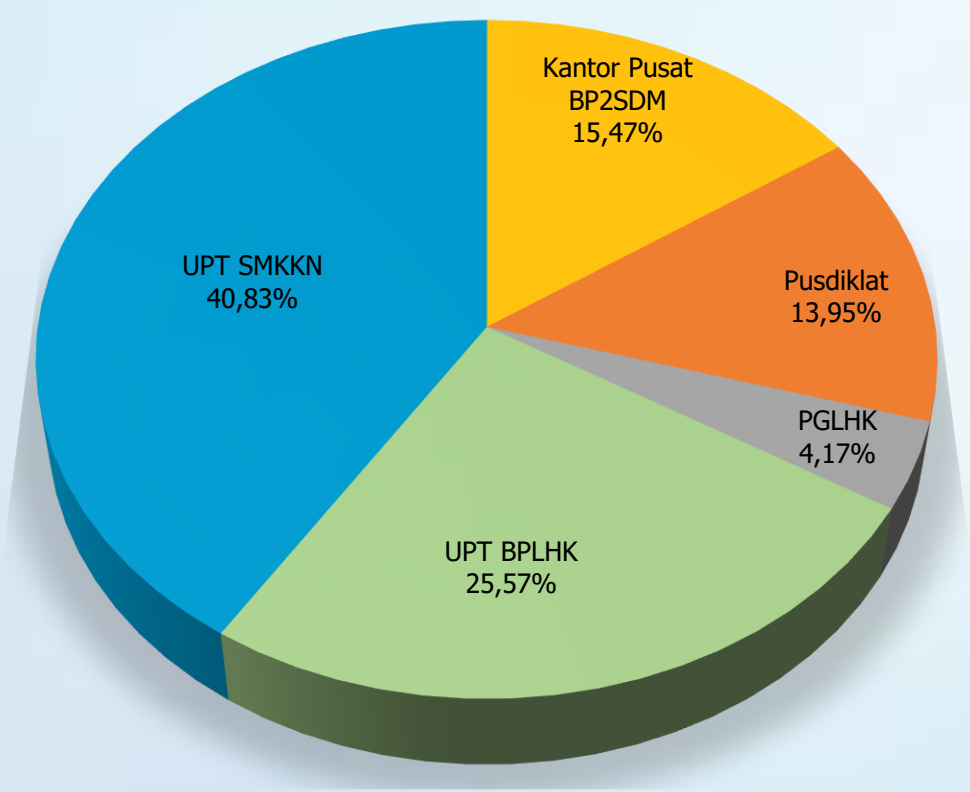

Tabel Pagu Anggaran per Sumber Dana

Sumber Dana	*Pagu*	*%*
RM	252.079.198.000	82,59%
PNBP	26.157.287.000	8,57%
SBSN	26.986.840.000	8,84%
Total	305.223.325.000	100,00%

Tabel Pagu Anggaran per Jenis Belanja

Jenis Belanja	*Pagu*	*%*
Belanja Pegawai	101.757.813.000	33,34%
Belanja Barang	159.119.681.000	52,13%
Belanja Modal	44.345.831.000	14,53%
Total	305.223.325.000	100,00%

Tabel Pagu Anggaran per Program

Jenis Belanja	*Pagu*	*%*
Dukman	173.174.691.000	56,74%
PHB	3.973.107.000	1,30%
Diklat Vokasi	128.075.527.000	41,96%
Total	305.223.325.000	100,00%

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Badan P2SDM telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Badan P2SDM dan Menteri LHK pada tanggal 27 Desember 2022. Dalam perjalanannya, terdapat perubahan pada target yang tercantum pada PK tersebut akibat adanya penyesuaian anggaran akibat kebijakan pemotongan pagu *automatic adjusment*. Biro Perencanaan KLHK memfasilitasi perubahan perjanjian kinerja tersebut pada tanggal 27 Desember 2023. Adapun perubahan target pada beberapa IKP sebagaimana tabel berikut.

Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target awal	Target revisi
Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	0,3 T	0,3 T
Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya (*)	2.940 orang	6.354 orang
	Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan bersertifikat	473 orang	472 orang
	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	69 Poin	69 Poin
	Jumlah Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	247 Lembaga	247 Lembaga
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	78 Poin	78 Poin

Selengkapnya pada lampiran 1

Untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas, Badan P2SDM diberikan dukungan anggaran sebesar Rp305.223.325.000,00, meningkat dari alokasi anggaran awal sebesar Rp296.154.950.000,00

Praktik pada Bimbingan Teknis Budidaya Maggot BSF

3

AKUNTABILITAS KINERJA

REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN

Pada Tahun 2023, Badan P2SDM melakukan perubahan pada dokumen Rencana Kerja melalui Suplemen Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2023. Dokumen tersebut disusun sebagai akibat adanya dinamika perencanaan kinerja pada tahun 2023 yang mengakomodir pergerakan anggaran maupun dukungan anggaran pada kegiatan-kegiatan dengan mekanisme kerjasama. Adapun pergerakan anggaran Badan P2SDM pada Tahun 2023 terjadi sebanyak 9 kali (Revisi DJA) dengan rincian sebagaimana berikut:

Pergerakan anggaran Badan P2SDM Tahun 2023 (revisi DJA)

No	Pagu semula (Rp x 1000)	Pagu Menjadi (Rp x 1000)	Tanggal	Keterangan
1	296.154.950	296.154.950	23 Desember 2022	Blokir Automatic Adjustment
2	296.154.950	296.154.950	27 Maret 2023	terkait Penghapusan Catatan Halaman IV.A pada Kegiatan Peningkatan Penyuluhan TA 2023
3	296.154.950	312.154.950	23 Mei 2023	Penambahan Pagu Anggaran PNBP denda Administratif bidang Kehutanan dan
4	312.154.950	310.057.183	18 Juli 2023	Realokasi belanja pegawai yang tercantum dalam Halaman IVA DIPA (Blokir) dengan penandaan Automatic Adjustment (AA)
5	310.057.183	312.353.363	9 Agustus 2023	Revisi antar Eselon I untuk kebutuhan penyelenggaraan Orientasi PPPK 2023
6	312.353.363	314.521.696	6 September 2023	Penambahan Anggaran untuk Pelatihan Pencegahan Karhutla TA 2023 yang berasal dari buka blokir AA ES1 lain
7	314.521.696	314.521.696	19 September 2023	Revisi pergeseran antar Satker pada program Dukman untuk Kegiatan SOSIALISASI PERATURAN KHDTK DAN PENYUSUNAN TARGET PNBP TAHUN 2025
8	314.521.696	304.223.325	17 Oktober 2023	Realokasi Anggaran Blokir Automatic Adjusment Non Belanja Pegawai sumber dana Rupiah Murni (RM)
9	304.223.325	305.223.325	19 Desember 2023	Penambahan anggaran belanja pegawai dari BSILHK

Pergeseran Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Badan P2SDM Tahun 2023

Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Awal	Target Revisi
5439	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM** Sasaran: *Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi dan birokrasi pada unit Badan P2SDM*	**Nilai SAKIP Badan P2SDM**	**78 Poin**	**78 Poin**
		Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
		Laporan Keuangan Badan P2SDM yang tertib dan akuntabel	1 Laporan	1 Laporan
5444	**Peningkatan Penyuluhan** Sasaran : *Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat*	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	30 Unit	30 Unit
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS yang terbentuk dan dikembangkan	20 Unit	20 Unit
		Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (penyuluh handal)	1.000 orang	1.000 orang
6745	**Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK** Sasaran: *Meningkatnya kapasitas SDM LHK*	**Lulusan Diklat aparatur LHK**	**660 Orang**	**2.549 Orang**
		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	**690 orang**	**2.022 Orang**
		Lulusan Pendidikan Karyasiswa	10 orang	10 orang
		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	**690 orang**	**883 orang**
		Nilai KHDTK yang dikelola	69 Poin	69 Poin

Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Awal	Target Revisi
6746	**Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan** Sasaran : *Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan*	**Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat**	**473 orang**	**472 orang**
6747	**Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan** Sasaran: *Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup*	**Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga yang peduli dan Berbudaya LHK, 176 orang**	**247 Unit**	**247 Unit**
		Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang LHK pada lembaga masyarakat dan komunitas, 570 Orang	610 orang	662 orang
6745	**Perencanaan dan Pengembangan SDM** Sasaran: *Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten*	Data Informasi Pengembagnan Kompetensi SDM Aparatur LHK, 5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan 390 Orang
		Data Informasi Pengembagnan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK, 5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan
		Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi, 900 orang	**900 orang**	**900 orang**

Target pada IKK lulusan Diklat aparatur LHK, Lulusan Diklat Non Aparatur LHK, dan Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha mengalami peningkatan akibat adanya pelatihan Kerjasama dengan berbagai pihak yang diintervensi anggaran oleh Badan P2SDM. Target IKK Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang LHK pada lembaga masyarakat dan komunitas meningkat akibat adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Sedangkan target IKK Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat mengalami penyesuaian.

Seluruh perubahan pada Indikator Kinerja lingkup Badan P2SDM telah disesuaikan pada dokumen perencanaan (Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja maupun RKA KL) dan telah dilakukan penyelarasan dengan Biro Perencanaan untuk melakukan perubahan pada dokumen perencanaan Kementerian LHK melalui surat Kepala Badan P2SDM nomor S.932/SET.11/PEHKT/REN.2/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023.

REVIU ATAS HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal KLHK Nomor SP.107/ITJEN/ITWIL.2/RHS/WAS.3/5/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023 pada Badan P2SDM, nilai SAKIP Badan P2SDM sebesar 76,21 Poin (BB/Sangat Baik). Nilai tersebut belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 78 poin pada tahun 2023, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat peningkatan sebesar 4,46 Poin yang berarti bahwa Badan P2SDM senantiasa melakukan perbaikan dalam tata kelola kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh Badan P2SDM untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun selanjutnya. Adapun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Badan P2SDM sebagaimana tabel penjelasan berikut:

No	Rekomendasi	Upaya Tindak Lanjut
1	Dalam Penyusunan IKP agar tidak sering berubah dan berkelanjutan dalam satu periode perencanaan (*sustainable*)	Sekretariat Badan P2SDM telah bersurat pada Biro Perencanaan terkait Perubahan Indikator Kinerja Program akibat adanya perubahan arsitektur kinerja di KLHK termasuk adanya perubahan target kinerja akibat penyesuaian alokasi anggaran (lampiran 6)
2	Target capaian kinerja IKP dan IKK yang konsisten antara Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja	
3	Hasil pencapaian target kinerja yang selaras antara Unit Eselon I dengan Unit Teknis Eselon II	Sekretariat Badan P2SDM telah bersurat pada Pusat Pengembangan Generasi LHK nomor S.911/SET.11/PEHKT/REN.2/10/2023 perihal "Perbaikan data target Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Satker PGLHK" untuk mengubah target Indikator kinerja Kegiatan pada dokumen perencanaan Satker PGLHK agar selaras dengan target Indikator Kinerja Program pada dokumen perencanaan Badan P2SDM
4	Dalam rencana kinerja tahunan atau Renja untuk memuat kriteria bahwa target kinerja akan dijadikan dasar untuk meberikan reward dan punishment dan untuk memilih dan memilah pegawai yang berkinerja dan yang kurang berkinerja	Kriteria berkinerja dan kurang berkinerja telah dicantumkan pada Renja Badan P2SDM Tahun 2023 halaman 27
5	Iternalisasi kepada Satker Pusat terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun tahun sebelumnya	Badan P2SDM telah menyelenggarakan sosialisasi standar penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Lingkup Badan P2SDM pada seluruh Satker termasuk di dalamnya membahas perbandingan realisasi kinerja Tahun ini dengan Tahun Tahun sebelumnya.
6	Memformalkan Pedoman Teknis evaluasi akuntablitas kinerja secara internal dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal KLHK sebagai Pembina SAKIP lingkup KLHK	Badan P2SDM telah memformalkan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada awal Tahun 2023 dan telah terbit Keputusan Menteri LHK nomor 975 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi yang mengatur evaluasi Akuntabilitas kinerja lingkup KLHK

METODE PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Pengukuran dilakukan terhadap empat metode yaitu presentase capaian kinerja, progress terhadap pelaksanaan Renstra, efektivitas kinerja dan efisiensi kinerja. Adapun perhitungan menggunakan formula sebagai berikut:

Presentase Capaian Kinerja

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Kinerja Tahun 2023

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Progres Renstra

Membandingkan capaian selama periode Renstra dengan target Renstra 2020-2024

$$\textbf{Capaian Renstra} = \frac{\sum \text{Realisasi 2020 s.d 2023}}{\text{Target 2020 s.d 2024}} \times 100\%$$

Efektivitas

Membandingkan % kinerja Tahun 2023 dengan %capaian kinerja tahun 2022

$$\textbf{Efektivitas} = \frac{\text{\% Fisik Tahun Berjalan}}{\text{\% Fisik Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Efektivitas ≥ 1 maka efektif
Efektivitas < 1 maka Belum Efektif

Efisiensi

Membandingkan antara capaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2023

$$\textbf{Efisiensi} = \frac{\text{\% Keuangan Tahun Berjalan}}{\text{\% Fisik Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Efisiensi > 1 maka Belum Efisien
Efisiensi ≤ 1 maka Efisien

HASIL PENGUKURAN KINERJA

1. Pesentase Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata presentase capaian kinerja Badan P2SDM Tahun 2023 terhadap perjanjian kinerja revisi sebesar 109,61% yang berarti Badan P2SDM secara umum telah berhasil melampaui target sesuai perjanjian kinerja Tahun 2023. Rincian capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Program disajikan pada tabel berikut:

Tabel Capaian IKP Badan P2SDM Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program	% Capaian		% Capaian Kinerja
		Target PK	Realisasi	
1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Rp0,3 T	Rp0,687 T	150,00%
2	Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya	6.354 orang	6.475 orang	101,90%
3	Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan bersertifikat	472 orang	472 orang	100,00%
4	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	69 Poin	74,55 Poin	108,04%
5	Jumlah Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	247 Lembaga	247 Lembaga	100,00%
6	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	78 Poin	76,21 Poin	97,71%
	Rata-rata Presentase Capaian Kinerja			109,61%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 1 Indikator Kinerja Program yang tidak tercapai yaitu Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, hal ini disebabkan adanya terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan dalam evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal KLHK diantaranya perubahan Indikator Kinerja termasuk targetnya, tidak selarasnya target kinerja pada Satker dan Eselon I, belum disahkannya pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan terdapat Satker yang tidak membandingkan kinerja terhadap Tahun-Tahun sebelumnya. Badan P2SDM telah menindaklanjutihal tersebut guna memperbaiki akuntabilitas kinerja selanjutnya.

1. Pesentase Capaian Kinerja (lanjutan)

Pengukuran capaian kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi pada Tahun 2023 dengan target yang ada pada RPJMN sebagai standar nasional. Adapun terdapat beberapa Indikator Kinerja Program yang tidak masuk dalam RPJMN karena bukan merupakan Prioritas Nasional. Rincian capain kineradisajikan pada tabel berikut.

Tabel Capaian IKP Badan P2SDM Tahun 2023 terhadap RPJMN

No	Indikator Kinerja Program	% Capaian		% Capaian Kinerja
		Target RPJMN 2023	Realisasi 2023	
1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	Rp0,687 T	-
2	Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya	10.210 orang	6.475 orang	63,42%
3	Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan bersertifikat	473 orang	472 orang	99,79%
4	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	-	74,55 Poin	-
5	Jumlah Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	960 Lembaga	247 Lembaga	25,73%
6	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	-	76,21 Poin	-
	Rata-rata Presentase Capaian Kinerja			62,98%

Berdasarkan tabel di atas, Indiaktor Kinerja Program lingkup Badan P2SDM tidak dapat tercapai sesuai target pada RPJMN, hal ini terjadi karena adanya perubahan target tahunan pada Rencana Kerja Badan P2SDM maupun KLHK menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima setiap tahunnya.

2. Efektivitas Kinerja

Rata-rata capaian kinerja Badan P2SDM Tahun 2023 meningkat 8,04% (YoY), peningkatan ini mengakibatkan rata-rata efektivitas kinerja Badan P2SDM sebesar 1,08 dengan kategori efektif. Peningkatan kinerja paling signifikan terlihat pada Indikator Kinerja Program Nilai SAKIP Badan P2SDM serta nilai Transaksi Ekonomi KTH yang dapat mencapai 150% (batas maksimal). Nilai Transaksi Ekonomi KTH merupakan Indikator Kinerja yang baru diterapkan pada Tahun 2023 sehingga tidak terdapat capaian pada Tahun 2022, namun pada perhitungan efektivitas diasumsikan capaian 2022 sebesar 100% sehingga nilai efektivitas sebesar 1,50.

Tabel Efektivitas Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program	% Capaian Kinerja		Efektivitas
		2022	2023	
1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	150,00%	1,50
2	Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya	103,38%	101,90%	0,99
3	Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan bersertifikat	100,00%	100,00%	1,00
4	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	110,09%	108,04%	0,98
5	Jumlah Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	100,00%	100,00%	1,00
6	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	94,41%	97,71%	1,03
	Nilai Efektivitas BP2SDM	101,57%	109,61%	1,08

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 2 Indikator Kinerja Program yang tidak efektif yaitu IKP Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya dengan nilai sebesar 0,99 dan IKP Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan dengan nilai sebesar 0,98. Untuk itu, pada tahun selanjutnya Badan P2SDM akan fokus untuk berupaya meningkatkan kinerja pada kedua Indikator Kinerja tersebut melalui optimalisasi pelatihan dengan metode full e-learning maupun *massive online open courses* dan melaksanakan pembinaan secara intensif pada pengelola KHDTK Diklat Kehutanan yang belum mencapai target indeks pengelolaan.

3. Efisiensi Kinerja

Secara umum kinerja Badan P2SDM pada Tahun 2023 sudah efisien, hal ini ditunjukan dari rata-rata nilai efisiensi sebesar 0,90 yang berarti penggunaan anggaran Badan P2SDM telah optimal untuk mencapai target IKP. Tingginya nilai efisiensi pada Tahun 2023 ditunjang oleh tingginya presentase capaian Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan dan Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan dari target. Rincian efisiensi kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel Efisiensi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program	% Capaian Kinerja		Efisiensi
		Fisik	Keuangan	
1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	150,00%	99,97%	0,67
2	Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya	101,90%	99,77%	0,98
3	Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan bersertifikat	100,00%	99,78%	1,00
4	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	108,04%	99,94%	0,92
5	Jumlah Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	100,00%	99,99%	1,00
6	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	97,71%	99,15%	1,01
	Nilai Efisiensi BP2SDM	109,61%	98,76%	0,90

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 1 Indikator Kinerja Program yang tidak Efisien yaitu Nilai SAKIP Badan P2SDM. Hal ini disebabkan karena penyerapan anggaran untuk mendukung kegiatan dukungan manajemen terserap sebesar 99,15% sedangkan nilai SAKIP Badan P2SDM hanya mencapai 76,71 Poin dari target 78 Poin (97,71%). Maka diperlukan upaya perbaikan kinerja dalam hal pencapaian SAKIP pada tahun-tahun selanjutnya agar dapat selaras dengan pencapaian kinerja anggaran.

4. Progres Renstra

Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata progres capaian Renstra Badan P2SDM s.d Tahun 2023 sebesar 59,69%. Secara rinci progress capaian Renstra Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel berikut.

Tabel Progres Capaian s.d Tahun 2023 terhadap Renstra Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Program	Target 2020-2024	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi s.d 2023	%
1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	2,50	-	-	-	0,687	0,687	27,48%
2	Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya	91.104	10.803	8.419	2.388	6.475	28.085	30,83%
3	Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan bersertifikat	2.364	466	475	470	472	1.883	79,65%
4	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	70	66,50	67,81	74,86	74,55	74,55	106,50%
5	Jumlah Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	4.128	77	260	176	247	760	18,41%
6	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	80,00	80,82	71,75	71,75	76,21	76,21	95,26%
	Rata-rata Progres Renstra							59,69%

Masih terdapat 3 Indikator kinerja dengan capaian rendah yaitu IKP 1, IKP 2 dan IKP 5. Beberapa Upaya yang akan dilaksanakan BP2SDM pada tahun 2024 untuk mengejar pencapaian target Renstra diantaranya:

1. Menggiatkan sosialisasi kepada KTH maupun penyuluh kehutanan untuk berpartisipasi aktif dalam penginputan data omzet KTH serta pendampingan KTH secara lebih intensif untuk meningkatkan aktivitas ekonomi KTH
2. Meningkatkan alokasi anggaran pada kegiatan pelatihan, melanjutkan intervensi anggaran pada pelatihan kerjasama dan mengoptimalkan penggunaan e-learning sehingga target pada tahun 2024 dapat meningkat cukup signifikan
3. Meningkatkan alokasi anggaran dan mengubah metode pembinaan sekolah sehingga penyelenggaraan lebih efisien dan dapat menjangkau lebih banyak target.

5. Benchmarking Kinerja

Badan P2SDM melaksanakan *bechmarking* kinerja dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian pada Bulan Oktober 2023. *Benchmarking* kinerja ini merupakan salah satu cara dalam menilai kinerja dengan membandingkan kinerja dengan Instansi lain untuk perbaikan pengelolaan kinerja di masa mendatang melalui adopsi strategi yang lebih efektif untuk peningkatan kinerja selanjutnya. Berdasarkan hasil *benchmarking*, tidak terdapat Indikator kinerja yang sama antara Badan P2SDM dengan BPPSDM yang selengkapnya sebagaimana berikut.

No	IKP BPPSDM KLHK	Target	IKP BPPSDM Pertanian	Target
1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	0,3 T	Presentase Petani Yang Menerapkan Teknologi	85%
2	Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya	6.354 orang	Presentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	85%
3	Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	472 orang	Presentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian	85%
4	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	69 Poin	Presentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya	21%
5	Jumlah Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	247 Lembaga	Nilai pEnilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birorasi BPPSDMP	34 Poin
6	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	78 Poin	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP	90,60 Poin

Indikator kinerja yang digunakan oleh BPPSDM Pertanian sebagaian besar sudah berorientasi outcome dengan tolak ukur berupa presentase penerapan teknologi maupun presentase lulusan Pendidikan vokasi yang bekerja di bidang pertanian. Berkaca dari hal tersebut, Badan P2SDM merencanakan pencantuman target outcome pada Indikator Kinerja Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan pada Renstra selanjutnya akan mengukur dan mengintervensi dampak dari lulusan SMK Kehutanan Negeri. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Program Nilai Kinerja Anggaran, sesuai arahan Biro Perencanaan juga akan menjadi salah satu Indikator yang akan di perjanjikan pada Seluruh Eselon I sampai UPT di lingkup KLHK mulai tahun 2024.

Indikator Kinerja Program 1

Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan

Target	0,3 Triliun
Capaian	0,687 Triliun
% Capaian	150,00%
Capaian Terhadap Renstra 2020-2024	27,52%

Pelaksana Pusat Penyuluhan

"Berbagai Konten Media Sosial terkait Nilai Transaksi Ekonomi KTH"

Nilai Transaksi Ekonomi KTH

Sejak tahun 2022, Kementerian LHK memulai langkah baru dalam menghitung kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional melalui Perubahan Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024, yaitu dengan memasukan Indikator Kinerja Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Perhutanan Sosial dan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH. Angka yang ditargetkan berkisar antara Rp. 2 - 9 Trilyun. Meskipun demikian langkah ini dapat menjadi alternatif untuk menambah kontribusi sektor kehutanan terhadap nilai PDB Nasional. Alternatif ini sekaligus mendukung peran pelaku tingkat tapak terhadap perekonomian nasional dan diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi di tingkat tapak.

Nilai Transaksi Ekomoni Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat NTE KTH adalah nilai rupiah yang diperoleh dari aktivitas usaha kelompok tani hutan (Perkabadan P2SDM Nomor P.5/P2SDM/SET.11/SET.1/11/2022). Perhitungan NTE dilakukan terhadap penjumlahan omzet seluruh KTH yang terdiri atas produk barang dan atau jasa termasuk turunan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta produk lainnya yang mendukung omzet.

NTE menjadi Indikator Kinerja Program pada Badan P2SDM sejak tahun 2023 berdasarkan Revisi Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024. NTE menjadi hasil akhir yang diukur untuk melihat dampak intervensi Badan P2SDM melalui pembinaan kelembagaan kelompok masyarkat dan peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan yang ada pada Pusat Penyuluhan melalui kolaborasi kegiatan penyuluhan kehutanan dengan pemerintah daerah. Berdasarkan perjanjian kinerja Badan P2SDM dengan Menteri LHK pada tahun 2023, target NTE KTH sebesar 0,3 Triliun rupiah. Adapun hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, realiasasi NTE KTH mencapai 0,687 Triliun (dibatasi 150%). Apabila dibandingkan dengan target akhir pada Renstra 2020-2024 (2,5 Triliun) maka capaian kinerja sampai tahun 2023 sebesar 27,52%.

CAPAIAN NTE KTH

2023

Target NTE KTH 2023

Rp 300.000.000.000,00

Realisasi NTE KTH 2023

Rp 686.779.436.523,00

Partisipasi KTH

3.725 KTH

Provinsi dengan NTE tertinggi

1. Lampung
   Rp. 234.767.159.636
2. Jawa Timur
   Rp. 189.007.510.786
3. Jawa Barat
   Rp. 87.175.908.742
4. Jawa Tengah
   Rp. 72.593.745.525
5. NTB
   Rp. 23.721.420.051

Jenis Barang Jasa dengan NTE tertinggi

1. Kopi
   Rp. 188.727.405.271
2. Hasil Hutan Kayu
   Rp. 105.968.860.197
3. Buah-Buahan dan Biji-Bijian
   Rp. 80.044.489.639
4. Tanaman Hasil Agroforestry
   Rp. 65.252.622.399
5. Silvopastura
   Rp. 55.042.703.561

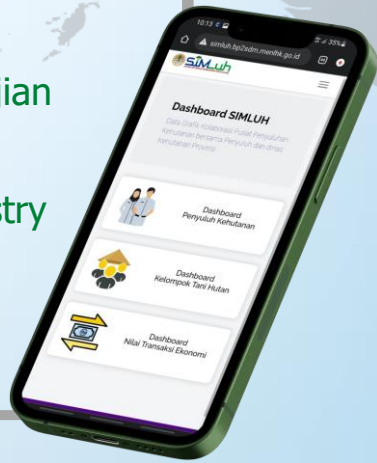

(Data SIMLUH 31 Desember 2023)

Secara rinci data NTE pada lampiran 2

MEKANISME PENGUMPULAN DATA

NTE KTH

http://simluh.bp2sdm.menlhk.go.id/

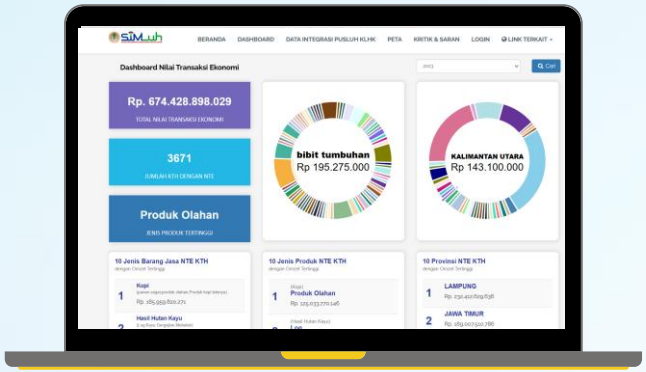

1. Penyuluh Kehutanan PNS memperoleh akses masuk (akun) SIMLUH dan melakukan pendampingan KTH di lapangan
2. Penyuluh Kehutanan PNS mengumpulkan hasil pencatatan omzet KTH per produk barang dan jasa
3. Penyuluh Kehutanan PNS menginput data omzet KTH per produk badang/jasa pada aplikasi SIMLUH sesuai dengan panduan

Guna meningkatkan pemahaman Penyuluh Kehutanan PNS dalam pengisian data NTE KTH, Badan P2SDM menyelenggarakan beberapa kali sosialisasi maupun bimbingan teknis pengukuran NTE baik secara langsung maupun secara daring terhadap 2.502 orang PK PNS dengan rincian sebagai berikut:

No	Provinsi	Peserta (Orang)	Tanggal Pelaksanaan
1.	Jawa Barat	202	2 Februari 2023
2.	Sumatera Barat	10	9 Februari 2023
3.	Yogyakarta	26	9 Februari 2023
4.	Kalimantan Utara	28	16-17 Februari 2023
5.	Lampung	50	2 Maret 2023
6.	Kalimantan Barat	21	15 Maret 2023
7.	Seluruh Dinas dan UPT KLHK	1.600	21 Maret 2023
8.	Nusa Tenggara Timur	70	4 Mei 2023
9.	Banten	8	15 Juni 2023
10.	Kalimantan Tengah	56	5 Juli 2023
11.	Jawa Timur	150	19 September 2023
12.	Sulawesi Utara	32	6 Oktober 2023
13.	Sulawesi Selatan	120	9 Oktober 2023
14.	Gorontalo	10	11 Oktober 2023
15.	Kalimantan Utara	25	13 Oktober 2023
16.	Nusa Tenggara Barat	40	24 Oktober 2023
17.	Maluku Utara	20	25 Oktober 2023
18.	Jambi	34	15 November 2023

Jumlah Penyuluh

2.856 PK PNS

Efektivitas

Efektivitas kinerja diperhitungkan dengan asumsi capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% (hal ini disebabkan karena NTE KTH baru ditetapkan menjadi IKP Badan P2SDM pada Tahun 2023). Presentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 150% (batas maksimal) sehingga nilai efisiensi sebesar 1,5 dengan kategori efektif.

Beberapa hal/strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan P2SDM untuk peningkatan NTE KTH kedepan diantaranya:

1. Melaksanakan bimbingan teknis tentang tata cara penginputan NTE secara lebih masif pada penyuluh kehutanan PNS melaksanakan bimbingan teknis tentang pencatatan administrasi data usaha dengan sasaran anggota KTH.
2. Mendorong peran aktif dinas Kehutanan dan atau Lingkungan Hidup provinsi untuk perningkatan peran aktif kelompok.
3. Melakukan Validasi Kelompok Tani Hutan yang berjumlah ±30.000, untuk memastikan keberadaan KTH yang tercatat dalam SIMLUH. Validasi ini dilakukan secara bertahap disetiap provinsi dengan berpedoman pada Nomor Registrasi KTH yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan/ LHK sebagaimana Peraturan Menteri LHK Nomor P.89/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan. Berdasarkan hasil validasi dapat dipastikan jumlah KTH yang ada dan tercatat secara resmi sampai saat ini berjumlah 23.775 KTH.
4. Memasukkan kewajiban penginputan Nilai Transaksi Ekonomi ke Aplikasi SIMLUH yang dituangkan dalam SK Penetapan Penerima Biaya Operasional Penyuluhan
5. Memberikan stimulus dan percontohan melalui pembentukan KTH Mandiri dan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan oleh KTH.

Efisiensi

Presentase penggunaan sumberdaya (anggaran) sebesar 99,97% dibandingkan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 150,00% sehingga menghasilkan nilai efisiensi sebesar 0,67 dengan kategori efisien. Secara nyata, Badan P2SDM melakukan upaya-upaya efisiensi dalam pengelolaan NTE KTH seperti pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi dengan metode daring ataupun *hybrid*, mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIMLUH untuk pengumpulan data omzet KTH.

Ouput

Tercapainya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan sebesar 0,687 Triliun

Outcome

Tercapainya peningkatan kontribusi PDB sektor kehutanan terhadap nilai PDB Nasional

Success Story

KTH WONOSANTRI ABADI

Salah satu KTH Mandiri yang mendapatkan fasilitasi tahun 2023 yaitu KTH Wonosantri Abadi. Kelompok Tani Hutan (KTH) Wonosantri Abadi yang diketuai oleh Fatkhul Ulum, S.Pd.I atau biasa dipanggil Gus Ulum merupakan salah satu Kelompok Tani Hutan yang berlokasi di Desa Toyomarto yang masuk dalam wilayah Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Saat ini, 120 anggota KTH didampingi penyuluh kehutanan Wiwin Yuliari, SP. KTH Wonosantri Abadi memiliki produk unggulan berupa biji kopi yang bernama Kopi Lembah Arjuna, atau yang lebih dikenal dengan nama Kopi Lemar. Kopi tersebut telah beredar di masyarakat melalui kedai kopi yang ada di sekitar Malang Raya. Sampai dengan saat ini KTH Wonosantri Abadi terus berkembang dan mendapatkan beberapa legalitas usaha dan produk yang membantu dalam pemasaran, seperti ijin edar PIRT maupun produk halal.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam fasilitasi KTH mandiri yaitu kegiatan dalam kelola kelembagaan yang dilakukan secara swadaya. Hal ini dilakukan karena KTH memiliki SDM yang berkualitas. Anggota KTH dibagi menjadi beberapa divisi. Anggota senior difokuskan dalam kegiatan budidaya, sementara anggota kaum muda/milenial fokus pada pengolahan dan pemasaran. Beberapa anggota KTH sudah memiliki sertifikat seperti sertifikasi pemandu wisata, instruktur, pengolahan buah, roaster, dan barista, serta memiliki anggota KTH yang ahli di bidang fotografi dan videografi. Pemantapan Kelola Kawasan dilakukan secara swadaya. Pemantapan Kelola usaha yaitu peningkatan kualitas usaha yaitu pengadaan grinder dan milk steamer. Penambahan sarana kualitas pasca panen berupa washer kopi dan grader kopi. Selanjutnya penambahan sarana kuantitas paska panen berupa dome jemur dan gazebo.

Nilai transaksi ekonomi KTH Wono Santri Abadi ssampai dengan Desember 2023 senilai Rp. 1.171.650.003,- yang terdiri dari chery kopi sejumlah 4,5 ton, greenbean kopi arabika 695kg, dengan pemasaran internasional. Keripik talas, ubi dan pisang sebanyak 12 ton/tahun secara nasional. Pembibitan kopi, alpukat dan balsa secara swadaya di lahan 2000 m2 dengan kapasitas produksi 20.000 bibit. Bibit dijual kepada masyarakat dengan harga murah. Untuk bibit alpukat hanya membayar biaya sambung sebesar Rp. 3000/bibit, sementara bibit kopi dijual Rp. 5.000/ bibit (pasaran harga diatas Rp.10.000/bibit karena sudah tersertifikasi). KTH Wono Santri abadi juga memperoleh omzet NTE KTH dari penjualan tanaman hias, buah-buahan, wana ternak, wisata alam dan paket pemagangan di Wanawiyata Widyakarya.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

1. Tersedianya sistem informasi yang mendukung dalam pengumpulan dan perhitungan data Nilai Transaksi Ekonomi KTH
2. Kewajiban penginputan data NTE KTH binaan yang tercantum dalam SK Penyuluh Kehutanan PNS penerima Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan
3. Peran aktif pada beberapa dinas kehutanan dan lingkungan hidup provinsi dalam mendorong upaya pengumpulan dan penginputan data NTE KTH pada provinsinya masing-masing
4. Kebijakan Dinas Kehutanan/Dinas LHK Provinsi yang menjadikan NTE KTH sebagai tolak ukur kinerja Penyuluh Kehutanan

Kendala Pelaksanaan Kegiatan

1. Masih kurangnya kesadaran kelompok dalam pentingnya melakukan pembukuan terhadap produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan
2. Komoditas usaha KTH yang beragam belum seluruhnya tercantum dalam panduan barang dan jasa komoditas NTE KTH

Upaya Tindak Lanjut

1. Terus melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis baik penginputan data NTE bagi Penyuluh Kehutanan PNS maupun bimbingan teknis pencatatan administrasi data usaha bagi anggota KTH
2. Penyempurnaan panduan barang dan jasa komoditas NTE KTH

Indikator Kinerja Program 2

Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya

Target	6.354 orang
Capaian	6.475 orang
% Capaian	101,90%
Peningkatan Kinerja (YoY)	↓ 1,47%
Capaian Terhadap Renstra 2020-2024	30,83%

Pelaksana Pusat Diklat SDM LHK, Pusat Renbang SDM, dan BPLHK

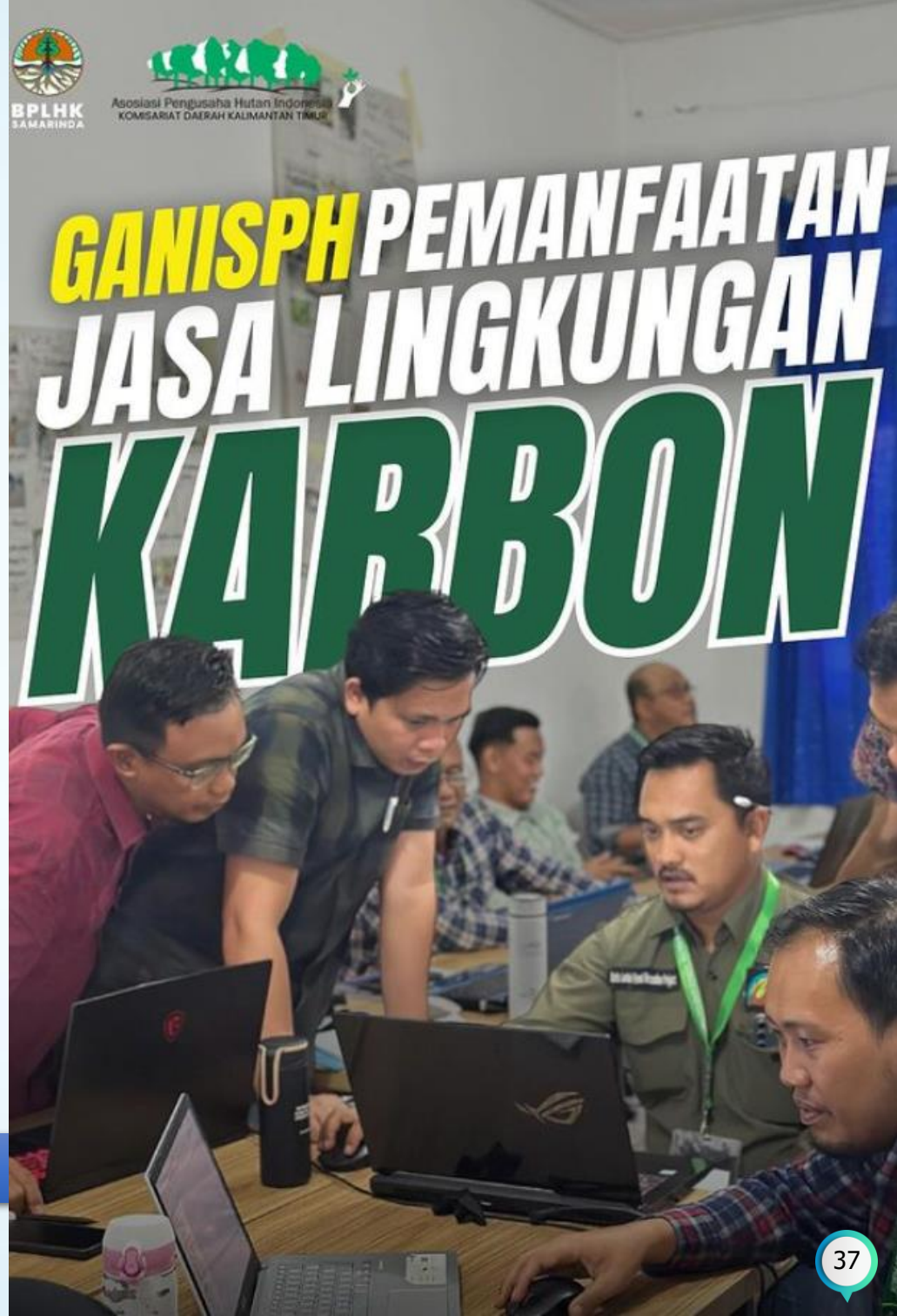

"Aktivitas pelatihan pada Balai Pelatihan LHK"

Pengembangan kompetensi SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dan tuntunan Pembangunan bidang LHK. Tenaga kerja yang dibutuhkan tidak hanya memiliki pengatahuan mendalam terkait ilmu lingkungan dan kehutanan, tetapi juga membutuhkan keterampilan dan perilaku yang mendukung Pembangunan berkelanjutan. Diperlukan SDM yang berkualifikasi sesuai (dibuktikan dengan uji kompetensi) untuk dapat menjadi motor penggerak dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, program dan inovasi di bidang LHK, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Selain itu, pengembangan kompetensi SDM juga berkontribusi pada peningkatan daya saing SDM, keahlian dan pemahaman yang mendalam terkait dengan isu-isu lingkungan dan kehutanan sehingga menjamin keberhasilan kinerja SDM LHK.

Pada tahun 2023, sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja Badan P2SDM memiliki target indikator kinerja program Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya sebanyak 6.354 orang. Adapun kinerja dapat terealisasi sebanyak 6.475 orang (101,90%) yang dicapai melalui 4 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Lulusan Diklat Aparatur LHK, Lulusan Diklat Non Aparatur LHK, Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha, dan Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi.

Lulusan Diklat Aparatur LHK

2.552 orang

Lulusan Diklat Non Aparatur LHK

2.031 orang

Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha

886 orang

Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi

1.006 orang

Secara umum capaian kinerja sejak tahun 2020-2023 selalu melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pelaksanaan pelatihan pada tahun 2023 lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada tahun 2023 Badan P2SDM menghitung kinerja melalui mekanisme Kerjasama. Pelatihan dengan mekanisme kerjasama selalu dilakukan setiap tahunnya, namun baru pada tahun 2023 Badan P2SDM memiliki inisiatif untuk mengkoordinir seluruh Satker yang menyelenggarakan pelatihan lingkup Badan P2SDM untuk mengintervensi anggaran Badan P2SDM pada pelatihan dengan mekanisme Kerjasama sehingga target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dapat meningkat secara signifikan.

Sampai dengan Tahun 2023, realisasi pada IKP 2 telah mencapai 28.085 orang atau sebesar 30,83% dari target Renstra (91.104 orang). Capaian terhadap target Renstra ini cukup rendah disebabkan penetapan target pada saat penyusunan Renstra yang mengakomodir pelaksanaan program kartu prakerja melalui 2 Indiaktor Kinerja Kegiatan yaitu "Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha" dan "Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi" dengan target masing-masing IKK 35.000 orang. Pada pelaksanaannya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, terdapat 12 Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kartu prakerja dimana KLHK tidak termasuk di dalamnya sehingga dukungan anggaran tidak dapat teralokasikan sebagaimana mestinya.

Mengingat rendahnya capaian tersebut, Badan P2SDM mendorong/melakukan intervensi pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi melalui mekanisme kerjasama dengan Eselon I KLHK dan Pemerintahan Daerah, optimalisasi pelatihan menggunakan metode e-learning, dan mengembangkan metode pelatihan *Massive Open Online Courses* (MOOC). Pelatihan dengan metode MOOC ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan pelatihan berbasis MOOC terhadap 509 orang dengan biaya yang sangat rendah. Pelaksanaan MOOC ini sedianya akan dilaksanakan sebanyak 8 batch namun dikarenakan terdapat server LMS KLHK sedang mengalami perbaikan sehingga pelaksanaan hanya sampai pada batch 7.

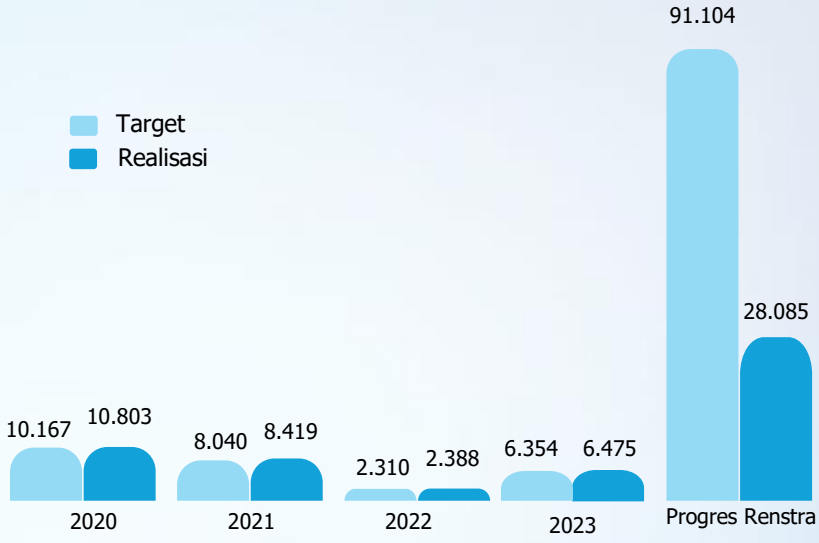

Peningkatan kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan melalui pelatihan aparatur SDM LHK, pelatihan non aparatur SDM LHK dan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Diklat SDM LHK serta 7 Balai Pelatihan LHK lingkup Badan P2SDM baik secara tatap muka, *blended learning* maupun *full e-learning* dengan peserta dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Rincian pelaksanaan pelatihan sebagaimana lampiran 2.

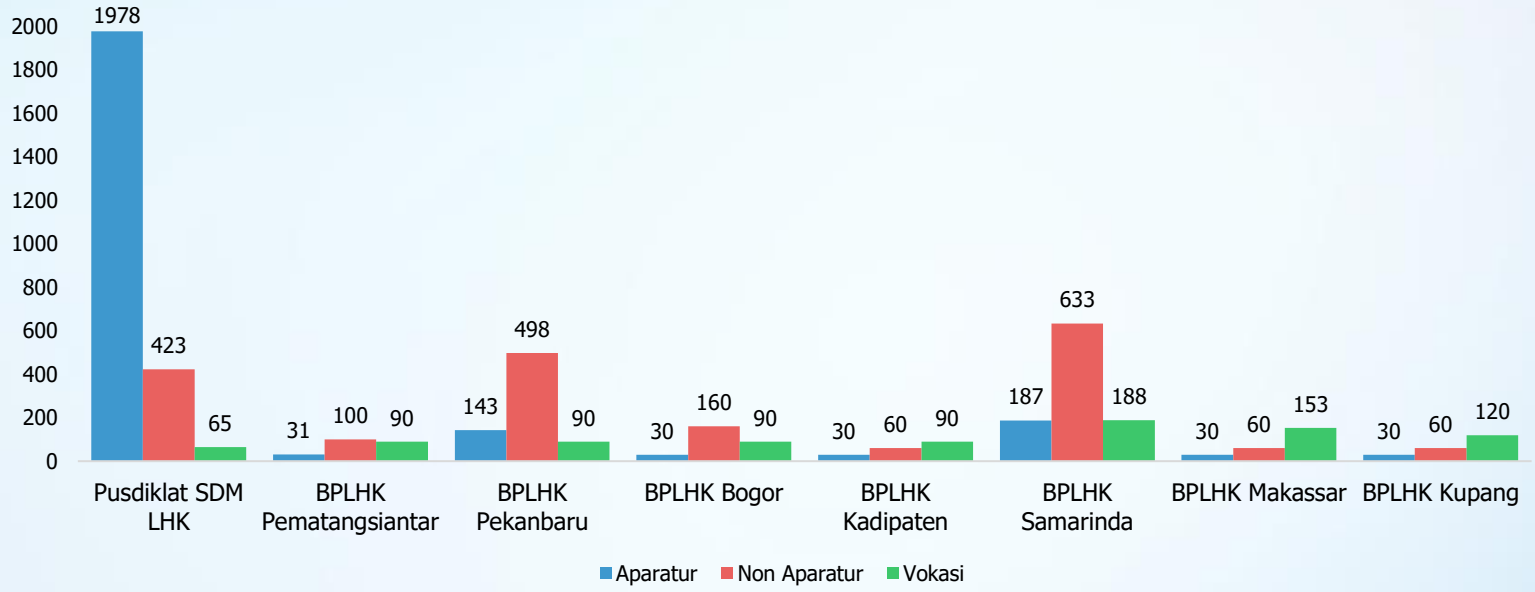

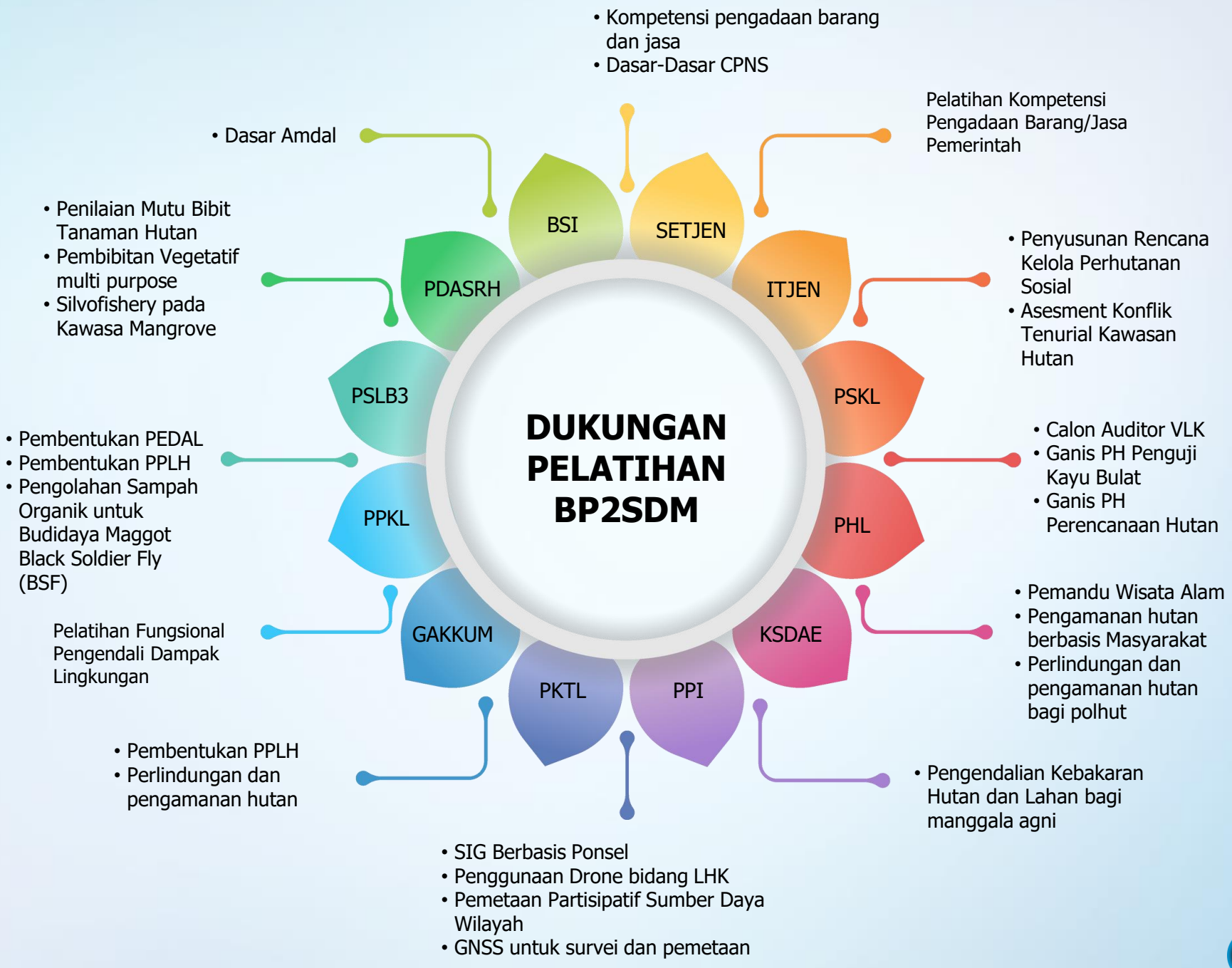
• Kompetensi pengadaan barang dan jasa
• Dasar-Dasar CPNS
Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Dasar Amdal
• Penilaian Mutu Bibit Tanaman Hutan
• Pembibitan Vegetatif multi purpose
• Silvofishery pada Kawasa Mangrove
• Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial
• Asesment Konflik Tenurial Kawasan Hutan
• Pembentukan PEDAL
• Pembentukan PPLH
• Pengolahan Sampah Organik untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF)
• Calon Auditor VLK
• Ganis PH Penguji Kayu Bulat
• Ganis PH Perencanaan Hutan
Pelatihan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
• Pemandu Wisata Alam
• Pengamanan hutan berbasis Masyarakat
• Perlindungan dan pengamanan hutan bagi polhut
• Pembentukan PPLH
• Perlindungan dan pengamanan hutan
• Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi manggala agni
• SIG Berbasis Ponsel
• Penggunaan Drone bidang LHK
• Pemetaan Partisipatif Sumber Daya Wilayah
• GNSS untuk survei dan pemetaan
BSI
SETJEN
ITJEN
PSKL
PHL
KSDAE
PPI
PKTL
GAKKUM
PPKL
PSLB3
PDASRH
DUKUNGAN PELATIHAN BP2SDM

Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM LHK

Sertifikasi Kompetensi SDM LHK merupakan sebuah pengakuan terhadap SDM LHK yang memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap kerja (attitude) sesuai dengan standar kompetensi yang yang dipersyaratkan. Dengan demikian Sertifikasi kompetensi bisa dijadikan landasan sekaligus jaminan bahwa seseorang sudah layak dan pantas menduduki jabatan dan/atau melaksanakan tugas pada bidang tertentu. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM cq Pusat Perencanaan Pengambangan SDM, diberi kewenangan dalam menyelenggarakan uji kompetensi/sertifikasi kompetensi SDM LHK.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan uji komepetensi/sertifikasi kompetensi terhadap 1.204 orang, baik SDM Aparatur maupun SDM Non Aparatur, dengan hasil uji sebanyak 1.006 orang dinyatakan kompeten dan 198 orang dinyatakan belum kompeten. Adapun jumlah SDM per jenis jabatan yang dinyatakan kompeten sebagai berikut:

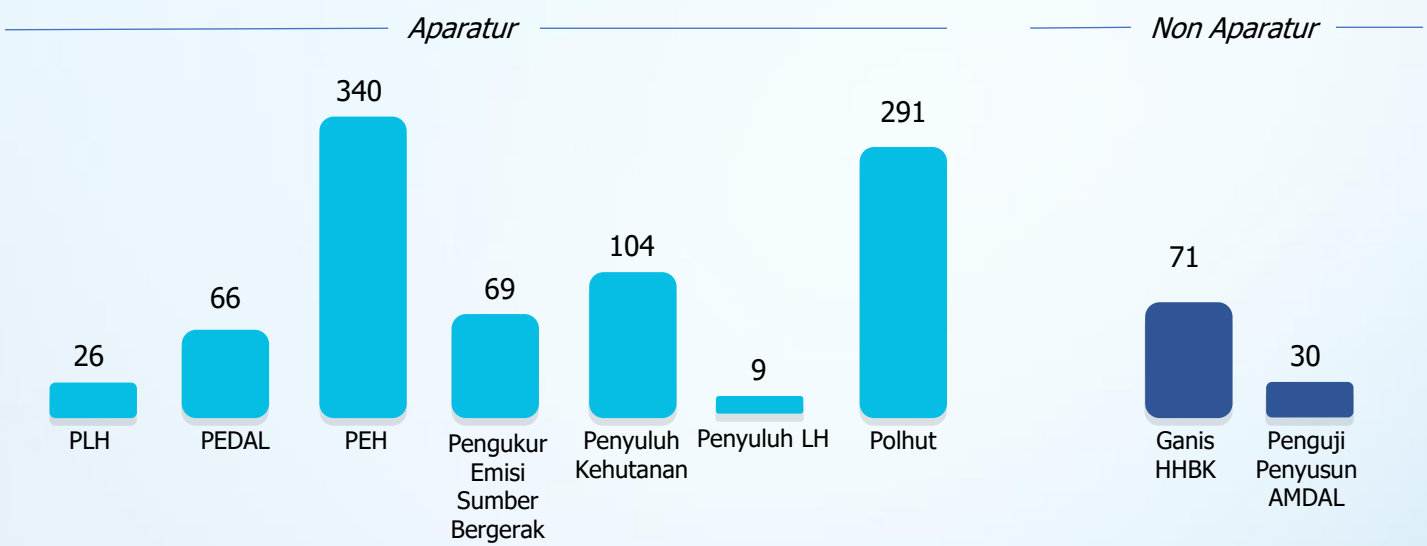

Selain melaksanakan uji kompetensi, Badan P2SDM berperan dalam memberikan layanan pada Lembaga seritifikasi seperti penyusunan skema uji kompetensi, pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), perpanjangan lisensi LSP, penyusunan SKKNI.

Dalam mendukung layanan uji kompetensi SDM Aparatur LHK, Badan P2SDM memiliki sumber daya berupa assesor, Tempat Uji Kompetensi maupun Skema Uji Kompetensi yang memadai sebagai berikut:

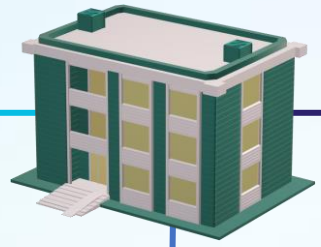

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
LUK SDM Aparatur

Asesor

115 orang

80 orang

Tempat Uji Kompetensi

7 TUK pada Balai Diklat LHK dan TUK sewaktu pada 34 provinsi

Skema Uji Kompetensi

23 Skema — Kehutanan

13 Skema — LH

Pengembangan Assesor

- *Upgrading untuk peningkatan kapasitas asesor sebanyak 2 kali*
- *Recognition Current Competency bagi assesor yang akan memperpanjang masa berlaku sertifikatnya sebanyak 89 orang*

Optimalisasi TUK BPLHK

Pelaksanaan Uji Kompetensi pada:
BPLHK Pematangsiantar 23 orang
BPLHK Kupang 22 orang
BPLHK Pekanbaru 95 orang
BPLHK Samarinda 33 orang
BPLHK Bogor 106 orang
BPLHK Kadipaten 107 orang
BPLHK Makassar 80 orang

PENERAPAN STANDKOM

"Penerapan standar kompetensi digunakan untuk kenaikan jenjang jabatan JF, pengangkatan PNS ke dalam JF melalui penyesuaian/ inpassing, perpindahan jabatan PNS ke dalam JF"

Efektivitas

Capaian Kinerja pada Tahun 2023 menurun sebesar 1,47% dari tahun 2022 sehingga berdasarkan perhitungan, nilai Efektivitas kinerja mencapai 0,99 dengan kategori belum efisien. Secara nyata upaya peningkatan kinerja yang akan dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan maupun uji kompetensi melalui mekanisme kerjasama, pengembangan metode pelatihan secara online seperti *Massive Open Online Courses* (MOOC), serta meningkatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pelatihan pada tahun 2024 sehingga target kinerja dapat meningkat secara signifikan.

Efisiensi

Presentase penggunaan sumberdaya (anggaran) sebesar 99,77% dibandingkan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 101,90% sehingga menghasilkan nilai efisiensi sebesar 0,98 dengan kategori efisien. Secara nyata, Badan P2SDM melakukan upaya-upaya efisiensi dalam peningkatan kompetensi SDM dengan melaksanakan pelatihan menggunakan metode blended learning dan *full e-learning*, lebih jauh Badan P2SDM sedang mengembangkan metode *Massive Open Online Courses* pada pelatihan pengarusutamaan gender. Selanjutnya metode tersebut akan dikembangkan untuk jenis-jenis pelatihan lainnya di tahun 2024.

Ouput

Meningkatnya kompetensi SDM LHK sebanyak 5.469 orang dan tersertifikasinnya sebanyak 1.006 orang pejabat fungsional

Outcome

Meningkatnya kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga menjamin presesisi kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan

> *"Competencies are the knowledge, skills, abilities, and behaviors that contribute to individual and organizational performance"*

KOMITMEN BP2SDM

Badan P2SDM berkomitmen mewujudkan Assessment Center KLHK yang terakreditasi dalam rangka memfasilitasi penilaian kompetensi dan potensi terhadap 16.040 orang pegawai KLHK berbasis sistem merit.

AKREDITASI

Kepala BKN, melalui Keputusan Nomor 10/BKN/XII/2022 Tanggal 22 Desember 2022 memberikan Akreditasi B pada Assessment Center KLHK sampai dengan 22 Desember 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Assessment Center KLHK memiliki standar kelayakan penyelenggaraan penilaian kompetensi pada jabatan administrator dan fungsional setara.

ASSESSMENT CENTER
KEMENTERIAN LHK

IMPLEMENTASI

Tahun 2023 Assessment Center KLHK, telah melakukan penilaian potensi dan kompetensi SDM Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari; uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional dan kenaikan jenjang jabatan fungsional binaan KLHK (KLHK dan Pemda).

ASSESSMENT CENTER KLHK

Jl. Raya Cifor, RT.03/RW.05, Desa Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16115.

pusrenbang.aparaturklhk@gmail.com

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI (LSK) PENYUSUN AMDAL

LATAR BELAKANG

PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LHK dan Permen LHK Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Amdal, LPJP Amdal, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menjadi pijakan terhadap perubahan mekanisme Sertifikasi Kompetensi Amdal dimana kewenangan penuh penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Kementerian LHK melalui Lembaga Sertifikasi Kompetensi Amdal (LSK Amdal).

IMPLEMENTASI

PEMBERIAN REKOMENDASI CALON LSK AMDAL

LSK Amdal yang disahkan Menteri LHK Tahun 2023:

- LSK Lingkungan Hidup Lestari
- LSK PERTALINDO
- LSK INKALINDO

PERSONIL PPA

Tahun 2023 telah dilaksanakan ujian bagi Calon Penguji Penyusun Amdal (PPA) sebanyak 3 kali dengan tujuan untuk memastikan kelayakan dan kompetensi PPA sebagai pelaksana sertifikasi kompetensi penyusun Amdal. Saat ini telah tersedia 42 orang PPA dari 3 LSK Amdal.

SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN AMDAL

Hasil sertifikasi kompetensi penyusun Amdal oleh LSK :

- 44 orang Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA)
- 32 orang Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA).

KTH PALOL TOB

Peduli Rakyat

Dengan modal Pelatihan Penggolahan Jambu Mete dari BPLHK Kupang di tahun 2019, KTH yang berada di 62 km dari Kota Kupang ini berhasil mendorong peningkatan perkeonomian masyarakat serta saat ini menjadi salah satu sentra pembelajaran pengolahan dan pemasaran produk jambu mete di Region Bali dan Nusa Tenggara.

KTH ini juga menjadi salah satu ujung tombak perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di KHDTK Sesi Meni Sanam - BPLHK Kupang.

Keberhasilan ini didukung dengan adanya pendampingan pasca pelatihan yang intensif dari Widyaiswara dan Penyuluh Kehutanan BPLHK Kupang dalam memastikan diterapkannya materi pelatihan yang sudah diterima.

PERUBAHAN OMZET

Rp300rb/minggu

2017 - penjualan 20 kg mete gelondongan

Rp960rb/minggu

2020 - penjualan 20 kg mete olahan

DAMPAK PELATIHAN & PENDAMPINGAN

Peran pelatihan dan pendampingan pasca pelatihan memberikan dampak yang nyata dalam peningkatan pendapatan KTH yang sangat fantastis sebesar 3 kali lipat selama kurun waktu 2020 sd 2023.

TAHUN	KAPASITAS (Kg)	NILAI JUAL GLONDONGAN (Rp)	NILAI JUAL METE OLAHAN (Rp)
2020	242.412,00	29.089.440,00	89.819.200,00
2021	2.296,00	27.552.000,00	85.420.000,00
2022	1.931,20	23.174.400,00	72.463.000,00
2023	2.232,00	26.784.000,00	82.830.000,00
JUMLAH	248.871,20	106.599.840,00	330.532.200,00

Catatan: harga glondongan Rp12rb /kg

PEMASARAN

Sampai dengan tahun 2023, pemasaran produk sudah tersebar di beberapa supermarket di wilayah Kota Kupang sampai dengan toko oleh-oleh di Labuan Bajo serta pemasaran rutin di wilayah Jawa Timur.

Langkah-langkah peningkatan nilai jual: Pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Pengajuan Sertifikat Halal, Pemasaran ke toko swalayan dan promosi di stasiun radio lokal, Inovasi kemasan produk

SENTRA PELATIHAN

Pada saat ini, lokasi KTH Paloil Tob menjadi tempat pembelajaran bagi peserta pelatihan BPLHK Kupang, studi banding beberap instansi pemerintahan di Kota Kupang dan Sumba Timur, perguruan tinggi, SMKKN Makassar SMK Kehutanan Nibaaf Timur Tengah Utara.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

1. Pelaksanaan pelatihan telah menyesuaikan dengan keadaan pasca pandemi Covid-19 sehingga metode pembelajaran tidak hanya pelatihan jarak jauh (E-Learning) dengan memanfaatkan LMS pada Pusat Diklat SDM LHK namun juga blended learning dan klasikal.
2. Ketersediaan sumber daya manusia baik widyaiswara, pengelola dan penyelenggara pelatihan terutama ketersediaan admin dan Sub Admin yang sudah cukup merata di Pusat Diklat SDM LHK dan BPLHK - BPLHK pelaksana pelatihan.
3. Adanya Lembaga Sertifikasi Profesi LUK SDM Aparatur LHK yang terlisensi oleh BNSP disertai assesor kompetensi yang bersertifikat dengan jumlah yang memadai
4. Adanya kerjasama yang baik dengan Eselon I lingkup KLHK maupun dinas yang menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan sehingga pelaksanaan uji kompetensi dapat berjalan dengan optimal dan melebihi target yang ditetapkan.
5. Telah terselenggaranya Pelatihan yang menggunakan metode MOOC *(Massive Online Open Courses)* yang merupakan program pelatihan yang dirancang dengan standar kompetensi, waktu yang fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan peserta lingkup KLHK.

Kendala Pelaksanaan Kegiatan

1. Badan P2SDM belum dapat memfasilitasi kebutuhan pelatihan di lingkup KLHK.
2. Jumlah usulan calon peserta uji kompetensi setiap tahunnya melebihi kemampuan anggaran yang tersedia.
3. Daftar calon peserta uji kompetensi yang disampaikan Eselon I teknis lingkup KLHK terlambat untuk diverifikasi oleh Biro Kepegawaian.
4. Adanya perubahan peserta uji (mundur) secara mendadak pada saat pelaksanaan uji, sehingga tidak bisa digantikan oleh peserta lain yang telah memenuhi persyaratan uji namun belum mendapat kesempatan karena keterbatasan kuota peserta.
5. Adanya kebijakan pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) dapat menghambat pencapaian kinerja
6. Belum stabilnya penggunaan LMS *E-Learning* KLHK agar dapat memberikan akses yang lebih luas untuk penerimaan peserta pelatihan dalam jumlah tanpa batas.

Upaya Tindak Lanjut

1. Meningkatkan koordinasi lingkup Badan P2SDM maupun mitra (Eselon I KLHK, Kementerian Lain, dan pemerintah daerah) untuk memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi.
2. Badan P2SDM perlu berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian untuk percepatan verifikasi calon peserta uji kompetensi.
3. Melakukan koordinasi/konfirmasi dengan unit kerja asal peserta untuk memastikan kesediaan dan persyaratan peserta untuk mengikuti uji kompetensi.
4. Mengembangkan pelatihan – pelatihan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan metode pembelajaran yang lebih inovatif, fleksibel sesuai kebutuhan peserta tidak hanya lingkup KLHK namun juga bisa lintas instansi dan masyarakat

Indikator Kinerja Program 3

Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan bersertifikat

Target	472 orang
Capaian	472 orang
% Capaian	100,00%
Peningkatan Kinerja (YoY)	= 0,00%
Capaian Terhadap Renstra 2020-2024	79,65%

SMK Kehutanan Negeri

"aktivitas Pembelajaran dan Praktek Siswa SMK Kehutanan Negeri "

Captured by Rizal, SMKKN Makassar

Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan

Penyelenggaraan Pendidikan SMK Kehutanan Negeri bertujuan untuk menyediakan tenaga teknis menengah kehutanan yang sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, responsive, demokratis dan menjadi motor penggerak Pembangunan kehutanan di lapangan dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan untuk kesejahteraan Masyarakat serta memiliki daya saing Tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, lulusan SMK Kehutanan diberikan materi pembelajaran di kelas, praktek lapang dan magang sedemikian rupa sehingga memiliki kompetensi dan daya saing agar siap mengisi kebutuhan tenaga kerja di Tingkat tapak khususnya maupun mengisi tenaga di tingkat tapak.

Badan P2SDM memiliki sebanyak lima SMK Kehutanan Negeri di Pekanbaru, Kadipaten, Samarinda, Makassar, dan Manokwari dengan total siswa (kelas X-XII) sebanyak 1.483 orang. Sebagai SMK Model dengan berbagai kegunggulan, SMK Kehutanan di lingkup Badan P2SDM diharapkan menjadi pelopor dan contoh bagi sekolah kejuruan kehutanan lainnya.

Tahun 2023, Badan P2SDM meluluskan sebanyak 472 orang siswa SMK Kehutanan Negeri dari target 472 orang (100,00%). Capaian ini sama jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 100,00%, yang berarti kinerja baik dapat dipertahankan. Sejak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023, Badan P2SDM berhasil menyediakan 1.883 orang tenaga lulusan Pendidikan menengah kejuruan kehutanan negeri yang siap bekerja di tingkat tapak. Capaian ini menghasilkan presentase sebesar 79,65% dari target Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 2.364 orang. Melihat capaian yang cukup tinggi ini, Badan P2SDM optimis target tersebut dapat tercapai pada Tahun 2024.

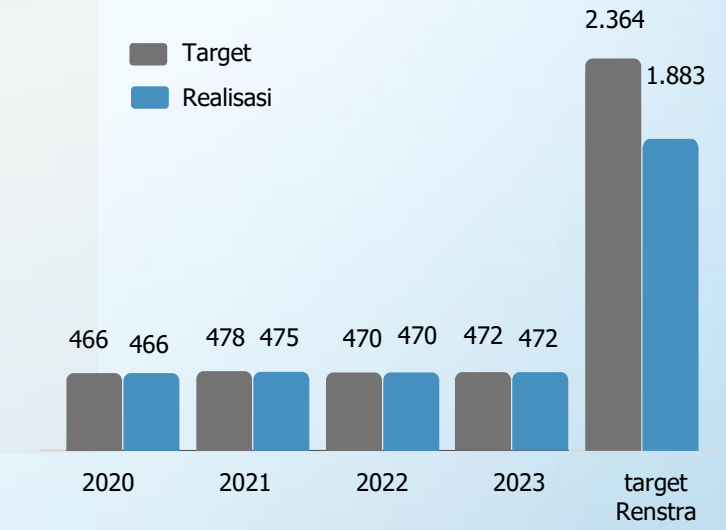

Proporsi Lulusan SMKK Negeri

Berdasarkan jenis kelamin, lulusan SMK Kehutanan Negeri Tahun 2023 didominasi oleh jenis kelamin Laki-laki sebanyak 365 orang sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 116 orang. Proporsi jenis kelamin laki-laki lebih dominan karena factor ketersediaan sarana prasarana terutama asrama.

Terdapat empat paket kompetensi utama di SMK Kehutanan Negeri. Masing-masing paket kompetensi dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan spesifik guna memenuhi berbagai aspek kebutuhan SDM bidang kehutanan. adapun paket kompetensi tersebut meliputi:

1. Teknik Produksi Hasil Hutan (TPHH): *Kompetensi Penguji dan Pengukur Kayu Bundar*
2. Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH): *Kompetensi Pembuatan Peta hasil Pengolahan GPS*
3. Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRRH): *Kompetensi Pembuat bibit generatif*
4. Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan (TKSH): *Kompetensi Pemanduan Wisata Alam*

	TIPH	TRRH	TPHH	TKSDA	Total
Pekanbaru	34	34	34	0	102
Kadipaten	26	25	25	25	101
Samarinda	0	68	34	0	102
Makassar	35	32	0	34	101
Manokwari	0	0	35	31	66
Total	**95**	**159**	**128**	**90**	**472**

365 orang

116 orang

Guna mendukung kompetensi, Siswa SMK Kehutanan Negeri melakukan Praktek Kerja Lapang di berbagai perusahaan Swasta Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Taman Nasional, Taman Hutan Raya (Tahura) dll.

Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja, presetase capaian kinerja pada Tahun 2023 sama dibandingkan tahun 2022 yaitu 100% sehingga menghasilkan nilai efektivitas sebesar 1 dengan kategori Efektif. Salah satu upaya peningkatan kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan P2SDM kedepan dalam penyediaan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yaitu mengupayakan pelaksanaan pengabdian alumni lulusan SMK Kehutanan Negeri. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki keterampilan dan pengalaman siswa dalam bekerja dan meningkatkan jejaring kerja. Selain itu adanya peningkatan fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran melalui dana SBSN pada SMKKN Pekanbaru dan saat ini sedang proses Pembangunan di SMKKN Manokwari.

Efisiensi

Presentase penggunaan sumberdaya (anggaran) sebesar 99,78% dibandingkan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 100% sehingga menghasilkan nilai efisiensi sebesar 1 dengan kategori efisien. Secara nyata, Badan P2SDM melakukan Upaya-Upaya efisiensi dengan menginternalisasi materi Lingkungan Hidup kedalam kurikulum pembelajaran untuk memperkaya keilmuan siswa.

Ouput

Tersedianya sebanyak 472 orang tenaga menengah kejuruan kehutanan Negeri yang siap bekerja di sektor lingkungan hidup dan kehutanan

Outcome

Terpenuhinya tenaga terampil untuk mengisi kebutuhan SDM dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak

NI LUH LIDAWATI

Srikandi Penakluk Api

Anak pertama dari 7 bersaudara pasangan Ni Komang Sukawati dan I Nyoman Widana yang lahir di Jati Bali pada 28 Juni 1999. Menjadi siswa di SMKKN Makassar yang lulus pada Tahun 2017 dengan salah satu kompetensi dasar mengenai pemetaan kawasan, Nil Luh menjadi anggota Manggala Agni di DAOPS III Konawe - SULTRA.

Menjadi satu-satunya Manggala Agni wanita di DAOPS III Konawe sejak 2017, karir Ni Luh diawali menjadi petugas administrasi kantor dan operator pemetaan kawasan.

Sosok Ni Luh memiliki tanggungjawab yang besar, tidak hanya ikut andil dalam kegiatan pencegahan dan pemadaman serta penanganan pasca karhutla, dia juga bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan lain di lapangan yakni mulai dari pengecekan dan penyediaan kebutuhan logistik personel, koordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi Karhutla.

Puncaknya adalah penghargaan dari Menteri LHK, Ibu Siti Nurbaya , sebagai Srikandi Manggala Agni Patriot Bangsa pada tahun 2019 di Manggala Wanabakti, Jakarta.

TIDAK PERLU MENJADI MINUMAN MEWAH TAPI CUKUP MENJADI AIR PUTIH YANG SEDERHANA TAPI BERMANFAAT

Progres Pembangunan Sarana Prasarana dari Sumber Dana SBSN

Pada Tahun 2023, Badan P2SDM membangun kampus II SMK Kehutanan Negeri Manokwari di Kabupaten Sorong menggunakan sumber dana SBSN menggunakan mekanisme Multi Years Contract (MYC) selama 2 tahun. Pembangunan sarana dan prasarana ini dalam rangka memberikan terobosan pengembangan sarana dan prasarana kampus SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang sulit berkembang sejak tahun 2008 akibat permasalahan status lahan. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi upaya pengembangan SMK Kehutanan Negeri Manokwari tetapi juga berdampak pad akondisi lingkungan yang kurang kondusif untuk proses pembelajaran dan pembinaan peserta didik. Untuk itu, Pembangunan kampus II di kosong ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Pendidikan dalam rangka penyiapan SDM yang sesuai dengan profil lulusannya dapat tercapai dan berdampak pada tersedianya lulusan yang mandiri dan berdaya saing.

Total alokasi anggaran untuk Pembangunan kampus II SMK Kehutanan Negeri Manokwari sebesar Rp77.260.000.000. Adapun pada tahun 2023 teralokasi sebesar Rp26.986.840.000 dengan realisasi mencapai 92,10%. Tidak optimalnya penyerapan anggaran karena nilai kontrak yang disepakati berada di bawah pagu anggaran dan terdapat beberapa pekerjaan yang tidak selesai pada tahun 2023. Untuk itu akan dilakukan optimalisasi dengan meluncurkan anggaran SBSN untuk tahun 2024

SMK Kehutanan Swasta Binaan Badan P2SDM

Selain membawahi 5 SMK Kehutanan Negeri, Badan P2SDM juga membina sebanyak 31 SMK yang memiliki jurusan kehutanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi supervisi dan monitoring, webinar pengembangan kapasitas guru, pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, kegiatan pembelajaran, kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri di bidang kehutanan serta sertifikasi kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

PKL KELAS 3

SMKKN MENCETAK TENAGA PROFESIONAL

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BADAN P2SDM

Untuk memberikan wawasan kepada peserta didik terutama kelas XII mengenai pengelolaan hutan, maka diberikan materi praktek sesuai tuntutan perusahaan. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa-siswi kelas 3 dilaksanakan di KPH Perum Perhutani dengan materi meliputi pengelolaan hutan jati, pengelolaan hutan wisata, pengolahan getah gondorukem dan terpentin, persemaian, penatausahaan kayu, pengamanan dan perlindungan hutan. Untuk jurusan Teknik Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan dilaksanakan di BPDAS & HL dengan materi agroforestry, konservasi tanah dan air, perbenihan, pembibitan, penanaman, kultur jaringan. Program PKL ini dirancang untuk menyiapkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bekerja.

KEGIATAN BELAJAR SMKKN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BADAN P2SDM

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab untuk menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang profesional, berakhlak mulia dan siap memasuki bursa kerja di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK Kehutanan Negeri mengacu pada perkembangan kurikulum secara nasional, yaitu dengan menerapkan kurikulum 2013 Revisi untuk kelas XII dan XI dengan penjurusan Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Teknik Produksi Hasil Hutan. Untuk Kelas X menerapkan Kurikulum Merdeka Tahun 2022 yang lebih simple, intens, bebas, leluasa, relevan dan interaktif. Kurikulum SMK Kehutanan meliputi mata pelajaran dasar umum, dasar kejuruan dan kejuruan.

DISIPLIN

ILMU

KARAKTER

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

1. Tersedianya tenaga pendidik yang kompeten, sarana dan prasarana pembelajaran siswa yang memadai termasuk Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus melalui sinergitas dengan Balai pelatihan LHK
2. Ketersediaan anggaran yang memadai

Kendala Pelaksanaan Kegiatan

1. Terdapat peserta didik SMKK Negeri yang mengundurkan diri pada proses pembelajaran.
2. Belum optimalnya penyerapan lulusan SMK Kehutanan Negeri di dunia usaha dan dunia industri salah satunya karena siswa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi (30-40% lulusan setiap tahun).

Upaya Tindak Lanjut

1. Melakukan reviu mekanisme PPDB (kuota jalur khusus, sanksi, persayaratan) dan Revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 42 Tahun 2015.
2. Menyusun profil lulusan SMK, pengembangan kurikulum serta mendorong adanya peluang lulusan SMK Kehutanan Negeri untuk magang di UPT lingkup KLHK selama 1 tahun.

Indikator Kinerja Program 4

Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan

Target	69 Poin
Capaian	74,55 Poin
% Capaian	108,04%
Peningkatan Kinerja (YoY)	↓ 2,05%
Capaian Terhadap Renstra 2020-2024	106,5%

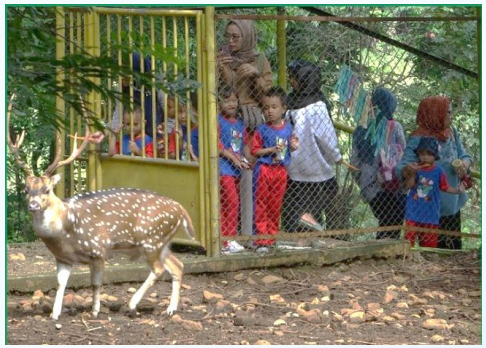

Pelaksana Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Pelatihan LHK

"Berbagai aktivitas pemanfaatan KHDTK-Hutan Diklat di lingkup Badan P2SDM"

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus – Diklat Kehutanan

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan suatu Kawasan hutan yang secara khusus diperuntukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, Pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.7 Tahun 2021). Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan harus memperhatikan sistem pengelolaan hutan Lestari, komprehensif, mandiri dan terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholder. Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat selain untuk kegiatan praktek peserta diklat, namun juga dimanfaatkan sebagai lokasi praktek siswa SMK Kehutanan dapat lebih terfokus pada suatu kawasan hutan dengan pengelolaan yang baik tanpa merubah fungsi hutan tersebut.

Pengelola KHDTK memiliki kewajiban untuk:

1. Perlindungan hutan untuk mencegak dan membatasi kerusakan hutan dan lingkungan
2. Konservasi hutan dan keanekaragaman hayati
3. Rehabilitas hutan
4. Pemeliharaan batas areal KHDTK
5. Mengkoordinasikan pengelolaan KHDTK dengan instansi yang menangani kehutanan setempat
6. Melaksanakan pelaporan pengelolaan KHDTK

Guna mengukur keberhasilan pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan, dilakukan penilaian efektifitas pengelolaan berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian dilaksanakan melalui dua tahap, self assessment oleh setiap pengelola KHDTK Diklat Kehutanan (dilakukan setiap semester), serta validasi dan penilaian akhir oleh Tim Penilai dari Pusat Diklat SDM LHK (dilakukan akhir tahun).

Kriteria dan Indikator Penilaian Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK-Diklat Kehutanan

Perencanaan	Pelaksanaan Kegiatan	Kerjasama Pengelolaan	Pemanfaatan Hutan	Pembangunan Sarpras Pendukung	Pelaporan
15%	***30%***	***10%***	***30%***	***10%***	***5%***
• Inventarisasi hutan • Penataan Areal • Penyusunan Rencana Program	• Tingkat efektivitas organisasi pengelola • Tingkat kelayakan SDM Pengelola • Pelaksanaan diklat teknis dan atau diklat fungsional kehutanan di KHDTK • Pemeliharaan batas areal KHDTK • Rehabilitasi hutan • Melakukan konservasi tanah dan air • Konservasi hutan dan kehati • Perlindungan dan pengamanan hutan	• Terdapat dokumen perjanjian Kerjasama • Terdapat rencana Bersama antar pihak • Pelaksanaan Kerjasama berjalan sesuai dokumen dan rencana kerja	• Pemanfaatan Kawasan (khusus HP) • Pemungutan HHBK • Pemanfaatan Jasa lingkungan dari wisata alam • Pemberdayaan masyarakat	• Terdapat rencana pembangunan sarpras pendukung • Pelaksanaan pembangunan sarpras pendukung • Terpeliharanya sarpras pendukung	• Penyusunan laporan tepat waktu dan sesuai format • Isi laporan pengelolaan KHDTK

Kriteria dan Indikator penilaian Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK-HD diatur dalam Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.6/P2SDM/SET.11/DIK.0/12/2022 tentang Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK-HD

Berdasarkan hasil verifikasi dan penjaminan mutu oleh Pusat Diklat SDM LHK atas *self assessment* yang dilakukan oleh seluruh Balai Pelatihan LHK, diperoleh nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK-HD pada Tahun 2023 adalah sebesar 74,55 poin (mencapai 108,04% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 69 poin). Nilai tersebut merupakan rerata nilai dari KHDTK Diklat Kehutanan yang dikelola oleh 7 Balai Pelatihan LHK.

Jika melihat tabel hasil penilaian di samping, masih terdapat 2 KHDTK di lingkup Badan P2SDM yang belum mencapai nilai sesuai target yang ditetapkan yaitu KHDTK-HD Loa Haur yang dikelola oleh BPLHK Samarinda dan KHDTK-HD Sisimeni Senam yang dikelola oleh BPLHK Kupang. Indikator yang menjadi kelemahan utama yaitu inventarisasi hutan, sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pelatihan.

Secara umum capaian Indeks Evektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan pada tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 74,86 Poin (penurunan 0,31 Poin) akibat adanya penyempurnaan implementasi terhadap penilaian Indeks KHDTK Diklat Kehutanan di lapangan. Namun demikian, capaian sampai dengan Tahun 2023 ini telah berhasil melebihi target Renstra 2020-2024 sebesar 70 poin dengan presentase sebesar 106,5%, oleh karenanya, seluruh BPLHK perlu mempertahankan capaian tersebut agar tidak terjadi penurunan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Hasil Penialaian Indeks Pengelolaan KHDTK-HD Tahun 2023

No	Satker / KHDTK-HD	Nilai
1	BPLHK Pemantangsiantar / KHDTK-HD Pondok Buluh	81,75
2	BPLHK Pekanbaru / KHDTK-HD Bukit Suligi	74,75
3	BPLHK Kadipaten / KHDTK-HD Sawala Mandapa	81,92
4	BPLHK Bogor / KHDTK-HD Rumpin	83,08
5	BPLHK Makassar / KHDTK-HD Tabo-Tabo	70,17
6	BPLHK Samarinda / KHDTK-HD Loa Haur	68,25
7	BPLHK Kupang / KHDTK-HD Sisimeni Senam	61,92
	Rata-Rata	74,55

Progres Realisasi Capaian IKP 1 s.d Tahun 2023

Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja, presetase capaian kinerja pada Tahun 2023 menurun 2,05% dibandingkan tahun 2022 sehingga menghasilkan nilai efektivitas sebesar 0,98 dengan kategori belum efektif. Beberapa hal yang akan dilaksanakan oleh Badan P2SDM untuk peningkatan kinerja pengelolaan KHDTK kedepan diantaranya meningkatkan ketertiban dalam penyusunan laporan, penguatan kelembagaan KHDTK dengan melibatkan pihak terkait, pemantauan dan monitoring secara rutin, kerja sama pengelolaan KHDTK, pengawasan terhadap unit pengelola, dan penyamaan persepsi dalam pengelolaan kawasan.

Efisiensi

Presentase penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 99,94% dibandingkan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 108,04% sehingga menghasilkan nilai efisiensi sebesar 0,92 dengan kategori efisien. Secara nyata, Badan P2SDM melakukan upaya-upaya efisiensi dalam pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan seperti melakukan monitoring rutin dua kali setahun melalui rangkaian penilaian mandiri (*self asesmen*), validasi dokumen, validasi lapangan yang dipandang perlu.

Ouput

Meningkatnya pengelolaan KHDTK-Diklat Kehutanan dengan Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK-HD sebesar 74,86 Poin

Outcome

Tersedianya KHDTK-Diklat Kehutanan yang dikelola dengan baik sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan Pendidikan menengah kejuruan kehutanan di lingkup Badan P2SDM berjalan lebih optimal

Lanscape KHDTK Sisimeni Senam, Kupang

Sinergitas dan Pengembangan KHDTK-HD

Setiap Tahunnya Badan P2SDM senantiasa melanjutkan sinergitas pengelolaan KHDTK antara Balai Pelatihan LHK dengan SMK Kehutanan Negeri lingkup Badan P2SDM sebagai tindak lanjut arahan Menteri LHK perihal keterpaduan antara pendidikan, pelatihan dan sertifikasi serta implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar. Kegiatan praktik Siswa SMK Kehutanan Negeri diarahkan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan KHDTK, untuk itu pada Tahun 2023 dilakukan beberapa peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada KHDTK seperti ruang asrama, perbaikan akses jalan, pembuatan dermaga, renovasi persemaian, dll.

PEMANFAATAN KHDTK OLEH SMK KEHUTANAN NEGERI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN P2SDM

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan suatu Kawasan hutan yang secara khusus diperuntukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, Pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya. Badan P2SDM melalui 7 Balai Pelatihan LHK mengelola 7 KHDTK-HD yang mendukung kegiatan praktik lapang peserta pelatihan maupun siswa SMK Kehutanan. Dalam rangka sinergitas pengelolaan KHDTK dan peningkatan kompetensi siswa maka SMKKN mengembangkan sarana teaching factory di KHDTK-HD BPLHK. Selain itu, SMKKN memanfaatkan KHDTK untuk kegiatan pembelajaran terutama kegiatan praktik siswa dengan memanfaatkan demplot-demplot yang tersedia seperti demplot satwa, demplot pengelolaan lebah madu, demplot perencanaan, demplot persemaian, demplot produksi dan pusat informasi KHDTK.

Seminar Nasional Pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan

Seminar Nasional Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan dilaksanakan untuk menyamakan persepsi paradigma pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan sesuai dengan ketentauan pada Peraturan Menteri LHK nomor 7 Tahun 2023. Seminar yang bertema "Mendorong Peningkatan Kualitas SDM LHK" ini dilaksanakan pada 5-7 Juli 2023 di kota Malang dengan studi lapang di Universitas Brawijaya (UB) Forest. Peserta yang menghadiri kegiatan ini sebanyak 122 orang yang mewakili 21 unit Pengelola KHDTK Diklat Kehutanan Perguruan tinggi, 7 Unit Pengelola KHDTK Diklat Kehutanan Balai Pelatihan LHK dan 1 unit Pengelola KHDTK Diklat Kehutanan Kementerian/Lembaga. Adapun rumusan hasil seminar sebagai berikut:

1. Perlunya mengingat bahwa prioritas pengelolaan KHDTK Hutan Diklat adalah untuk pendidikan dan pelatihan bukan kelola usaha
2. Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat perlu disadari bahwa memang bukan profit center akan tetapi kenyataannya adalah cost center
3. Kewajiban pengelola dalam pengamanan dan pengawasan Kawasan perlu menjadi perhatian,
4. Penataan administrasi tentang status dan wilayah beberapa KHDTK penting dilakukan,
5. Adanya rencana pengelolaan (RP) penting sebagai landasan kelola dan kerjasama berikutnya sehingga perlu kiranya ada bimbingan teknis maupun pendampingan penyusunan RPJP KHDTK Hutan Diklat,
6. Perlu dicari mekanisme kerjasama pengelolaan yang sederhana namun tidak menyalahi aturan agar pengelolaan tetap berjalan. Kerjasama di luar KHDTK dengan lokus di KHDTK sebagaimana dilakukan UGM baik dipertimbangkan,
7. Pengembangan kompetensi bagi pengelola KHDTK penting didesain dan diagendakan, dan
8. Jika perlunya dibentuk wadah komunikasi pengelola KHDTK Hutan Diklat dapat dilakukan kemudian.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

1. Terpenuhinya Rencana Pengelolaan (RP) KHDTK Diklat Kehutanan baik jangka panjang, menengah dan pendek dengan memperhatikan kriteria dan indikator pengelolaan KHDTK sebagai pedoman dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan Kawasan.
2. Sinergitas pengembangan KHDTK-HD antara Balai Pelatihan LHK dan SMK Kehutanan Negeri KLHK mendukung kegiatan aktifitas praktik teknis kehutanan di KHDTK-HD dalam berbagai pendidikan dan pelatihannya sehingga KHDTK-HD dapat lebih termanfaatkan secara optimal.
3. Pemanfaatan KHDTK-HD dapat dipergunakan oleh institusi pendidikan (Universitas, SMA/SMK, SMP dan SD) dan mitra kerja pemerintah maupun swasta sehingga KHDTK-HD dapat lebih termanfaatkan optimal dalam pengelolaan KHDTK-HD yang berkelanjutan.
4. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK mulau perencanaan, perlindungan, dan lainnya dengan institusi lain yang terkait. Sebagai contoh kegiatan pengamanan dan penegakan hokum bersinergi dengan Balai Gakkum, dalam hal penataan dan pemeliharaan batas dengan BPKHTL.

Kendala Pelaksanaan Kegiatan

1. Unit pengelola KHDTK Diklat Kehutanan pada Balai Pelatihan LHK kurang begitu jelas, hal ini menghambat pendanaan dan pengendalian personil yang berakibat pada keamanan dan kinerja pengelolaan KHDTK.
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola KHDTK-HD belum memadai.
3. Keterbatasan anggaran sehingga sangat terbatas dalam pengembangan Kawasan dan tergantung dengan kerjasama/sinergitas dengan pihak lain.
4. Masih terjadinya gangguan hutan yang disebabkan oleh aspek ekologi, ekonomi dan sosial.
5. Batasan paradigma pengelolaan KHDTK yang belum demikian jelas pada P.7/2021 antara paradigma Pengelolaan Hutan Lestari (sustainable Forest Management-SFM); yang boleh melakukan perencanaan, pemeliharaan, penebangan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan produksi; atau paradigma pengelolaan KHDTK Hutan Diklat yang tidak dibolehkan memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan produksi, menjadi factor penghambat dalam pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan.

Upaya Tindak Lanjut

1. Membentuk unit pengelola KHDTK-HD pada Balai Pelatihan LHK
2. Penambahan kuantitas SDM KHDTK-HD dilakukan secara insidental melalui pemberdayaan siswa SMK Kehutanan, Widyaiswara, Akademisi, mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang kontributif dalam mendukung pengelolaan KHDTK yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas SDM pengelola KHDTK-HD melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sinergitas pengembangan KHDTK-HD dengan para pihak.
5. Meningkatkan kemantapan kawasan melalui pemeliharaan batas kawasan, patroli, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, sosialisasi serta pengembangan kemitraan.

Indikator Kinerja Program 5

Jumlah lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup

Target	247 Lembaga
Capaian	247 Lembaga
% Capaian	100,00%
Peningkatan Kinerja (YoY)	= 0,00%
Capaian Terhadap Renstra 2020-2024	18,41%

"Berbagai aktivitas pengelolaan lingkungan hidup di sekolah"

Komunitas Masyarakat yang perduli dan berbudaya lingkungan hidup memiliki peran penting dalam Upaya menjaga kelestarian alam. Melalui kesadaran kolektif dan Tindakan Bersama,Masyarakat dapat berkontribusi secara signifikan dalam aksi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu, Badan P2SDM melaksanakan kegiatan pemberdayaan/pembinaan kelompok Masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku untuk peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan.

Upaya meningkatkan peran aktif masyarakat secara masif, sistematik, terstruktur khususnya pada lembaga masyarakat/komunitas dan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan pada Tahun 2023 dilakukan melalui:

1. Pembinaan masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan melalui kegiatan bimtek, pendampingan, pemantauan dan evaluasi.
2. Mendorong gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (GPBLHS) melalui kegiatan bimtek, pendampingan, penghargaan, pemantauan dan evaluasi.

Pada Tahun 2023, Badan P2SDM melalui Pusat PGLHK melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap 247 Lembaga dari target sebanyak 247 Lembaga (100% dari target perjanjian kinerja). Secara umum sejak tahun 2020-2023 Badan P2SDM selalu dapat mencapai target pembinaan dan pendampingan pada sekolah Adiwiyata maupun lembaga masyarakat/komunitas sehingga capaian konsisten berada di 100%. Sampai dengan tahun 2023, telah dilaksanakan pembinaan terhadap 760 Lembaga dari target Renstra 4.128 Lembaga di tahun 2024 sehingga presentase capaian Renstra sebesar 118,41%. Rendahnya capaian tersebut karena ketersediaan pagu anggaran yang belum sesuai dengan target capaian kegiatan pembinaan akibat efisiensi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 maupun blokir anggaran.

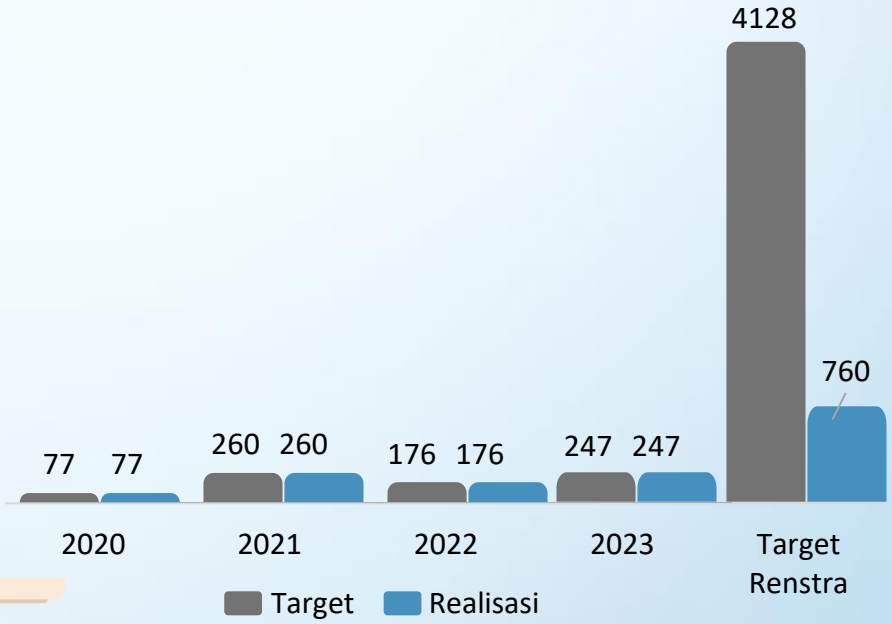

Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS)

Tahun 2023, Badan P2SDM berfokus pada kegiatan pembinaan sekolah dalam melaksanakan Gerakan PBLHS melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan dengan melibatkan Penyuluh LH, Instruktur, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), serta Praktisi Lingkungan Hidup. Sasaran pembinaan Gerakan PBLHS yaitu calon sekolah Adiwiyata tahun 2020 s/d 2022 yang tidak memenuhi kriteria sekolah Adiwiyata Mandiri dan Nasional. Materi dalam bimtek ini adalah kebijakan Gerakan PBLHS, cara menyusun Identifikasi Potensi dan Permasalahan Lingkungan Hidup (IPMLH) dan rencana Gerakan PBLHS, cara menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terintegrasi Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH), pemantauan dan evaluasi Gerakan PBLHS, pemenuhan kriteria sekolah Adiwiyata, dan aplikasi SIDIA yang disampaikan oleh Fungsional Pusat PGLHK. Pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan peran serta sekolah dalam upaya meningkatkan warga sekolah yang peduli, ramah dan berbudaya lingkungan. Daftar sekolah yang dibina sebagaimana pada lampiran 5. Dari total 230 sekolah yang mengikuti pembinaan Gerakan PBLHS, terdapat 94 sekolah yang potensial dan mengajukan diri untuk memperoleh penghargaan Adiwiyata Mandiri maupun Nasional.

No	Bimtek	Tgl Kegiatan	Metode	Lokasi Kegiatan	Peserta	Jumlah Peserta	Satuan
1	Gerakan PBLHS 1	16 s/d 17 Maret 2023	*Hybrid*	Padang – Sumatera Barat	Regional Sumatera (Aceh, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara)	59	Lembaga
2	Gerakan PBLHS 2	16 s/d 17 Maret 2023	*Hybrid*	Banjarmasin – Kalimantan Selatan	Regional Kalimantan (Kalimantan Barat, Selatan, Timur, Utara)	54	Lembaga
3	Gerakan PBLHS 3	12 s/d 13 April 2023	*Hybrid*	Makassar – Sulawesi Selatan	Regional Sulawesi (Gorontalo, Sulawsi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawsi Tenggara, Sulawesi Utara)	19	Lembaga
4	Gerakan PBLHS 4	12 s/d 13 April 2023	*Hybrid*	Bogor – Jawa Barat	Regional Jawa, Bali dan Nusa tenggara (DIY, DKI Jakarta, Jwa Barat, Jawa Tengah, Bali dan NTB)	98	Lembaga
				Jumlah		**230**	**Lembaga**

Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Nasional

Selain melaksanakan pembinaan, Badan P2SDM pada tahun 2023 juga memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Gerakan PBLHS) berupa penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional dengan rincian sebanyak 134 penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri dari 20 Provinsi dan 417 penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dari 29 Provinsi. Pemberian penghargaan Adiwiyata telah dilaksanakan sejak tahun 2006, sampai dengan tahun 2023 jumlah sekolah yang telah menerima penghargaan sebanyak 1.133 Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 4.650 Sekolah Adiwiyata Nasional (sumber data aplikasi SIDIA 2023).

Penerima penghargaan Adiwiyata dinilai telah berhasil menerapkan praktik-praktik baik dan perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah dan sekitar sekolah. Dalam pelaksanaannya, mereka juga melaksanakan Gerakan PBLHS.

Kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri sebagai pendukung kegiatan Adiwiyata

KERJASAMA INTERNASIONAL

Kegiatan luar negeri

- The 15th Meeting of The ASEAN Working Group on Environmental Education (AWGEE) 13-14 Juli 2023
- ASEAN-GIZ AMUSE and 3RproMar Youth and School Workshop 23 Agustus 2023
- The 4th ASEAN Eco-Schools and The 2nd ASEAN Youth Eco-Champions (AYECA) Awards 22 Agustus 2023
- Talkshow at Greening Education Hub, Dubai UAE 6 Desember 2023
- Talkshow at Indonesia Pavilion, Dubai, UAE 8 Desember 2023

KERJASAMA DALAM NEGERI

Kegiatan dalam negeri

- Perjanjian Kerjasama (PKS) 4 Kementerian (KLHK, KEMENDIKBUTRISTEK, KEMENAG dan KEMENDAGRI) tentang "Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup pada Satuan Pendidikan Formal
- PKS antara Pusat PGLHK dengan PT. Astra International Tbk, Nomor : PKS.18/PGL/PPPB/SDM.2/3/2023, dan Nomor : 001/LOA-EST/III/2023, tentang Pembinaan Generasi Muda Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup
- PKS antara Pusat PGLHK dengan PT. Amerta Indah Otsuka, Nomor : PKS.20/PGL/PPPB/SDM.2/9/2022, dan Nomor : 001/IX/2022/CORCOM/PKS-AIO, tentang Pembinaan Sekolah dan Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan Hidup Melalui Program Otsuka *Blue Planet*
- PKS antara Pusat PGLHK dengan PT. Tirta Investama, Nomor : PKS.17/PGL/PPPB/SDM.2/1/2022, dan Nomor : O16/TIV/AG-KLHK/1/2022, tentang Pembinaan Gerakan Muda Peduli Pengelolaan Sampah Melalui Program Edukasi Sampahku Tanggung Jawabku
- PKS antara Pusat PGLHK dengan PT Suntory Garuda Beverage, Nomor : PKS.18/LATMAS/PGL/KUM.3/4/2021 dan Nomor : SP/8122020/0268, tentang Pembinaan Gerakan Lingkungan di Sekolah dan Masyarakat dalam Konservasi Air

Gerakan Lembaga Masyarakat /komunitas Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup

PBLHS, Badan P2SDM juga melaksanakan "Bimbingan Teknis Kader lingkungan dalam Mendukung Pembentukan Kampung Iklim" terhadap anggota Lembaga/Komunitas dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melakukan aksi nyata perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendukung program pembentukan kampung iklim (Proklim) yang digagas oleh Kementerian LHK.

Tujuan dari Pembinaan adalah:

1. Meningkatkan peran aktif/nyata lembaga/komunitas dalam melakukan gerakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Mendorong agar lembaga/lingkungan hidup dan kehutanan yang melibatkan sebanyak mungkin warga masyarakat, berkelanjutan, bersinergi satu sama lain, serta dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan di daerahnya.

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan pembinaan serta pendampingan terhadap 17 lembaga/komunitas dengan sebaran sebagaimana berikut:

No	Nama Lembaga/ Komunitas	Provinsi	Rencana Aksi
1	Komunitas Bank Sampah Kencana Berseri-BSD Kencana Loka Tangerang Selatan	Banten	Pembuatan Komposter Bata Terawang; Sosialisasi Pembuatan Eco Enzyme;
2	Komunitas Bank Sampah Komunitas Sadar Lingkungan/ Kodarling RW 6 Kelurahan Setu Tangerang Selatan	Banten	Penanaman Tanaman Toga dan Sayuran dengan Pemanfaatan Lahan Kosong dan Tumpangsari; Sosialisasi;
3	Komunitas Sahabat Moringa TPST 3R BPA, kab. Tangerang	Banten	Preparasi Ketahanan Pangan; Reservasi Air Tanah dan Resapan Air; Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah TPST;
4	Komunitas Bank Sampah Hijau Cemerlang Cisauk, kab. Tangerang	Banten	Sosialisasi Bank Sampah; Ternak Lele; Ternak Maggot; Penanaman;
5	Komunitas Kelompok Tani Bina Karya Sarana, Jakarta Utara	DKI Jakarta	Penanaman Tanaman Sayuran; Penanaman Buah;
6	Komunitas Titah Darling Indonesia, Kecamatan kemang, kab. Bogor	Jawa Barat	Ketahanan Pangan Rumahan; Sosialisasi Pembuatan Alat Pupuk Organik Cair;
7	Komunitas KPSA Wana Lestari Sawojajar, kab. Brebes	Jawa Tengah	Pembuatan IPAH; Himbauan; Pembibitan Mangrove;
8	Komunitas Bharentol, kab. Majalengka	Jawa Barat	Sosialisasi Ketahanan Pangan; Penanaman Hidroponik; Pembuatan IPAH;
9	Komunitas Bank Sampah Sauyunan, kab. Sumedang	Jawa Barat	Sosialisasi Pemilahan Sampah; Pembuatan Biowash;
10	Komunitas Bank Sampah Bastari Ujungrusi, kab. Tegal	Jawa Tengah	Sosialisasi SeGoEmpuk; Pembuatan Lobang Biopori; Pembuatan Sumur Resapan;
11	Komunitas Wage Berkah, kab. Cirebon	Jawa Barat	Melakukan Pembibitan; Pembagian Bibit ke Masyarakat;
12	Komunitas Bank Sampah Amanah, Kota Cirebon	Jawa Barat	Membuat IPAH; Membuat Sumur Resapan; Membuat Lubang Biopori;
13	Komunitas KWT Desa Gajahan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	Sosilisasi Pengolahan Sampah; Sosilisasi ketahanan Hidroponik; Beternak;
14	Komunitas Posyantek Sukowati Desa Pengkol, Kec. Tanon, kab. Sragen	Jawa Tengah	Sosialisasi Pengolahan Sampah; Pembuatan Lubang Biopori; Pembuatan Sumur Resapan;
15	Komunitas Proklim RW 02 Kelurahan Kauman Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta	Jawa Tengah	Sosialisasi Pengolahan Sampah; Pembuatan SPAH; Pembuatan Pergola;
16	Komunitas Bank Sampah, Kelurahan Benar, Kec Tegal Rejo, Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta	Sosialisasi Pengolahan Sampah; Pembuatan Lubang Biopori;
17	Komunitas Bank Sampah Desa Jati Asri, Kecamatan Kasreman, kab. Ngawi	Jawa Timur	Sosialisasi Pengolahan Sampah; Praktek Penanaman Sayuran dan Buah; Pemanfaatan Pupuk Organik;

Success Story Pembinaan Komunitas Lingkungan dalam Pembentukan Kampung Iklim

Penguatan Kelembagaan

1. Komunitas Sahabat Moringa Kabupaten Tangerang menjadi bagian dari Paguyuban Bumi Puspiptek Asri.

2. Komunitas Sadar Lingkungan menjadi Pengurus Program Kampung Iklim Perumahan Komplek Puspiptek RW 006.

Penyerahan dukungan pembinaan dari PPGLHK ke Komunitas Sahabat Moringa dan Komunitas Sadar Lingkungan

Penambahan Aktifitas Lingkungan

1. Bank Sampah Kencana Berseri membangun infrastruktur Komposter Bata Terawang tambahan untuk mengolah sampah daun kering di komplek perumahan yang sebelumnya diserahkan kepada petugas untuk dibakar, sehingga hasil panen kompos meningkat

2. Kelompok Tani Bina Karya Sarana RW 05 menambah aktifitas penanaman melon, anggur.

Penambahan Komposter Bata Terawang oleh komunitas

Aktifitas bimtek terkait urban farming melalui penanaman melon dan anggur

Peningkatan Kapasitas Kader

Kader dari **Komunitas Titah Darling Indonesia** meningkat kapasitasnya sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan Pertikawan untuk menyebarluaskan informasi tentang isu perubahan iklim dan pembentukan Kampung Iklim.

Kak Hadi dari Komunitas Titah Darling menjadi narasumber dalam acara Perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti (Pertikawan) yang diselenggarakan KLHK

Kelompok Tani Bina Karya Sarana RW 01 Rawa Badak Utara diliput oleh Media Elektronik Program acara Bumiku Satu DAAI TV

SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif LHK

Mendukung arah kebijakan Menteri LHK pada Permen LHK No. 8 Tahun 2022 Tentang Perintisan Pengelolaan Generasi Lingkungan yang dititikberatkan dalam pengembangan UMKM bidang LHK, Badan P2SDM menyelenggarakan Bimtek dan pendampingan wirausaha kreatif lingkungan hidup dan kehutanan. Bimtek ini dilaksanakan oleh Pusat PGLHK (450 orang peserta) dan 7 BPLHK (212 orang peserta) dengan jumlah 662 orang peserta.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pengurangan timbulan sampah melalui peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dapat memberikan keuntungan baik dari sisi lingkungan, edukasi dan sosial serta ekonomi. Selanjutnya, peserta diharapkan dapat menyebarkan ilmunya ke masyarakat sekitar.

Jenis bimtek antara lain Pengelolaan Sampah untuk Budidaya Magot BSF, Pengelolaan Eco Edu Wisata di kawasan Hutan dan sekitarnya, Pemanfaatan Maggot BSF Menuju Pakan Mandiri, Pembuatan Pupuk Bokashi, Pengelolaan Bank Sampah, dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.

Dampak dari kegiatan ini dengan meningkatnya jumlah warga dalam memilah dan mengolah sampah; meningkatnya peran dan partisipasi aktif warga dalam pengelolaan lingkungan menjadi sentra edukasi pengolahan sampah berbasis desa dan peningkatan pendapatan dari budidaya magot serta objek wisata dengan pendapatan rata rata2 5.690.833/bulan sedangkan untuk maggot sebagaimana gambar dibawah ini

Efektivitas

Capaian Kinerja Tahun 2023 sama dibandingkan tahun 2022 yaitu 100% sehingga dikategorikan efektif dengan nilai sebesar 1,00. Bercermin dari capain Renstra yang masih rendah, pada tahun 2024 Badan P2SDM merencanakan peningkatan target kinerja secara signifikan yaitu sebanyak 3.368 Lembaga dengan melakukan inovasi pelaksanaan kegiatan pembinaan secara hybrid dengan jumlah peserta yang lebih banyak sehingga dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien.

Efisiensi

Presentase penggunaan sumberdaya (anggaran) sebesar 99,99% dibandingkan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 100% sehingga menghasilkan nilai efisiensi sebesar 0,99 dengan kategori efisien. Secara nyata, Badan P2SDM melakukan Upaya-Upaya efisiensi dalam pembinaan lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup seperti pelaksanaan bimbingan teknis secara online.

Ouput

Terlaksanya pembinaan sebanyak 247 Lembaga yang terdiri dari 230 lembaga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup serta 17 lembaga masyarakat/komunitas yang melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup

Outcome

Terdapat sekolah yang potensial mendapatkan predikat sebagai CSAM dan CSAN berdasarkan dokumentasi kinerja PBLHS yang telah dilakukan. Dampak dari *outcome* tersebut terwujudnya peningkatan pemahaman dan terjadinya perubahan sikap/perilaku peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah serta pelaksanaan gerakan aksi oleh lembaga/komunitas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta meningkatnya warga sekolah yang menerapkan perilaku ramah lingkungan, pengurangan sampah, penghematan air, penghematan listrik, penanaman pohon, sampah yang dihasilkan sekolah dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi, dll

Wakili Indonesia, SMA N 1 Ajibarang raih penghargaan ASEAN Eco-School 2023

SMA Negeri 1 Ajibarang merupakan sekolah yang konsisten menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Setelah menerima penghargaan Adiwiyata Mandiri pada Tahun 2018, kali ini sekolah tersebut mewakili Indonesia untuk meraih penghargaan ASEAN Eco-School 2023 di Vientiane, Laos.

Dengan mengembangkan pembelajaran berbasis lingkungan, Sekolah membentuk Organisasi Pecinta Lingkungan yang didalamnya terdapat kader Adiwiyata. Kader Adiwiyata ini membawahi dalam berbagai bidang diantaranya adalah : Kader Kebersihan, Kader Pengelolaan Sampah, Kader Penghijauan, Kader Konservasi Air, Kader Konservasi Energi, Kader Inovasi, Kader Kerjasama Eksternal, dan Humas. Masing-masing bidang didampingi oleh pembimbing dari Tim Adiwiyata. Kader adiwiyata ini akan bisa menciptakan Sekolah Berbudaya Lingkungan dan hal ini merupakan pengelolaan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang dilandasi oleh kesadaran dan pemahaman atas kondisi lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar saat ini sebagai satu unit lingkungan terkecil, dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya di sekolah.

Semua itu tidak lepas dari kerja keras dan kerjasama dari seluruh warga Sekolah, wali siswa dan komite serta pihak-pihak yang telah bekerja sama dalam semua penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan peran lingkungan sekitar.

Penerapan perilaku ramah lingkungan telah diwujudkan nyata baik dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan LH dengan membuat inovasi ramah lingkungan sebagai media pembelajaran dan praktek baik bagi pengelolaan lingkungan hidup, seperti pemanfaatan angin sebagai penggerak Kincir air untuk media konservasi air, pemanfaatan teknologi penampungan air hujan untuk media tanam dan penyiraman. Tidak hanya itu, perilaku baik yang senantiasa dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan merupakan kunci kesuksesan pengelolaan perilaku ramah lingkungan di sekolah

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

1. Kebijakan pimpinan Badan P2SDM dan Satker yang responsif, akomodatif dan adaptif dalam merespon situasi sesuai dengan kebutuhan seperti pembinaan yang dilakukan secara *online* dan *offline* dapat menjangkau lembaga/komunitas yang lebih banyak dan luas
2. Adanya pembinaan secara masif dan berkelanjutan serta koordinasi dengan Dinas LHK Provinsi/kabupaten/kota dalam mengawal penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
3. Antusias lembaga/komunitas untuk mengikuti pembinaan serta pendampingan
4. Koordinasi yang terjalin dengan baik dan berkelanjutan dengan lembaga/komunitas selama pembinaan sejak tahap perencanaan sampai dengan evaluasi

Kendala Pelaksanaan Kegiatan

1. Sekolah belum sepenuhnya memahami pendokumentasian bukti hasil pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagai dokumen penilaian Adiwiyata.
2. Terdapat perbedaan persepsi antara peserta dan tim pendamping dalam melakukan perencanaan aksi
3. Sulitnya melakukan sinkronisasi jadwal pendampingan serta pemantauan Gerakan PBLHS antara pendamping dengan sekolah
4. Jumlah sekolah adiwiyata yang belum merata dalam melakukan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah

Upaya Tindak Lanjut

1. Perlu ada pembinaan yang lebih intensif dan interaktif mengenai Gerakan PBLHS ke Dinas LHK, Dinas Pendidikan, dan Kanwil Kemenag Provinsi, kabupaten/kota dan sekolah serta meningkatkan keterlibatan Tim Adiwiyata Sekolah dampingan, secara langsung minimal 1 kali
2. Perlu dilakukan koordinasi dengan Dinas LHK setempat untuk dapat memfasilitasi pembinaan Gerakan PBLHS secara offline
3. Perlu meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi melalui media tulisan, visual, materi paparan, booklet/brosur, website, dll dalam rangka meningkatkan persepsi atau mendukung tim pembina maupun pendamping dalam melakukan pembinaan/pendampingan ke sekolah dan/atau komunitas/lembaga masyarakat
4. Percepatan sekolah adiwiyata dengan penjenjangan pengembangan jejaring kerja serta pemutahiran sistem informasi

Indikator Kinerja Program 7

Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Target	78,00 Poin
Capaian	76,21 Poin
% Capaian	97,71%
Peningkatan Kinerja (YoY)	2,8 %
Capaian Terhadap Renstra 2020-2024	95,26%

"kegiatan bimbingan teknis perencanaan penganggaran, penyusunan RKA KL dan pengelolaan kinerja untuk meningkatkan pemahaman terkait SAKIP"

SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan meningkatkan kualitas layanan publik, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu aspek kunci dalam agenda Reformasi Birokrasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) merupakan serangkaian kegiatan, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai penetapan tujuan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja. Ini dilakukan sebagai upaya pertanggungjawaban dan untuk terus meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi terhadap SAKIP dilakukan secara tahunan guna mengukur sejauh mana penerapan setiap komponen SAKIP. Pada tahun 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 sebagai panduan untuk evaluasi SAKIP. Dalam peraturan tersebut, komponen yang dinilai dalam evaluasi SAKIP mencakup Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%).

Sejalan dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan P2SDM Tahun 2023, Badan P2SDM berkomitmen untuk mencapai nilai SAKIP dengan target sebesar 76 Poin. Dengan demikian, Badan P2SDM senantiasa terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik melalui implementasi SAKIP yang efektif.

Pelaksanaan bimbingan rapat evaluasi triwulan IV lingkup Badan P2SDM

Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

valuasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Badan P2SDM dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK guna mengukur sejauh mana efektivitas implementasi SAKIP tersebut. Hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023, sebagaimana disampaikan melalui Surat Pengantar Inspektorat Jenderal KLHK Nomor SP.107/ITJEN/ITWIL.2/RHS/WAS.3/5/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Laporan hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022 pada Badan P2SDM, menunjukkan bahwa nilai SAKIP yang diperoleh mencapai 76,21 poin dari target pada perjanjian kinerja sebesar 76 poin (97,71%), dengan kategori BB (sangat baik).

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, nilai SAKIP pada Tahun 2023 meningkat sebesar 4,46 Poin. Peningkatan ini didukung oleh telah ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK pada evaluasi SAKIP tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 (80 Poin), maka capaian sampai saat ini sebesar 95,26%. Badan P2SDM senantiasa berupaya meningkatkan pengelolaan SAKIP lingkup Badan P2SDM kedepan. Progres pencapaian SAKIP Badan P2SDM dari tahun ke tahun selama pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 sebagaimana gambar berikut.

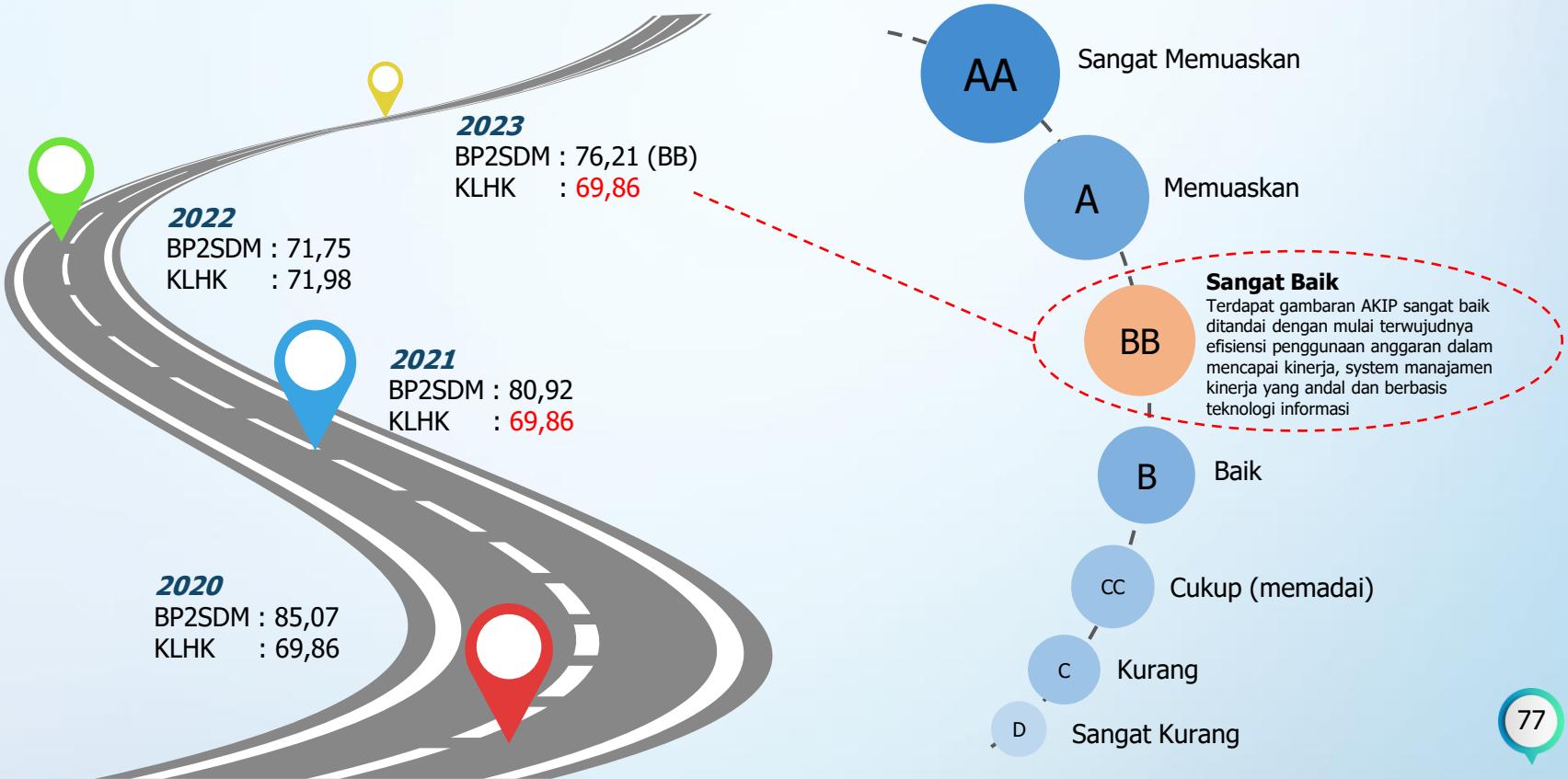

Penilaian setiap Komponen SAKIP

Rincian Penilaian SAKIP Badan P2SDM Tahun 2023

Komponen	Bobot	Nilai	%
Perencanaan Kinerja	30	23,38	77,93%
Pengukuran Kinerja	30	22,39	74,63%
Pelaporan Kinerja	15	12,44	82,93%
Evaluasi Internal	25	18,00	72,00%
Total		**76,21**	Poin

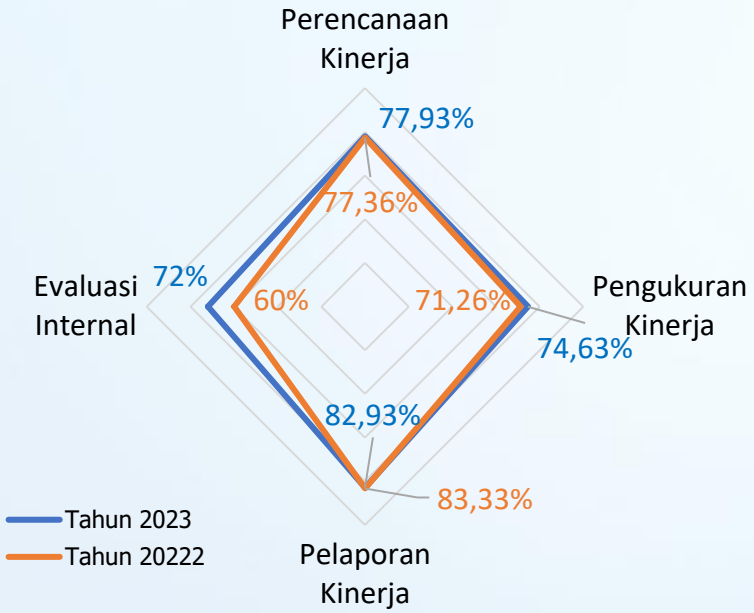

Berdasarkan evaluasi pada setiap komponen, komponen perencanaan kinerja memperoleh nilai 23,38 poin dari bobot 30 poin (77,93%), meningkat secara presentase sebesar 0,57%. Komponen pengukuran kinerja memperoleh nilai 22,39 Poin dari target 30 poin (74,63%), meningkat secara presentase sebesar 3,37%, hal ini didukung dengan telah disusunnya pedoman pengukuran kinerja lingkup Badan P2SDM periode Renstra 2020-2024. Komponen pelaporan kinerja memproleh nilai 12,44 poin dari target 15 poin (82,93%), menurun secara presentase sebesar 0,4%, hal ini disebabkan karena terdapat kelemahan pada pelaporan kinerja Satker Pusat Diklat SDM LHK yang tidak membandingkan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya. Komponen evaluasi internal memperoleh nilai sebesar 18 poin dari target 25 poin (72%), meningkat secara presentase sebesar 12%.

Jika merujuk hasil dokumen evaluasi SAKIP, Komponen evaluasi internal menjadi komponen dengan presentase peningkatan capaian tertinggi. Hal ini disebabkan karena telah disusunnya pedoman evaluasi implementasi SAKIP lingkup Badan P2SDM serta telah diterapkanya penilaian SAKIP Mandiri oleh Badan P2SDM serta seluruh Satker lingkup Badan P2SDM menggunakan aplikasi eSAKIP KLHK.

Hasil Evaluasi SAKIP Mandiri Badan P2SDM

Sesuai amanat pada Keputusan Menteri LHK Nomor 975 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian LHK, pada Bulan September Tahun 2023, seluruh Satker lingkup Badan P2SDM melaksanakan evaluasi SAKIP Mandiri menggunakan aplikasi eSAKIP KLHK. Selanjutnya Badan P2SDM membentuk tim sejumlah 8 orang untuk melakukan penjaminan mutu terhadap evaluasi SAKIP Satker yang hasilnya telah disampaikan melalui surat Kepala Badan P2SDM nomor S.147/P2SDM/SET.11/REN.2/9/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Hasil Penjaminan Mutu Penilaian SAKIP Satker Lingkup Badan P2SDM Tahun 2023. Adapun hasil penjaminan mutu evaluasi SAKIP Lingkup Badan P2SDM sebagai berikut

No	Satker	Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (25%)	Total (100%)	Predikat
1	Sekretariat BP2SDM	26,18	25,32	11,85	20,38	83,73	Memuaskan (A)
2	Pusat Penyuluhan	26,08	23,80	11,20	19,95	81,03	Memuaskan (A)
3	Pusat RenbangSDM	26,16	24,67	11,11	19,84	81,78	Memuaskan (A)
4	Pusat DiklatSDM LHK	25,79	23,84	10,68	19,50	79,81	Sangat Baik (BB)
5	Pusat PGLHK	26,63	24,15	12,05	19,92	82,75	Memuaskan (A)
6	BPLHK Bogor	24,24	25,25	8,52	18,35	76,36	Sangat Baik (BB)
7	BPLHK PematangSiantar	23,00	23,34	8,20	18,17	72,71	Sangat Baik (BB)
8	BPLHK Samarinda	24,07	22,65	6,77	18,10	71,59	Sangat Baik (BB)
9	BPLHK Makassar	25,18	23,73	9,38	17,45	75,74	Sangat Baik (BB)
10	BPLHK Pekanbaru	26,33	25,56	10,44	19,03	81,36	Memuaskan (A)
11	BPLHK Kadipaten	26,10	25,42	11,68	19,34	82,54	Memuaskan (A)
12	BPLHK Kupang	25,58	24,66	11,29	19,04	80,57	Memuaskan (A)
13	SMKK N Manokwari	25,37	23,00	10,07	19,53	77,97	Sangat Baik (BB)
14	SMKK N Kadipaten	26,24	23,81	8,21	18,69	76,95	Sangat Baik (BB)
15	SMKK N Makassar	26,08	23,73	7,19	18,69	75,69	Sangat Baik (BB)
16	SMKK N Samarinda	22,46	23,25	9,11	19,18	74,00	Sangat Baik (BB)
17	SMKK N Pekanbaru	25,17	23,46	10,90	19,78	79,31	Sangat Baik (BB)
	Rata-Rata	25,33	24,10	9,92	19,11	78,46	Sangat Baik (BB)

Selain menetapkan hasil penjaminan mutu evaluasi SAKIP Satker, disampaikan juga kelemahan umum dan rekomendasi secara umum terhadap implementasi SAKIP Satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2023 (Selengkapnya pada lampiran 10). Selanjutnya Biro Perencanaan Melakukan penjaminan mutu terhadap hasil evaluasi SAKIP Satker lingkup Badan P2SDM dan Badan P2SDM melalui surat Sekretaris Jenderal KLHK Nomor S.1358/SETJEN/ROCAN/REN.2/12/2023. berdasarkan hasil tersebut, tidak terdapat perubahan nilai SAKIP Satker lingkup Badan P2SDM, sedangkan nilai SAKIP Badan P2SDM sebesar 87,45 Poin (peringkat 3 di KLHK).

Benchmarking Penilaian SAKIP

Benchmarking kinerja ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dan memberikan gambaran pengelolaan kinerja termasuk Indikator Kinerja pada Instansi lain sehingga dapat memberikan opsi untuk mengadopsi strategi yang lebih efektif untuk peningkatan Nilai SAKIP selanjutnya. Sekretariat Badan P2SDM melaksanakan benchmarking Capaian Nilai SAKIP dengan Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pengelolan Hutan Lestari. Hasil perbandingan Nilai SAKIP sebagai berikut :

Sebagai pembanding, unit Eselon I yang dipilih yaitu Inspektorat Jenderal KLHK sebagai unit Eslon I dengan capaian SAKIP tertinggi sebesar 82,23 poin dan Ditjen PHL dengan capaian sebesar 78,62 poin. Adapun nilai pada masing-masing komponen sebagai berikut:

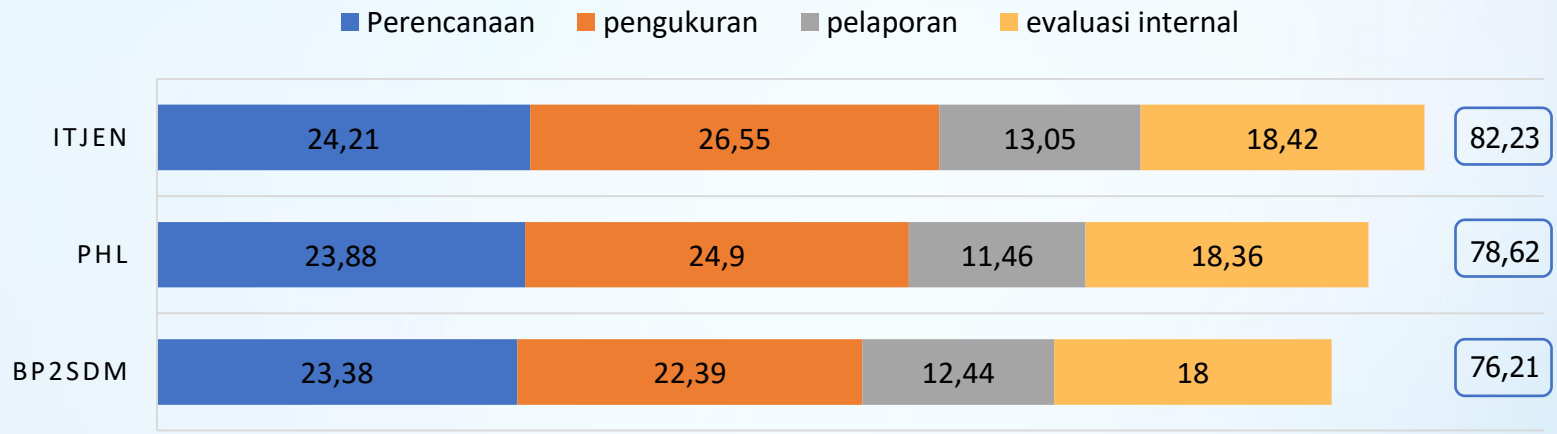

Dari perbandingan tersebut, Badan P2SDM perlu untuk menerapkan strategi amati, tiru dan modifikasi (ATM) terhadap pelaksanaan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pengelolan Hutan Lestari dengan melihat dan mempelajari area perubahan yang dilakukan intervensi beserta langkah-langkah perbaikan yang diterapkan. Hal-hal baru yang diperoleh dari hasil benchmarking kemudian dapat disesuaikan dengan kondisi internal Badan P2SDM untuk kemudian dituangkan dalam langkah-langkah konkrit dengan pembagian tugas yang jelas untuk meningkatkan nilai SAKIP.

Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja, presetase capaian kinerja pada Tahun 2023 meningkat 2,8% dibandingkan tahun 2022 sehingga menghasilkan nilai efektivitas sebesar 1,03 dengan kategori Efektif. Beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan P2SDM untuk peningkatan kinerja pengelolaan SAKIP kedepannya yaitu :

1. Pada penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 perlu Indikator kinerja yang konsisten sehingga penentuan IKP perlu lebih dimatangkan dengan memperhatikan kriteria SMART
2. Menentukan target kinerja sesuai dengan base line penganggaran tahun 2023 sehingga tidak meleset jauh dari yang ditargetkan
3. Memastikan Kembali capaian-capaian yang diinput pada LKj Satker sesuai dengan kesepakatan hasil pengukuran kinerja
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja melalui dialog kinerja secara berkala
5. Memastikan kembali poin" yang perlu disajikan pada dokumen SAKIP (Renstra, Renja, Laporan Kinerja) Satker telah sesuai standar yang digunakan di lingkup Badan P2SDM.
6. Memastikan Badan P2SDM dan Satker dibawahnya menerapkan Keputusan Menteri LHK nomor 975 Tahun 2023

Efisiensi

Presentase penggunaan sumberdaya (anggaran) sebesar 99,15% dibandingkan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 97,71% sehingga menghasilkan nilai efisiensi sebesar 1,01 dengan kategori kurang efisien. Secara nyata, Badan P2SDM melakukan upaya-upaya efisiensi dalam pengelolaan SAKIP seperti pelaksanaan peningkatan kapasitas penyusun LKj melalui daring (*zoom meeting*), pelaksanaan rapat-rapat monitoring kinerja secara *hybrid* dengan seluruh Satker lingkup Badan P2SDM, dll

Ouput

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai 76,21 Poin

Outcome

Badan P2SDM dapat mempertanggungjawabkan dan menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi ke arah tata kelola pemerintahan yang baik

Pelaksanan Rapat Evaluasi Triwulan II Badan P2SDM

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

1. Komitmen yang kuat dalam menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP dari Inspektorat Jenderal KLHK.
2. Telah terbitnya Keputusan Menteri LHK nomor 975 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi lingkup KLHK yang dapat memberikan pedoman dalam pengelolaan SAKIP.
3. Bimbingan dan asistensi secara intensif terkait peningkatan akuntabilitas seluruh Satker lingkup Badan P2SDM
4. Koordinasi yang baik dengan Biro Perencanaan selaku pengampu akuntabilitas kinerja lingkup Kementerian LHK.
5. Pendampingan dari tim inspektorat jenderal KLHK dalam meningkatkan pengelolaan SAKIP di Badan P2SDM.
6. Penggunaan Aplikasi eSAKIP KLHK oleh seluruh Satker lingkup Badan P2SDM dalam pengumpulan data kinerja serta evaluasi SAKIP Mandiri

Kendala Pelaksanaan Kegiatan

1. Target-target kinerja tahunan yang ada di Badan P2SDM tidak dapat terakomodir sesuai dengan target kinerja pada Renstra karena keterbatasan alokasi anggaran yang diterima.
2. Masih terdapat beberapa Laporan Kinerja Satker lingkup Badan P2SDM yang belum memberikan informasi sesuai dengan standar untuk evaluasi SAKIP.

Upaya Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target-target kinerja Renstra tahun 2020-2024 melalui mekanisme Kerjasama dengan eselon I teknis maupun instansi daerah
2. Telah disosialisasikannya standar penyusunan Laporan Kinerja Satker lingkup Badan P2SDM pada seluruh Satker lingkup Badan P2SDM dan asistensi secara intensif untuk penyusunan Laporan Kinerja pada beberapa Satker.

REALISASI ANGGARAN

Trend Realisasi

Berdasarkan aplikasi OMSPAN (perekaman tanggal 10 Januari 2024), pada Tahun 2023 Badan P2SDM dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp301.431.568.051,00 (98,76%). Presentase realisasi anggaran Badan P2SDM bulan Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar penurunan 0,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyerapan anggaran tidak dapat maksimal karena:

1. terdapat pengalihan anggaran belanja pegawai sebesar 1 Milyar dari BSI pada minggu ke 3 Bulan Desember yang tidak dapat direalisasikan karena kondisi belanja pegawai Badan P2SDM sebelumnya masih berlebih sebesar 300 juta.
2. Terdapat sisa belanja modal Pembangunan kampus II SMK Kehutanan Negeri Manokwari sebesar 2,1 Milyar yang akan diluncurkan pada tahun 2024.

98,76%

Realisasi Anggaran s.d Desember 2023

0,76%

Dibandingkan dengan bulan yang sama pada periode tahun 2022

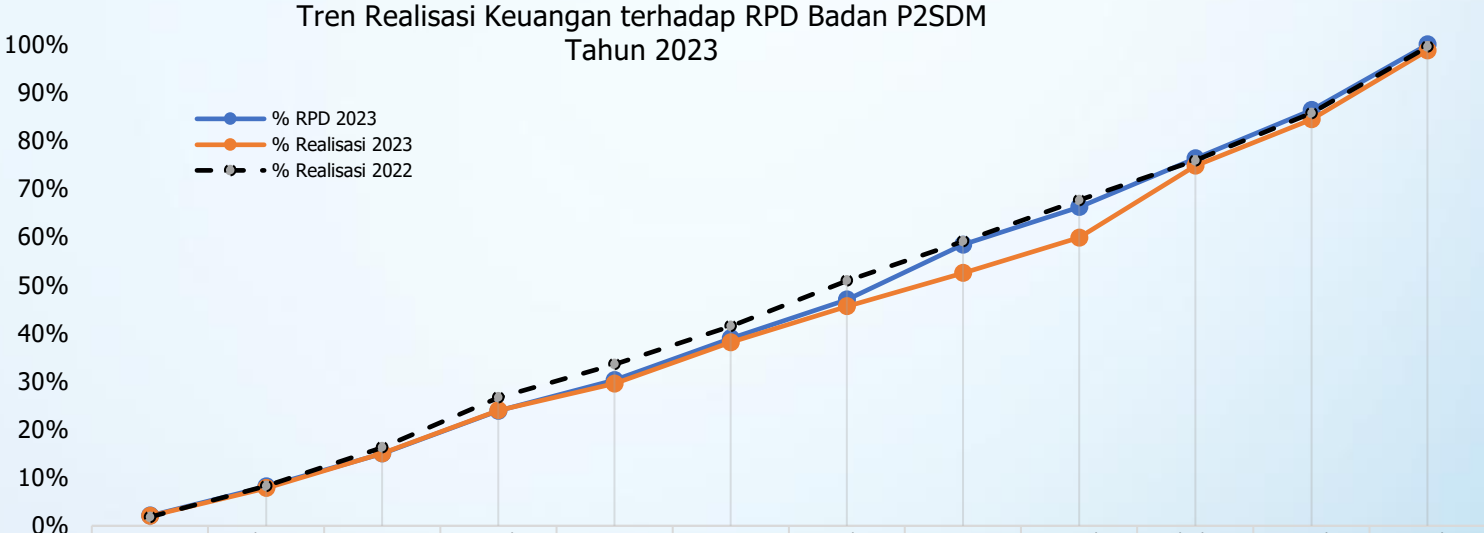

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
% RPD 2023	2,10%	8,15%	14,99%	23,87%	30,27%	38,95%	47,00%	58,38%	66,21%	76,30%	86,35%	100,00%
% Realisasi 2023	2,01%	7,83%	15,04%	23,98%	29,52%	38,12%	45,58%	52,52%	59,85%	74,79%	84,43%	98,76%
% Realisasi 2022	1,80%	8,24%	16,26%	26,64%	33,56%	41,45%	50,89%	59,07%	67,64%	75,88%	85,72%	99,51%

Gambar Perbandingan Trend Realisasi Anggaran Tahun 2022-2023

Per Jenis Belanja

Proporsi anggaran terbesar Badan P2SDM Tahun 2023 berdasarkan jenis belanja yaitu belanja barang sebesar 159,12 milyar kemudian belanja pegawai sebesar 101,75 milyar dan belanja modal sebesar 44,35 milyar.

Hingga bulan Desember 2023, serapan anggaran belanja pegawai mencapai 98,64%, belanja barang sebesar 99,84% dan belanja modal 95,12%. Hal ini menunjukan bahwa Badan P2SDM dapat merealisasikan seluruh anggaran secara optimal pada setiap jenis belanja.

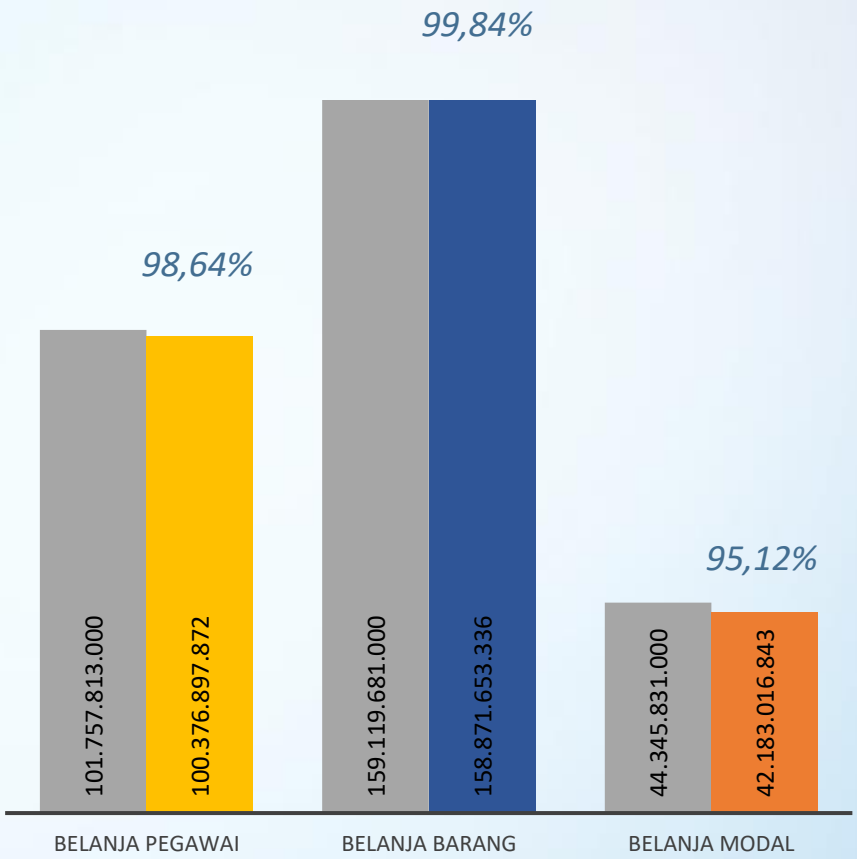

Data berdasarkan aplikasi SPAN tanggal 10 Januari 2024

Per Sumber Dana

Berdasarkan Sumber Dana, Pagu anggaran terbesar Badan P2SDM terdapat pada Rupiah murni sebesar 82,59%, selanjutnya PNBP sebesar 8,57%, dan SBSN sebesar 8,84%.

Progres realisasi anggaran s.d Bulan Desember tahun 2023 berdasarkan sumber dana disajikan sebagaimana gambar berikut

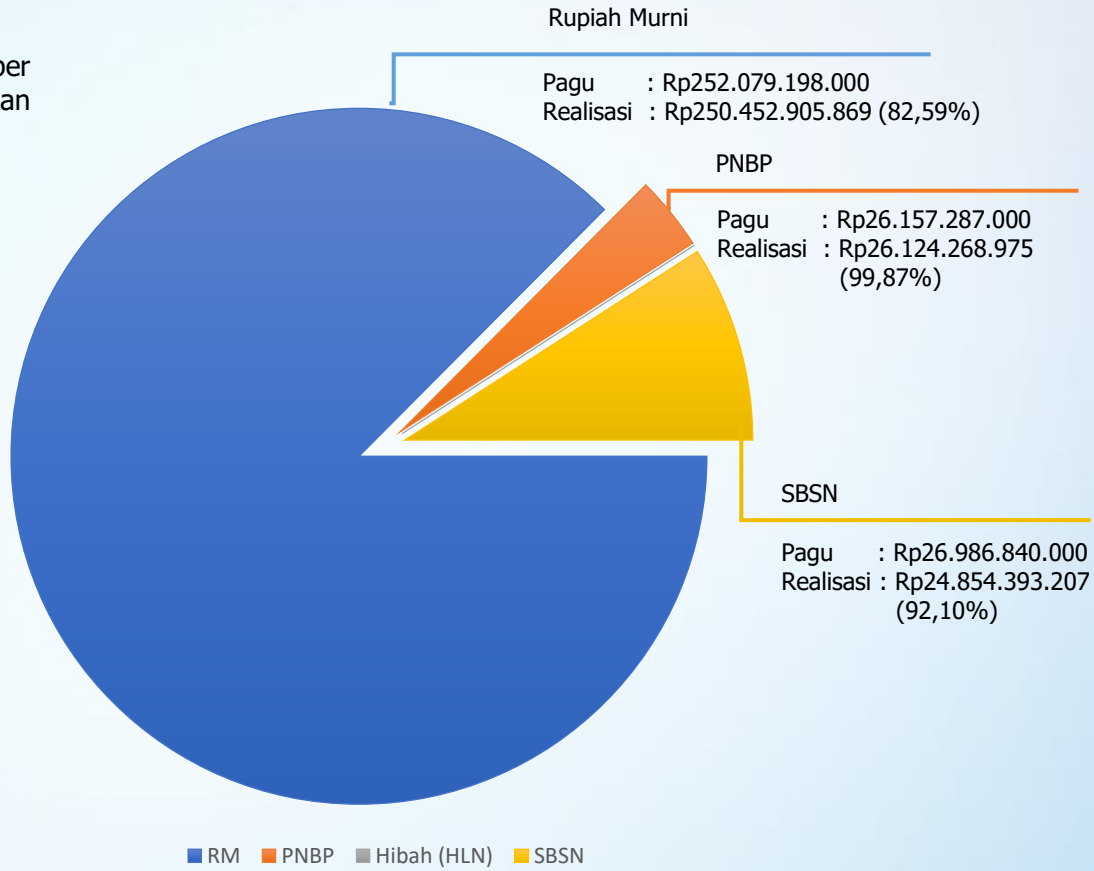

Data berdasarkan aplikasi SPAN tanggal 10 Januari 2024

Per Satker

Realisasi anggaran Badan P2SDM sangat baik karena telah didukung oleh realisasi anggaran Satker lingkup Badan P2SDM sudah sangat baik dengan rentang realisasi terendah sebesar 94,56% pada Satker SMKKN Manokwari dan realisasi tertinggi pada satker BPLHK Samarinda, BPLHK Kadipaten, Pusat PGLHK dan BPLHK Bogor sebesar 100%. Selengkapnya rincian anggaran per Satker lingkup Badan P2SDM sebagaimana tabel berikut

Tabel Realisasi Anggaran Per Satker Lingkup Badan P2SDM Tahun 2023

No	Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
	Badan P2SDM	305.223.325.000	301.431.568.051	98,76	3.791.756.949
1	Kantor Pusat Badan P2SDM	48.075.063.000	46.943.338.686	97,65	1.131.724.314
a	Sekretariat Badan	26.274.064.000	25.147.800.402	95,71	1.126.263.598
b	Pusat Penyuluhan	16.644.060.000	16.641.306.997	99,98	2.753.003
c	Pusrenbang SDM	5.156.939.000	5.154.231.287	99,95	2.707.713
4	Pusdiklat SDM LHK	42.451.698.000	42.375.812.774	99,82	75.885.226
5	Pusat PGLHK	12.700.804.000	12.700.426.975	100,00	377.025
6	BDLHK Bogor	12.121.783.000	12.121.377.734	100,00	405.266
7	BDLHK Pematangsiantar	10.439.257.000	10.431.616.872	99,93	7.640.128
8	BDLHK Samarinda	9.990.965.000	9.990.795.535	100,00	169.465
9	BDLHK Makassar	10.805.424.000	10.803.689.056	99,98	1.734.944
10	BDLHK Pekanbaru	12.142.816.000	12.071.282.511	99,41	71.533.489
11	BDLHK Kadipaten	12.257.385.000	12.257.063.139	100,00	321.861
12	BDLHK Kupang	10.019.367.000	10.018.502.503	99,99	864.497
13	SMKK N Manokwari	42.281.736.000	39.982.887.762	94,56	2.298.848.238
14	SMKK N Kadipaten	20.797.707.000	20.726.822.747	99,66	70.884.253
15	SMKK N Makassar	23.199.092.000	23.129.534.173	99,70	69.557.827
16	SMKK N Samarinda	18.853.169.000	18.851.576.035	99,99	1.592.965
17	SMKK N Pekanbaru	19.087.059.000	19.026.841.549	99,68	60.217.451

Data berdasarkan aplikasi SPAN tanggal 10 Januari 2024

Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Per Satker

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah gabungan dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada aplikasi SMART dengan bobot 50% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi OMSPAN dengan bobot 50%. Sampai dengan Bulan Desember 2023, Badan P2SDM memperoleh NKA sebesar 92,94 dengan nilai tertinggi terdapat pada Pusat PGLHK sebesar 94,28.

Urutan berdasarkan
NKA tertinggi

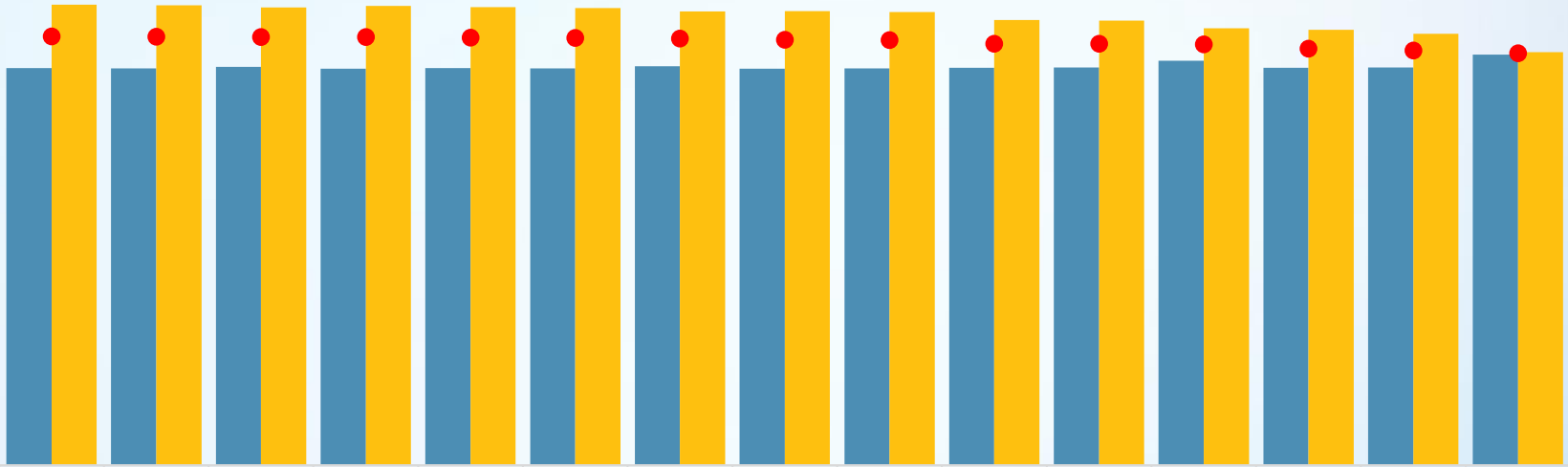

	BPLHK Bogor	Pusat PGLHK	BPLHK Pekanbaru	BPLHK Kupang	BPLHK Samarinda	BPLHK PematangSiantar	BPLHK Makassar	BPLHK Kadipaten	SMKK N Samarinda	SMKK N Pekanbaru	SMKK N Kadipaten	Kantor Pusat Badan P2SDM	Pusdiklat SDM LHK	SMKK N Makassar	SMKK N Manokwari
EKA (50%)	85,78	85,7	86,04	85,63	85,73	85,72	86,18	85,62	85,7	85,84	85,89	87,36	85,85	85,88	88,64
IKPA (50%)	99,43	99,32	98,84	99,21	98,95	98,71	98,01	98,07	97,88	96,13	96,03	94,34	94,05	93,18	89,19
NKA	92,61	92,51	92,44	92,42	92,34	92,22	92,10	91,85	91,79	90,99	90,96	90,85	89,95	89,53	88,92

NKA
BP2SDM : 93,15

=

EKA (50%)
BP2SDM : 90,54

+

IKPA (50%)
BP2SDM : 93,15

Data berdasarkan aplikasi SMART dan OMSPAN tanggal 10 Januari 2024

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

SMART-DJA s.d Desember 2023

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Badan P2SDM s.d Bulan Desember Tahun 2023 berdasarkan aplikasi SMART sebesar 90,54 poin (Sangat Baik).

Satker dengan EKA tertinggi yaitu SMKKN Manokwari sebesar 88,64 sedangkan satker dengan EKA terendah yaitu BPLHK Kadipaten sebesar 85,62. Rincian nilai EKA pada masing-masing Satker sebagaimana berikut.

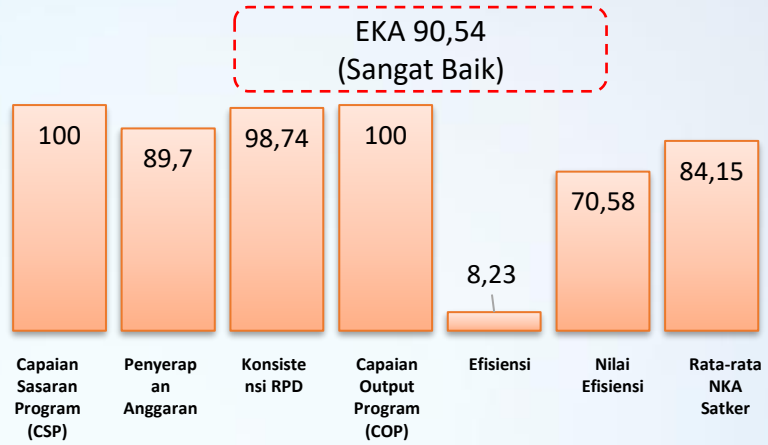

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	SMKK N Manokwari	88,64	94,56	97,72	100	5,44	63,59
2	Kantor Pusat Badan P2SDM	87,36	97,65	99,77	100	2,7	56,74
3	BPLHK Makassar	86,18	99,98	99,98	100	0,81	52,02
4	BPLHK Pekanbaru	86,04	99,41	99,9	100	0,59	51,47
5	SMKK N Kadipaten	85,89	99,66	99,88	100	0,34	50,85
6	SMKK N Makassar	85,88	99,7	99,98	100	0,3	50,75
7	Pusdiklat SDM LHK	85,85	99,82	99,94	100	0,24	50,61
8	SMKK N Pekanbaru	85,84	99,68	99,69	100	0,32	50,79
9	BPLHK Bogor	85,78	100	99,79	100	0,16	50,4
10	BPLHK Samarinda	85,73	100	99,99	100	0,04	50,1
11	BPLHK PematangSiantar	85,72	99,93	99,87	100	0,07	50,18
12	Pusat PGLHK	85,7	100	99,99	100	0	50,01
13	SMKK N Samarinda	85,7	99,99	100	100	0,01	50,02
14	BPLHK Kupang	85,63	99,99	99,6	100	0,01	50,02
15	BPLHK Kadipaten	85,62	100	99,54	100	0	50,01

Data berdasarkan aplikasi SMART tanggal 10 Januari 2024

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

OMSPAN s.d Desember 2023

Data berdasarkan aplikasi OMSPAN tanggal 10 Januari 2024

Nilai IKPA BP2SDM

95,75 Poin

Indiakator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang diukur berdasaran 8 Indikator.

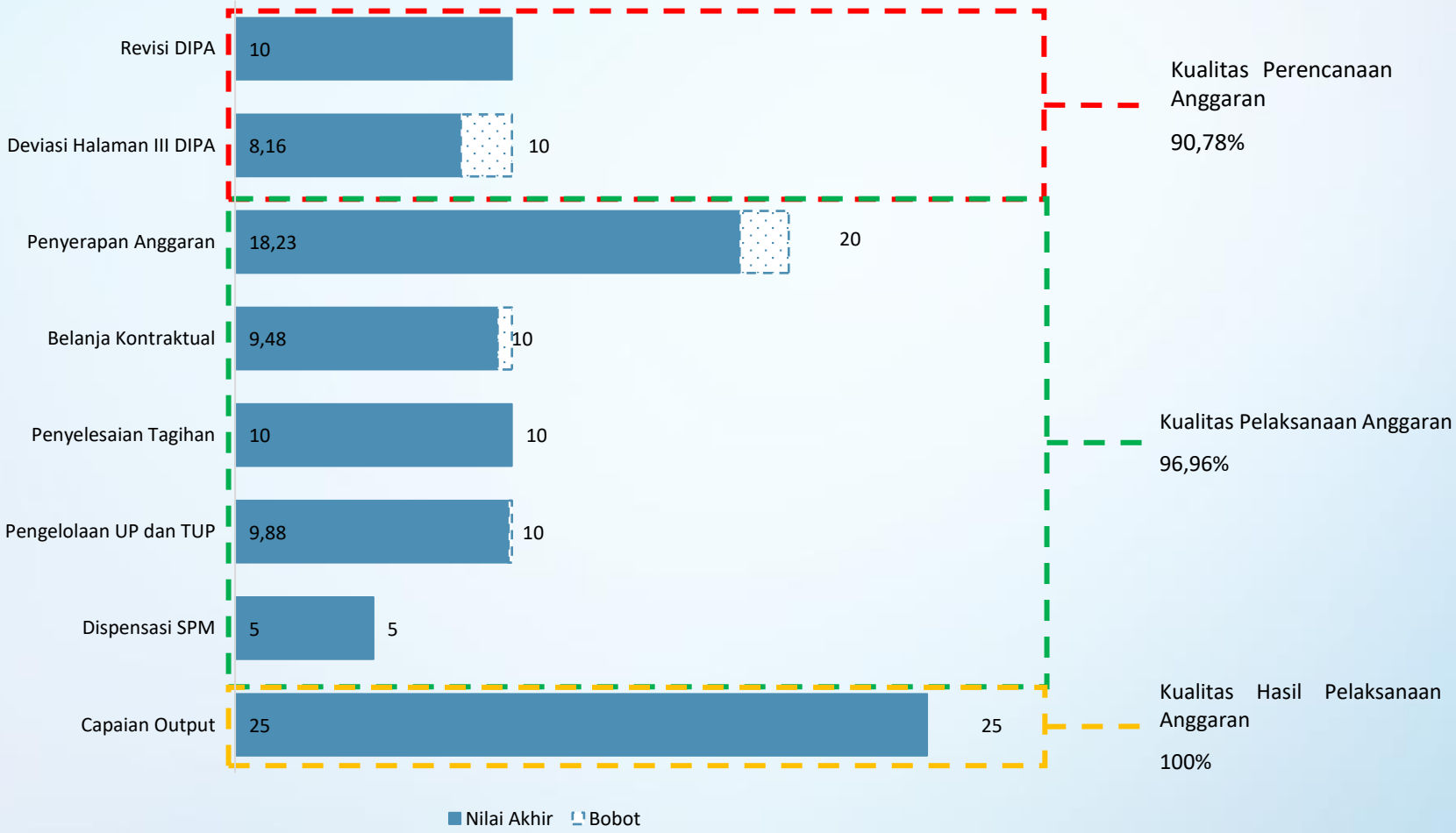

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

OMSPAN s.d Desember 2023

Nilai IKPA Satker paling tinggi pada periode bulan Desember yaitu BPLHK Bogor dengan nilai 99,43
Berdasarkan nilai rata-rata, Deviasi Halaman III DIPA merupakan Indikator yang perlu ditingkatkan

No.	Satuan Kerja	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
1	BPLHK Bogor	100	94,26	100	100	100	100	100	100	99,43	100%	99,43
2	BPLHK Kupang	100	94,42	99,5	100	100	99,82	100	100	99,32	100%	99,32
3	BPLHK Samarinda	100	92,14	100	100	100	99,97	100	100	99,21	100%	99,21
4	Pusat PGLHK	100	92,42	99,87	0	0	99,5	100	99,97	79,16	80%	98,95
5	BPLHK Pekanbaru	100	100	98,82	91	100	99,78	100	100	98,84	100%	98,84
6	BPLHK PematangSiantar	100	87,11	100	100	100	100	100	100	98,71	100%	98,71
7	BPLHK Makassar	100	86,18	100	0	0	98,4	100	100	78,46	80%	98,07
8	BPLHK Kadipaten	100	92,1	98,39	91,43	100	99,83	100	100	98,01	100%	98,01
9	SMKK N Samarinda	100	85,62	98,71	97,43	100	98,36	100	100	97,88	100%	97,88
10	SMKK N Pekanbaru	100	87,99	92,06	93,25	100	95,94	100	100	96,13	100%	96,13
11	SMKK N Kadipaten	100	77,67	92,99	97	100	99,66	100	100	96,03	100%	96,03
12	Pusdiklat SDM LHK	100	78,49	90,01	0	0	96,19	100	100	75,47	80%	94,34
13	Kantor Pusat Badan P2SDM	100	86,53	76,98	100	100	99,97	100	100	94,05	100%	94,05
14	SMKK N Makassar	100	77,66	82,18	91,43	100	98,31	100	100	93,18	100%	93,18
15	SMKK N Manokwari	100	61,65	65,66	100	100	98,97	100	100	89,19	100%	89,19
	Rata-rata	100,00	86,28	93,01	96,80	100,00	98,98	100,00	100,00	92,87		96,76

Data berdasarkan data IKPA pada OMSPAN tanggal 10 Januari 2024

TANTANGAN

1. Adanya kebutuhan pengembangan kompetensi ASN secara terus menerus sesuai peraturan
2. Masih diperlukannya penyiapan SDM baik kualitas dan kuantitas sebagai implementasi UUCK
3. Pemanfaatan manajemen talenta di lingkungan Kementerian LHK masih terbatas
4. Terdapat 21 ribu KTH di Indonesia, 90% nya masih dalam kategori pemula dengan NTE rendah
5. Penguatan portofolio lulusan SMK Kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri sektor LHK
6. Kebutuhan pengembangan generasi lingkungan secara terus menerus dalam mendukug isu lingkungan

RENCANA KEDEPAN

Pengembangan Kompetensi	SMK Kehutanan Negeri	Generasi Muda LHK	Penyuluhan
NSPK Peran Eselon I dalam Pengembangan Kompetensi	Pemagangan/ Pengabdian Lulusan SMKKN di UPT KLHK	Penguatan Kerjasama dengan berbagai pihak dalam Pembinaan Generasi Lingkungan	Pendampingan KTH untuk Peningkatan NTE
MOOC untuk Menjangkau Target Pelatihan Lebih Luas	Integrasi Materi LH dalam Kurikulum SMKKN	Pembinaan SDM LHK dalam mendukung Wirausaha Kreatif bidang LHK	Mengembangkan Pusat - Pusat Pelatihan Swadaya Masyarakat dalam rangka mengembangkan usaha kelompok masyarakat
Penguatan Kerjasama dalam Pengembangan Kompetensi	Penguatan Kerjasama dengan DUDI dan Pengembangan Bursa Kerja		
Optimalisasi Assesment Center untuk Manajemen Talenta KLHK			

PENUTUP

Capaian kinerja Badan P2SDM Tahun 2023 sebesar 109,61% dengan Penggunaan anggaran sebesar 98,76% dari total pagu untuk mencapai kinerja tersebut, yang berarti nilai efisiensi mencapai 0,90 mengindikasikan Badan P2SDM telah optimal dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja sesuai yang telah dikomitmenkan dalam Perjanjian Kinerja. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, terdapat peningkatan kinerja sebesar 8,03% sehingga nilai efektivitas sebesar 1,08.

Memperhatikan ukuran-ukuran di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa Badan P2SDM sebagai salah satu Eselon I pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Secara substantif, Badan P2SDM setiap tahunnya senantiasa berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja, dalam perspektif output dan outcome dalam konteks yang terjadi.

Prinsip *Good Governance*, dalam hal ini akuntabilitas dan transparansi tetap diwujudkan melalui LKj untuk mendapatkan respon dan masukan serta menjadi basis perencanaan selanjutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Revisi Kepala Badan P2SDM dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. A. PALGUNA RUTEKA

Jabatan : KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc	Drs. A. PALGUNA RUTEKA
	NIP. 19650924 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran Program : **Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan**
Indikator Kinerja Program : **Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)**

No.	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
a.	Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	0,3 Triliun Rupiah	0,3 Triliun Rupiah

Sasaran Program : **Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas**
Indikator Kinerja Program : **Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK**

No.	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
b.	Meningkatnya kapasitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	2.940 Orang	6.354 Orang
		Jumlah lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	473 Orang	472 Orang
		Indeks efektifivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	69 Poin	69 Poin
		Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	247 Lembaga	247 Lembaga

Sasaran Program : **Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien**
Indikator Kinerja Program : **Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi**

No.	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
c.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	78 Poin	78 Poin

Catatan:

1. Terdapat perubahan volume target Perjanjian Kinerja pada Badan P2SDM dikarenakan:
   (i) penambahan ABT PNBP lingkup Ditjen PHLHK untuk pelatihan pembentukan Polhut dan PPLH.
   (ii) perubahan kebijakan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan metode MOOC (*Massive Open Online Course*).
   (iii) penambahan anggaran dari Itjen untuk pelatihan terkait pengendalian karhutla bagi Manggala Agni dan MPA.
   (iv) pelaksanaan pelatihan melalui mekanisme kerjasama dengan intervensi anggaran BP2SDM.

2. Terdapat perubahan kebijakan penganggaran yaitu:
   (i) penghapusan pagu blokir *Automatic Adjustment* pada belanja pegawai sebesar Rp2.097.767.000,-
   (ii) penghapusan pagu blokir *Automatic Adjustment* pada non belanja pegawai sebesar Rp10.298.371.000,-
   (iii) mendapatkan ABT PNBP pada Ditjen PHLHK sebesar Rp16.000.000.000,- untuk pelatihan pembentukan Polhut dan PPLH.
   (iv) realokasi anggaran dari Setjen sebesar Rp2.296.180.000,- untuk pelaksanaan orientasi PPPK.
   (v) realokasi anggaran dari Itjen sebesar Rp2.168.333.000,- untuk pelatihan terkait pengendalian karhutla bagi Manggala Agni dan MPA.
   (vi) realokasi anggaran belanja pegawai dari BSI LHK sebesar Rp1.000.000.000,-

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	
		Semula	Menjadi
	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	**122.007.127.000**	**128.075.527.000**
1.	Perencanaan dan Pengembangan SDM		
2.	Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK		
3.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan		
4.	Pengembangan Generasi LHK		
	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**4.038.607.000**	**3.973.107.000**
5.	Peningkatan Penyuluhan		
	Dukungan Manajemen	**170.109.216.000**	**173.174.691.000**
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		
	JUMLAH	**296.154.950.000**	**305.223.325.000**

Jakarta, 27 Desember 2023

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

KEPALA BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. A. PALGUNA RUTEKA
NIP. 19650924 199303 1 001

Lampiran 2. Rincian Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan Per Provinsi

No.	Provinsi	KTH NTE	NTE KTH (Rp.)
1	LAMPUNG	893	234.767.159.636
2	JAWA TIMUR	735	189.007.510.786
3	JAWA BARAT	700	87.175.908.742
4	JAWA TENGAH	464	72.593.745.525
5	NUSA TENGGARA BARAT	74	23.721.420.051
6	SULAWESI SELATAN	152	18.995.345.035
7	BENGKULU	21	13.738.452.000
8	KALIMANTAN TENGAH	45	5.428.360.000
9	SULAWESI UTARA	27	4.570.423.000
10	D.I. YOGYAKARTA	80	4.366.346.420
11	NUSA TENGGARA TIMUR	106	4.288.020.750
12	BANTEN	34	4.233.522.300
13	JAMBI	34	4.192.848.000
14	KALIMANTAN BARAT	19	4.108.974.300
15	SUMATERA UTARA	13	3.047.365.000
16	SUMATERA SELATAN	4	2.307.753.500
17	KALIMANTAN SELATAN	67	1.843.026.569
18	GORONTALO	12	1.647.710.000
19	SULAWESI BARAT	12	1.176.900.000
20	SULAWESI TENGAH	24	1.002.790.000
21	SUMATERA BARAT	57	839.503.000
22	SULAWESI TENGGARA	40	544.659.900
23	ACEH	12	525.993.000
24	KALIMANTAN TIMUR	19	522.130.000
25	MALUKU UTARA	23	461.015.000
26	BALI	9	395.200.000
27	BANGKA BELITUNG	16	382.329.000
28	MALUKU	10	285.661.000
29	RIAU	4	237.905.000
30	PAPUA	4	156.800.009
31	KALIMANTAN UTARA	6	143.100.000
32	DKI JAKARTA	9	71.559.000
	Total	3.725	686.779.436.523

Lampiran 3. Pelatihan SDM Aparatur, Non Aparatur dan Vokasi Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
A	**6745.DCE.001 Pelatihan SDM Aparatur yang ditingkatkan**	**2.552**				
1	Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL Angkatan I Tahun 2023	29	E-learning	14/03/2023 s/d 21/03/2023	PUSDIKLAT	APBN
2	Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL Angkatan II Tahun 2023	29	E-learning	20/03/2023 s/d 03/04/2023	PUSDIKLAT	APBN
3	Pelatihan Dasar-Dasar Amdal Angkatan 3	29	E-learning	09/05/2023 s/d 16/05/2023	PUSDIKLAT	APBN
4	TOT Penyamaan Persepsi Pengampu PKA PKP	38	E-learning	15/05/2023 s/d 27/05/2023	PUSDIKLAT	APBN
5	Pelatihan Training of Trainer (ToT) Subtansi Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Batas Kawasan	40	E-learning	27/02/2023 s/d 03/03/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
6	Dasar-Dasar Amdal APBN + Kerjasama penjaminan mutu dengan PPSDM AP, Kementerian Perhubungan	30	E-learning	27/03/2023 s/d 04/04/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
7	ToT Refreshment Penyamaan Persepsi Pengampu PKA PKP	59	E-learning	22/05/2023 s/d 15/06/2023	PUSDIKLAT	APBN
8	Pelatihan Dasar Amdal Angkatan II (BSI LHK)	28	E-learning	08/08/2023 s/d 15/08/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
9	Pelatihan Dasar Amdal Angkatan III (BSI LHK)	28	E-learning	11/09/2023 s/d 19/09/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
10	MOOC PUG batch 1	80	E-learning	11/09/2023 s/d 15/09/2023	PUSDIKLAT	APBN
11	MOOC PUG batch 2	67	E-learning	25/09/2023 s/d 29/09/2023	PUSDIKLAT	APBN
12	MOOC PUG batch 3	50	E-learning	09/10/2023 s/d 13/10/2023	PUSDIKLAT	APBN
13	MOOC PUG batch 4	48	E-learning	23/10/2023 s/d 27/10/2023	PUSDIKLAT	APBN
14	MOOC PUG batch 5	58	E-learning	06/11/2023 s/d 10/11/2023	PUSDIKLAT	APBN
15	MOOC PUG batch 6	32	E-learning	20/11/2023 s/d 24/11/2023	PUSDIKLAT	APBN
16	Pelatihan dasar AMDAL angkatan I (BSI LHK)	30	Klasikal	19/06/2023 s/d 23/06/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
17	Pembentukan PEH Tingkat Ahli	33	Blanded Learning	05/04/2023 s/d 17/04/2023	PUSDIKLAT	APBN
18	Pembentukan PEDAL	30	Blanded Learning	05/04/2023 s/d 14/04/2023	PUSDIKLAT	APBN
19	Pelatihan Fungsional PEH Terampil	36	Blanded Learning	08/05/2023 s/d 19/05/2023	PUSDIKLAT	APBN
20	Pelatihan Fungsional Pembentukan PPLH	40	Blanded Learning	12/06/2023 s/d 28/06/2023	PUSDIKLAT	APBN
21	Pembentukan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Angkatan 2	30	Blanded Learning	14/06/2023 s/d 21/06/2023	PUSDIKLAT	APBN
22	Pelatihan Dasar-Dasar Penyuluhan bagi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli	29	Blanded Learning	03/07/2023 s/d 22/07/2023	PUSDIKLAT	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
23	Pengendali Dampak Lingkungan Angkatan 3	30	Blanded Learning	04/07/2023 s/d 12/07/2023	PUSDIKLAT	APBN
24	Pelatihan Dasar-Dasar Penyuluhan bagi Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil	30	Blanded Learning	13/07/2023 s/d 02/08/2023	PUSDIKLAT	APBN
25	Pelatihan Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Angkatan II Tahun 2023	38	Blanded Learning	01/08/2023 s/d 16/08/2023	PUSDIKLAT	APBN
26	Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Batasan Kawasan Hutan	37	Blanded Learning	14/03/2023 s/d 23/03/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
27	Pelatihan Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Angkatan III Tahun 2023	39	Blanded Learning	22/08/2023 s/d 06/09/2023	PUSDIKLAT	APBN
28	Pelatihan Penilaian AMDAL dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup	30	Blanded Learning	21/08/2023 s/d 02/09/2023	PUSDIKLAT	APBN
29	Pelatihan Pembentukan PPLH BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	31	Blanded Learning	05/05/2023 s/d 26/05/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
30	Pelatihan Pembentukan Pedal BPSMD Provinsi Jawa Barat	40	Blanded Learning	30/05/2023 s/d 06/06/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
31	Pelatihan fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Angkatan IV Tahun 2023	38	Blanded Learning	12/09/2023 s/d 27/09/2023	PUSDIKLAT	APBN
32	Pelatihan fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Angkatan V Tahun 2023	35	Blanded Learning	12/09/2023 s/d 04/10/2023	PUSDIKLAT	APBN
33	Pelatihan Penilaian AMDAL dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup angkatan II	30	Blanded Learning	25/09/2023 s/d 07/10/2023	PUSDIKLAT	APBN
34	Pelatihan Perlindungan dan Pengamanan Hutan bagi Polisi Kehutanan Angkatan I s/d 10	390	Blanded Learning	19/09/2023 s/d 23/11/2023	PUSDIKLAT	APBN
35	Pelatihan Penilaian Mutu Bibit Tanaman Hutan	30	Blanded Learning	05/10/2023 s/d 11/10/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
36	Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2023	36	Blanded Learning	19/06/2023 s/d 11/10/2023	PUSDIKLAT	APBN
37	Dasar-Dasar Penyuluhan bagi Penyuluh Lingkungan Hidup Angkatan I	30	Blanded Learning	11/10/2023 s/d 03/11/2023	PUSDIKLAT	APBN
38	Dasar-Dasar Penyuluhan bagi Penyuluh Lingkungan Hidup Angkatan II	30	Blanded Learning	11/10/2023 s/d 03/11/2023	PUSDIKLAT	APBN
39	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1	36	Blanded Learning	13/10/2023 s/d 28/10/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
40	Pelatihan Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Angkatan VI Tahun 2023	34	Blanded Learning	20/10/2023 s/d 04/11/2023	PUSDIKLAT	APBN
41	Pelatihan fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Angkatan VII Tahun 2023	30	Blanded Learning	20/10/2023 s/d 08/11/2023	PUSDIKLAT	APBN
42	Pelatihan Penilaian Mutu Bibit Tanaman Hutan angkatan II	30	Blanded Learning	09/11/2023 s/d 16/11/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
43	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	39	Blanded Learning	12/07/2023 s/d 15/11/2023	PUSDIKLAT	APBN
44	Pelatihan Asesmen konflik Tenurial Kawasan hutan tahun 2023	16	Blanded Learning	28/11/2023 s/d 08/12/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
45	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	40	Blanded Learning	02/08/2023 s/d 01/12/2023	PUSDIKLAT	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
46	Pelatihan fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Angkatan IX Tahun 2023	38	Blanded Learning	17/11/2023 s/d 09/12/2023	PUSDIKLAT	APBN
47	Pelatihan fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Angkatan VIII Tahun 2023	41	Blanded Learning	17/11/2023 s/d 13/12/2023	PUSDIKLAT	APBN
48	Pelatihan Pengelolaan Analisis Data dan Pelaporan	30	Blanded Learning	15/06/2023 s/d 21/06/2023	BPLHK BOGOR	APBN
49	Pembuatan Rancangan Agroforestry	30	Klasikal	13/03/2023 s/d 18/03/2023	BPLHK KADIPATEN	APBN
50	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi manggala Agni 3 (Fire Crew 3)	15	Klasikal	29/05/2023 s/d 07/06/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN + Kerjasama
51	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Manggala Agni	40	Klasikal	07/07/2023 s/d 13/07/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN + Kerjasama
52	Dasar-dasar Penyuluhan bagi fungsional penyuluhan	30	Blanded Learning	05/06/2023 s/d 25/06/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN
53	Pelatihan Pengendali Dampak Lingkungan	27	Blanded Learning	08/06/2023 s/d 16/06/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN + Kerjasama
54	Dasar- Dasar Penyuluhan Bagi Fungsional Penyuluh Lingkungan	31	Blanded Learning	12/07/2023 s/d 31/07/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN + Kerjasama
55	Aplikasi GNSS untuk Survei dan Pemetaan	31	Blanded Learning	03/05/2023 s/d 09/05/2023	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
56	Pelatihan Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel	30	Klasikal	23/05/2023 s/d 27/05/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN
57	Pendidikan dan Pelatihan Reguler Kepolisian Khusus Kehutanan APBN + Kerjasama Dishut Prov. Kaltara	33	Klasikal	11/09/2023 s/d 04/11/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
58	Pelatihan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	32	Blanded Learning	07/06/2023 s/d 13/06/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
59	Pelatihan Dasar-dasar Penyuluhan Bagi Fungsional Penyuluh Angkatan 1 APBN + Kerjasama Dishut Prov. Kaltara	26	Blanded Learning	24/07/2023 s/d 10/08/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
60	Pelatihan Dasar-dasar Penyuluhan Bagi Fungsional Penyuluh Angkatan 2 APBN + Kerjasama Dishut Prov. Kaltara	26	Blanded Learning	24/07/2023 s/d 10/08/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
61	Pelatihan Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup APBN + Kerjasama DLH Prov. Kalimantan Tengah	40	Blanded Learning	10/11/2023 s/d 30/11/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
62	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel	30	Blanded Learning	08/03/2023 s/d 16/03/2023	BPLHK KUPANG	APBN
63	FUNGSIONAL PENGENDALI LINGKUNGAN	30	Klasikal	29/05/2023 s/d 02/06/2023	BPLHK MAKASSAR	APBN
B	**6745.SCE.001 Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan**	**2.031**				
1	Pelatihan Dasar-Dasar Amdal	13	E-learning	21/02/2023 s/d 28/02/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
2	Dasar-Dasar Amdal Angkatan 2	30	E-learning	12/07/2023 s/d 20/07/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
3	Pelatihan Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat (Community Patrol)	40	E-learning	09/10/2023 s/d 14/10/2023	PUSDIKLAT	APBN
4	Pelatihan penyusunan rencana kelola perhutanan sosial di kab. Sumba barat	38	Klasikal	16/10/2023 s/d 20/10/2023	PUSDIKLAT	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
5	Bimbingan Teknis Budidaya Maggot BSF	30	Klasikal	20/11/2023 s/d 20/11/2023	PUSDIKLAT	APBN
6	Pelatihan pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot Black Soldier FLy (BSF)	33	Klasikal	18/12/2023 s/d 20/12/2023	PUSDIKLAT	APBN
7	Pelatihan Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial	40	Blanded Learning	22/05/2023 s/d 01/06/2023	PUSDIKLAT	APBN
8	Pelatihan Pembibitan Vegetatif Multi Purpose Tree Species (MPTS) Angkatan I	40	Blanded Learning	05/06/2023 s/d 10/06/2023	PUSDIKLAT	APBN
9	Pelatihan Ganis Perencana Wisata Alam	40	Blanded Learning	06/06/2023 s/d 16/06/2023	PUSDIKLAT	APBN
10	Pelatihan Pembibitan Vegetatif Multi Purpose Tree Species (MPTS) Angkatan 2	40	Blanded Learning	15/06/2023 s/d 21/06/2023	PUSDIKLAT	APBN
11	Pelatihan Calon Auditor VLK Industri	23	Blanded Learning	16/01/2023 s/d 28/01/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
12	Pelatihan Pengarus Utama Gender (PUG) II	21	Blanded Learning	27/01/2023 s/d 31/01/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
13	Pelatihan Calon Auditor VLHH Kayu Industri	32	Blanded Learning	20/02/2023 s/d 02/03/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
14	Pelatihan Calon Auditor Pengelolaan hutan Lestari untuk Hutan Negara	22	Blanded Learning	31/07/2023 s/d 15/08/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
15	Pelatihan Calon Auditor VLHH Kayu pada Industri	18	Blanded Learning	04/09/2023 s/d 15/09/2023	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
16	Pelatihan pemandu wisata alam	30	Klasikal	07/08/2023 s/d 12/08/2023	BPLHK BOGOR	APBN
17	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel	30	Klasikal	24/09/2023 s/d 27/09/2023	BPLHK BOGOR	APBN
18	Pelatihan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan bagi manggala Agni dan MPA	30	Klasikal	09/10/2023 s/d 14/10/2023	BPLHK BOGOR	APBN
19	Pelatihan Penggunaan Drone untuk Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30	Klasikal	11/10/2023 s/d 14/10/2023	BPLHK BOGOR	APBN
20	Pelatihan pembibitan vegetatif beAPBN + Kerjasama dengan BPSKL wilayah Kalimantan	40	Klasikal	06/11/2023 s/d 09/11/2023	BPLHK BOGOR	APBN + Kerjasama
21	Pembinaan KTH Responsif Gender	30	Klasikal	14/02/2023 s/d 17/02/2023	BPLHK KADIPATEN	APBN
22	Pelatihan Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel	30	Klasikal	08/05/2023 s/d 11/05/2023	BPLHK KADIPATEN	APBN
23	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel	30	E-learning	22/02/2023 s/d 28/02/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN
24	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Masyarakat Peduli Api Bekesadaran Hukum Angkatan 2	40	E-learning	13/07/2023 s/d 16/07/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN + Kerjasama
25	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1)	40	Klasikal	01/02/2023 s/d 08/02/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN + Kerjasama
26	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1)	40	Klasikal	08/05/2023 s/d 16/05/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN + Kerjasama
27	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Masyarakat Peduli Api Bekesadaran Hukum Angkatan 1	40	Klasikal	07/07/2023 s/d 10/07/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN + Kerjasama
28	Pelatihan Ganis PH Pengujian Kayu Bulat	35	Klasikal	12/07/2023 s/d 29/07/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN + Kerjasama

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
29	Ganis PH Bidang Perencanaan Hutan	25	Klasikal	12/07/2023 s/d 08/08/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN + Kerjasama
30	Pelatihan Pembangunan Demplot Revegetasi di Lahan Gambut Terdegradasi bagi Tenaga Lapangan	22	Klasikal	07/08/2023 s/d 11/08/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN + Kerjasama
31	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) Angkatan 3	40	Klasikal	06/09/2023 s/d 13/09/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN + Kerjasama
32	Pengendalian Ke akaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni (Fire Crew 1)	78	Klasikal	02/10/2023 s/d 09/10/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN
33	Pelatihan Penggunaan Drone Bidang LHK	78	Klasikal	10/10/2023 s/d 14/10/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN
34	Pelatihan Resolusi Konflik SDA	30	Blanded Learning	16/05/2023 s/d 23/05/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN
35	Pemandu Wisata Alam	30	E-learning	03/05/2023 s/d 11/05/2023	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
36	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1)	40	E-learning	05/06/2023 s/d 10/06/2023	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN + Kerjasama
37	Pemetaan Partisipatif Sumber Daya Wilayah	30	Blanded Learning	13/02/2023 s/d 17/02/2023	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
38	Pelatihan Teknik Pembibitan Tanaman Endemik dan Native Kalimantan	31	Klasikal	11/07/2023 s/d 15/07/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN
39	Pelatihan Pembentukan Petugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Jenjang Kualifikasi I	30	Klasikal	04/07/2023 s/d 08/07/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN
40	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) PT. Maruwai Coal	24	Klasikal	14/03/2023 s/d 20/03/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
41	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) Angk. 1 BPBD Kab. Kubar	34	Klasikal	28/04/2023 s/d 05/05/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
42	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) Angk. 2 BPBD Kab. Kubar	35	Klasikal	28/04/2023 s/d 05/05/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
43	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) Angk. 3 BPBD Kab. Kubar	36	Klasikal	07/05/2023 s/d 14/05/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
44	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) Angk. 4 BPBD Kab. Kubar	35	Klasikal	07/05/2023 s/d 14/05/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
45	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) Angk. 5 BPBD Kab. Kubar	30	Klasikal	06/06/2023 s/d 13/06/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
46	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) Angk. 6 BPBD Kab. Kubar	30	Klasikal	06/06/2023 s/d 13/06/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
47	Pelatihan Monitoring RIL C	30	Klasikal	13/06/2023 s/d 22/06/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
48	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) BPBD Kab. Malinau	20	Klasikal	04/07/2023 s/d 10/07/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
49	Pelatihan Ssitem Informasi Geografis Berbasis Ponsel APBN + Kerjasama KPHP Mook Manor Bulatn	30	Klasikal	07/08/2023 s/d 11/08/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
50	Pelatihan Satuan Pengamanan Kehutanan Dalam Perlindungan Dan Pengamanan Hutan APBN + Kerjasama APHI Komda Kaltim	15	Klasikal	29/08/2023 s/d 06/09/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
51	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) APBN + Kerjasama BPBD Kab. Mahulu	35	Klasikal	09/09/2023 s/d 15/09/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
52	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) APBN + Kerjasama KPHP Kelinjau	30	Klasikal	09/09/2023 s/d 15/09/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
53	Pelatihan Penggunaan Drone untuk Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Angk. 1	21	Klasikal	02/10/2023 s/d 05/10/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN
54	Pelatihan Penggunaan Drone untuk Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Angk. 2	21	Klasikal	02/10/2023 s/d 05/10/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN
55	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) Angk. 1	21	Klasikal	06/10/2023 s/d 12/10/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN
56	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) Angk. 2	21	Klasikal	06/10/2023 s/d 12/10/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN
57	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) BPBD Berau	29	Klasikal	01/11/2023 s/d 07/11/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
58	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) Angkatan 1 BPBD Kutim	30	Klasikal	13/11/2023 s/d 20/11/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
59	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) Angkatan 2 BPBD Kutim	30	Klasikal	13/11/2023 s/d 20/11/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
60	Pelatihan GANISPH Perencanaan Hutan (GANISPH Canhut) UPTD KPHP Batu Ayau	15	Blanded Learning	05/07/2023 s/d 02/08/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
61	Budidaya Tanaman di Bawah Tegakan	30	Blanded Learning	15/05/2023 s/d 24/05/2023	BPLHK KUPANG	APBN
62	Pengolahan dan Pemasaran HHBK Jambu Mete	30	Blanded Learning	05/06/2023 s/d 11/06/2023	BPLHK KUPANG	APBN
63	Pemandu Wisata Alam	30	Klasikal	08/05/2023 s/d 13/05/2023	BPLHK MAKASSAR	APBN
64	Pembuatan Pupuk Bokashi	30	Klasikal	04/09/2023 s/d 07/09/2023	BPLHK MAKASSAR	APBN
C	**6745.SCE.002 Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha**	**886**				
1	Pelatihan Ganis PH Perencanaan Hutan	35	E-learning	25/01/2023 s/d 14/03/2023	PUSDIKLAT	APBN
2	Pelatihan Digital Marketing bagi Lulusan SMK Kehutanan	30	Blanded Learning	12/07/2023 s/d 18/07/2023	PUSDIKLAT	APBN
3	Pelatihan pengamanan hutan berbasis masyarakat (community patrol)	30	Klasikal	20/02/2023 s/d 24/02/2023	BPLHK BOGOR	APBN
4	Pelatihan pemasaran produk multiusaha kehutanan	30	Klasikal	06/03/2023 s/d 10/03/2023	BPLHK BOGOR	APBN
5	Pelatihan Silvofishery pada Kawasa Mangrove	30	Klasikal	08/05/2023 s/d 11/05/2023	BPLHK BOGOR	APBN
6	Budiaya Lebah Madu Kelulut (Trigona Spp)Pembinaan KTH Responsif Gender	30	Klasikal	14/02/2023 s/d 17/02/2023	BPLHK KADIPATEN	APBN
7	Pembuatan Pupuk Bokashi	30	Klasikal	15/03/2023 s/d 18/03/2023	BPLHK KADIPATEN	APBN
8	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF)	30	Klasikal	28/10/2023 s/d 31/10/2023	BPLHK KADIPATEN	APBN
9	Pelatihan Interpreter Wisata Alam	30	Blanded Learning	01/03/2023 s/d 07/03/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
10	Pelatihan Pembinaan KTH Responsif Gender	30	Blanded Learning	01/03/2023 s/d 07/03/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN
11	Teknik Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan	30	Blanded Learning	16/05/2023 s/d 23/05/2023	BPLHK PEKANBARU	APBN
12	Pengelolaan Sampah organik untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF)	30	E-learning	24/05/2023 s/d 29/05/2023	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
13	Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona spp)	30	Klasikal	22/02/2023 s/d 25/02/2023	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
14	Teknik Pembuatan Asap Cair/Cuka Kayu dan Briket Arang	30	Blanded Learning	20/06/2023 s/d 23/06/2023	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
15	Pelatihan Teknik Pembuatan Asap Cair/Cuka Kayu Dan Briket Arang	30	Klasikal	11/07/2023 s/d 14/07/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN
16	Pelatihan Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona spp)	30	Klasikal	27/02/2023 s/d 03/03/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN
17	Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokashi	30	Klasikal	06/03/2023 s/d 09/03/2023	BPLHK SAMARINDA	APBN
18	Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat (GANIS PH) Kerjasama APHI Komda Kaltim	27	Klasikal	29/08/2023 s/d 14/09/2023	BPLHK SAMARINDA	Kerjasama
19	Pelatihan Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona spp) Kerjasama Disperindag Kab. Malinau	38	Klasikal	20/09/2023 s/d 23/09/2023	BPLHK SAMARINDA	Kerjasama
20	Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat (GANIS PH) Kerjasama APHI Komda Kalteng	33	Klasikal	17/10/2023 s/d 02/11/2023	BPLHK SAMARINDA	Kerjasama
21	Pelatihan Pemasaran Produk Multiusaha Kehutanan	30	Blanded Learning	20/02/2023 s/d 25/02/2023	BPLHK KUPANG	APBN
22	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik Untuk Budidaya Maggot BLACK SOLDIER FLY (BSF)	30	Blanded Learning	20/02/2023 s/d 25/02/2023	BPLHK KUPANG	APBN
23	Teknik Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan	30	Blanded Learning	18/06/2023 s/d 24/06/2023	BPLHK KUPANG	APBN
24	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel	30	Blanded Learning	03/11/2023 s/d 09/11/2023	BPLHK KUPANG	Kerjasama
25	Usaha Budidaya dan Pengolahan Jamur Tiram	30	Klasikal	14/02/2023 s/d 17/02/2023	BPLHK MAKASSAR	APBN
26	Teknik Pembuatan Asap Cair/ Cuka Kayu Briket Arang	30	Klasikal	07/03/2023 s/d 10/03/2023	BPLHK MAKASSAR	APBN
27	Teknik Pembuatan Minyak Atsiri Serai Wangi	30	Klasikal	15/03/2023 s/d 18/03/2023	BPLHK MAKASSAR	APBN
28	Pemasaran Produk Multi Usaha Kehutanan	30	Klasikal	13/02/2023 s/d 17/02/2023	BPLHK MAKASSAR	APBN
29	Tenaga Teknis Perencanaan Hutan	14	Klasikal	12/06/2023 s/d 05/07/2023	BPLHK MAKASSAR	Kerjasama
30	Tenaga Teknis Pengujian Kayu Bulat	11	Klasikal	12/06/2023 s/d 27/06/2023	BPLHK MAKASSAR	Kerjasama
31	Tenaga Teknis Pengujian Kayu Gergajian	8	Klasikal	12/06/2023 s/d 22/06/2023	BPLHK MAKASSAR	Kerjasama

Lampiran 4. Rincian Uji Kompetensi Tahun 2023

No	Profesi	Provinsi	Kenaikan Jenjang Jabatan		Alih Jabatan		Inpassing		Total	
			L	P	L	P	L	P	L	P
A	**SDM Aparatur**		**543**	**155**	**126**	**81**	**0**	**0**	**669**	**236**
1	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	RIAU	1	0	0	0	0	0	1	0
2	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	DKI JAKARTA	0	0	8	2	0	0	8	2
3	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	JAWA BARAT	2	1	0	0	0	0	2	1
4	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	JAWA TIMUR	1	0	0	0	0	0	1	0
5	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	KALIMANTAN TIMUR	1	5	0	0	0	0	1	5
6	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	SULAWESI BARAT	1	4	0	0	0	0	1	4
7	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	ACEH	1	5	0	0	0	0	1	5
8	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	RIAU	1	0	0	0	0	0	1	0
9	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	DKI JAKARTA	0	0	22	20	0	0	22	20
10	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	JAWA BARAT	3	1	0	0	0	0	3	1
11	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	JAWA TENGAH	2	3	0	0	0	0	2	3
12	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	JAWA TIMUR	3	0	0	0	0	0	3	0
13	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	KALIMANTAN TIMUR	2	3	0	0	0	0	2	3
14	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	ACEH	5	0	0	0	0	0	5	0
15	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	SUMATERA UTARA	10	2	0	0	0	0	10	2
16	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	RIAU	16	7	0	0	0	0	16	7
17	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	DKI JAKARTA	0	0	79	51	0	0	79	51
18	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	JAWA BARAT	68	32	0	0	0	0	68	32
19	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	JAWA TENGAH	4	0	0	0	0	0	4	0
20	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	JAWA TIMUR	4	0	0	0	0	0	4	0
21	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	NUSA TENGGARA TIMUR	7	1	0	0	0	0	7	1

No	Profesi	Provinsi	Kenaikan Jenjang Jabatan		Alih Jabatan		Inpassing		Total	
			L	P	L	P	L	P	L	P
22	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	SULAWESI SELATAN	30	9	0	0	0	0	30	9
23	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	SULAWESI TENGGARA	1	0	0	0	0	0	1	0
24	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	PAPUA BARAT	7	2	0	0	0	0	7	2
25	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	PAPUA SELATAN	5	0	0	0	0	0	5	0
26	PENGUKUR EMISI SUMBER BERGERAK	JAWA BARAT	44	25	0	0	0	0	44	25
27	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	ACEH	1	1	0	0	0	0	1	1
28	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	RIAU	3	4	0	0	0	0	3	4
29	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	DKI JAKARTA	0	0	9	5	0	0	9	5
30	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	JAWA BARAT	14	2	0	0	0	0	14	2
31	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	JAWA TENGAH	15	5	0	0	0	0	15	5
32	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	JAWA TIMUR	17	0	0	0	0	0	17	0
33	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	NUSA TENGGARA TIMUR	1	0	0	0	0	0	1	0
34	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	KALIMANTAN SELATAN	4	3	0	0	0	0	4	3
35	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	KALIMANTAN TIMUR	1	0	0	0	0	0	1	0
36	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	SULAWESI TENGAH	4	1	0	0	0	0	4	1
37	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	SULAWESI BARAT	3	1	0	0	0	0	3	1
38	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	SULAWESI SELATAN	2	0	0	0	0	0	2	0
39	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	SULAWESI TENGGARA	8	0	0	0	0	0	8	0
40	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP (PELHI)	ACEH	0	2	0	0	0	0	0	2
41	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP (PELHI)	RIAU	2	1	0	0	0	0	2	1
42	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP (PELHI)	DKI JAKARTA	0	0	1	3	0	0	1	3
43	POLISI HUTAN (POLHUT)	ACEH	1	0	0	0	0	0	1	0
44	POLISI HUTAN (POLHUT)	SUMATERA UTARA	5	3	0	0	0	0	5	3
45	POLISI HUTAN (POLHUT)	RIAU	49	4	0	0	0	0	49	4
46	POLISI HUTAN (POLHUT)	DKI JAKARTA	0	0	7	0	0	0	7	0
47	POLISI HUTAN (POLHUT)	JAWA BARAT	69	14	0	0	0	0	69	14
48	POLISI HUTAN (POLHUT)	NUSA TENGGARA BARAT	5	0	0	0	0	0	5	0

No	Profesi	Provinsi	Kenaikan Jenjang Jabatan		Alih Jabatan		Inpassing		Total	
			L	P	L	P	L	P	L	P
49	POLISI HUTAN (POLHUT)	NUSA TENGGARA TIMUR	11	2	0	0	0	0	11	2
50	POLISI HUTAN (POLHUT)	KALIMANTAN SELATAN	9	3	0	0	0	0	9	3
51	POLISI HUTAN (POLHUT)	KALIMANTAN TIMUR	16	5	0	0	0	0	16	5
52	POLISI HUTAN (POLHUT)	SULAWESI TENGAH	7	0	0	0	0	0	7	0
53	POLISI HUTAN (POLHUT)	SULAWESI BARAT	22	0	0	0	0	0	22	0
54	POLISI HUTAN (POLHUT)	SULAWESI SELATAN	35	4	0	0	0	0	35	4
55	POLISI HUTAN (POLHUT)	SULAWESI TENGGARA	9	0	0	0	0	0	9	0
56	POLISI HUTAN (POLHUT)	PAPUA BARAT	8	0	0	0	0	0	8	0
57	POLISI HUTAN (POLHUT)	PAPUA SELATAN	3	0	0	0	0	0	3	0
B	**SDM Non Aparatur**								**88**	**13**
1	GANIS HHBK KELOMPOK BATANG	ACEH							7	1
2	GANIS HHBK KELOMPOK BATANG	SUMATERA UTARA							3	0
3	GANIS HHBK KELOMPOK BATANG	RIAU							7	0
4	GANIS HHBK KELOMPOK GETAH	ACEH							5	0
5	GANIS HHBK KELOMPOK GETAH	BENGKULU							13	2
6	GANIS HHBK KELOMPOK GETAH	LAMPUNG							9	0
7	GANIS HHBK KELOMPOK GETAH	SULAWESI UTARA							17	2
8	GANIS HHBK KELOMPOK KULIT	JAMBI							4	1
9	PENGUJI PENYUSUN AMDAL	DKI JAKARTA							23	7
TOTAL									**757**	**249**

Lampiran 5. Rincian Sekolah yang mengikuti Pembinaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2023

No	Provinsi	Kota / Kabupaten	Nama Sekolah	Tingkat Sekolah	Tingkat Penghargaan
1	ACEH	ACEH BARAT DAYA	SMPN 1 BLANGPIDIE	SMP/MTS	Nasional
2	ACEH	BANDA ACEH	SMPN 6 BANDA ACEH	SMP/MTS	Nasional
3	ACEH	LANGSA	SMPN 2 LANGSA	SMP/MTS	Nasional
4	SUMATERA UTARA	ASAHAN	SMPN 1 KISARAN	SMP/MTS	Nasional
5	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	SMPN 1 BERINGIN	SMP/MTS	Nasional
6	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	MTS 2 LUBUK PAKAM	SMP/MTS	Mandiri
7	SUMATERA UTARA	KARO	SMAN 1 BERASTAGI	SMA/MA/SMK	Mandiri
8	SUMATERA UTARA	KARO	SMAS MASEHI GBKP BERASTAGI	SMA/MA/SMK	Nasional
9	SUMATERA UTARA	MEDAN	SMPN 1	SMP/MTS	Mandiri
10	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	SMPN 2 DOLOK MASIHUL	SMP/MTS	Mandiri
11	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	SMPN 1 MARANCAR	SMP/MTS	Mandiri
12	SUMATERA UTARA	TEBING TINGGI	SDN 163094	SD/MI	Mandiri
13	SUMATERA UTARA	TOBA SAMOSIR	SDS BONAPASOGIT SEJAHTERA	SD/MI	Mandiri
14	SUMATERA BARAT	BUKITTINGGI	SDN 09 BELAKANG BALOK	SD/MI	Nasional
15	SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	SMPN 1 PULAU PUNJUNG	SMP/MTS	Nasional
16	SUMATERA BARAT	PADANG	SDN 39 MATA AIR BARAT	SD/MI	Nasional
17	SUMATERA BARAT	PARIAMAN	SMAN 4 PARIAMAN	SMA/MA/SMK	Nasional
18	SUMATERA BARAT	PASAMAN	SDN 06 PAUH LUBUK SIKAPING	SD/MI	Mandiri
19	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	SDS ANWAR KARIM III	SD/MI	Nasional
20	SUMATERA BARAT	PAYAKUMBUH	SDN 31 PAYAKUMBUH	SD/MI	Nasional
21	SUMATERA BARAT	SAWAH LUNTO	SDN 19 SIJANTANG KOTO	SD/MI	Nasional
22	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG (SAWAH LUNTO SIJUNJUNG)	MTSN 1 SIJUNJUNG	SMP/MTS	Nasional
23	SUMATERA BARAT	SOLOK	SDN 10 VI SUKU	SD/MI	Mandiri
24	SUMATERA BARAT	SOLOK	MIS MUALIMIN	SD/MI	Nasional
25	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	MTSS BAITUL IHZA	SMP/MTS	Mandiri
26	RIAU	BENGKALIS	SMPN 2 MANDAU	SMP/MTS	Mandiri
27	RIAU	KUANTAN SINGINGI	SDS GLOBAL ANDALAN ESTATE BASERAH	SD/MI	Mandiri
28	RIAU	PELALAWAN	SDN 010	SD/MI	Mandiri
29	RIAU	PELALAWAN	SDN 007	SD/MI	Mandiri
30	RIAU	ROKAN HILIR	SMPN 1	SMP/MTS	Mandiri

No	Provinsi	Kota / Kabupaten	Nama Sekolah	Tingkat Sekolah	Tingkat Penghargaan
31	RIAU	SIAK	SMPN 1 KANDIS	SMP/MTS	Mandiri
32	RIAU	SIAK	SMAN 1 SUNGAI APIT	SMA/MA/SMK	Mandiri
33	KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	SMAN 2 KARIMUN	SMA/MA/SMK	Nasional
34	KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	SMAN 1 KARIMUN	SMA/MA/SMK	Mandiri
35	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG PINANG	SMAN 4 TANJUNGPINANG	SMA/MA/SMK	Nasional
36	JAMBI	BUNGO	SDN NO.134/II PURWASARI	SD/MI	Nasional
37	JAMBI	JAMBI	SDN 001/IV KOTA JAMBI	SD/MI	Mandiri
38	JAMBI	KERINCI	MTSN 6 KERINCI	SMP/MTS	Nasional
39	JAMBI	MERANGIN	SMAN 8 MERANGIN	SMA/MA/SMK	Nasional
40	JAMBI	SAROLANGUN	SDN 002/VII PASAR SAROLANGUN	SD/MI	Mandiri
41	JAMBI	SUNGAIPENUH	SMAN 1 SUNGAI PENUH	SMA/MA/SMK	Mandiri
42	JAMBI	TEBO	SMPN 12 KAB TEBO	SMP/MTS	Nasional
43	SUMATERA SELATAN	BANYUASIN	SMPN 5 BANYUASIN III	SMP/MTS	Nasional
44	SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN	SMPN 3 LAIS	SMP/MTS	Nasional
45	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS	SMPN KARYA SAKTI	SMP/MTS	Mandiri
46	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU	SDN 11 OGAN KOMERING ULU	SD/MI	Mandiri
47	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR	SMAN 1 BELITANG	SMA/MA/SMK	Nasional
48	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR	SMAN 3 MARTAPURA	SMA/MA/SMK	Nasional
49	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	SMAN 14 PALEMBANG	SMA/MA/SMK	Nasional
50	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	SMPN 1 SIMPANG TERITIP	SMP/MTS	Mandiri
51	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	SMAN 1 MUNTOK	SMA/MA/SMK	Nasional
52	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG	SMPN 2 BADAU	SMP/MTS	Mandiri
53	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	SDN 30 PANGKALPINANG	SD/MI	Mandiri
54	BENGKULU	MUKO MUKO	MAN 1 MUKOMUKO	SMA/MA/SMK	Nasional
55	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	SDN 1 SUKAPURA	SD/MI	Nasional
56	LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	SDN 1 GUNUNG MADU	SD/MI	Mandiri
57	LAMPUNG	METRO	SDN 11 METRO PUSAT	SD/MI	Nasional
58	LAMPUNG	PESISIR BARAT	SMAN 1 PESISIR SELATAN	SMA/MA/SMK	Nasional
59	LAMPUNG	PRINGSEWU	UPT SMPN 2 ADILUWIH	SMP/MTS	Mandiri
60	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	SDN KEBON JERUK 06	SD/MI	Mandiri

No	Provinsi	Kota / Kabupaten	Nama Sekolah	Tingkat Sekolah	Tingkat Penghargaan
61	DKI JAKARTA	JAKARTA PUSAT	SMKN 2 JAKARTA	SMA/MA/SMK	Mandiri
62	DKI JAKARTA	JAKARTA SELATAN	SDN TANJUNG BARAT 09	SD/MI	Mandiri
63	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR	SDN PONDOK RANGGON 01 PAGI	SD/MI	Nasional
64	DKI JAKARTA	JAKARTA UTARA	SDN SEMPER TIMUR 07	SD/MI	Mandiri
65	DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	SMPN 285 JAKARTA	SMP/MTS	Nasional
66	JAWA BARAT	BANDUNG	SD AR RAFI'	SD/MI	Mandiri
67	JAWA BARAT	BANDUNG	SMKS MAHAPUTRA	SMA/MA/SMK	Nasional
68	JAWA BARAT	BANDUNG	SMK MERDEKA BANDUNG	SMA/MA/SMK	Mandiri
69	JAWA BARAT	BANDUNG BARAT	SMPN 1 LEMBANG	SMP/MTS	Nasional
70	JAWA BARAT	BANJAR	UPTD SDN 2 BANJAR	SD/MI	Nasional
71	JAWA BARAT	BEKASI	SMAN 2 CIKARANG SELATAN	SMA/MA/SMK	Mandiri
72	JAWA BARAT	BEKASI	SMAN 14 BEKASI	SMA/MA/SMK	Nasional
73	JAWA BARAT	BOGOR	SMAN 1 BABAKANMADANG	SMA/MA/SMK	Mandiri
74	JAWA BARAT	BOGOR	SMAN 4 BOGOR	SMA/MA/SMK	Mandiri
75	JAWA BARAT	CIAMIS	MI HANDAPHERANG	SD/MI	Mandiri
76	JAWA BARAT	CIMAHI	SDN BAROS MANDIRI 4	SD/MI	Nasional
77	JAWA BARAT	CIREBON	SMPN 7 KOTA CIREBON	SMP/MTS	Nasional
78	JAWA BARAT	CIREBON	SMAN 1 DUKUPUNTANG	SMA/MA/SMK	Mandiri
79	JAWA BARAT	DEPOK	SMAN 3 DEPOK	SMA/MA/SMK	Nasional
80	JAWA BARAT	GARUT	MA DARUL ARQAM PUTRI	SMA/MA/SMK	Nasional
81	JAWA BARAT	KARAWANG	SMPN 1 TIRTAJAYA	SMP/MTS	Nasional
82	JAWA BARAT	KUNINGAN	SMPIT AL-MULTAZAM	SMP/MTS	Nasional
83	JAWA BARAT	MAJALENGKA	SMK KEHUTANAN NEGERI KADIPATEN	SMA/MA/SMK	Nasional
84	JAWA BARAT	SUBANG	SMPN 1 CIJAMBE	SMP/MTS	Nasional
85	JAWA BARAT	SUKABUMI	MI KADUPUGUR	SD/MI	Nasional
86	JAWA BARAT	SUKABUMI	SDN BAROS KENCANA CBM	SD/MI	Mandiri
87	JAWA BARAT	SUKABUMI	SDS IT INSAN CENDIKIA	SD/MI	Nasional
88	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	MTSN 10 TASIKMALAYA	SMP/MTS	Nasional
89	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	SMPN 8 TASIKMALAYA	SMP/MTS	Nasional
90	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	SMAN 1 PURWAREJA KLAMPOK	SMA/MA/SMK	Nasional
91	JAWA TENGAH	BANYUMAS	SDN 2 SOKARAJA KULON	SD/MI	Mandiri
92	JAWA TENGAH	BANYUMAS	SMPN 1 KARANGLEWAS	SMP/MTS	Mandiri

No	Provinsi	Kota / Kabupaten	Nama Sekolah	Tingkat Sekolah	Tingkat Penghargaan
93	JAWA TENGAH	BANYUMAS	SMPN 2 SUMBANG	SMP/MTS	Mandiri
94	JAWA TENGAH	BANYUMAS	SMPN 2 CILONGOK	SMP/MTS	Mandiri
95	JAWA TENGAH	BANYUMAS	SMAN 1 SOKARAJA	SMA/MA/SMK	Mandiri
96	JAWA TENGAH	BATANG	SMPN 2 TULIS	SMP/MTS	Nasional
97	JAWA TENGAH	BLORA	SMPN 1 TODANAN	SMP/MTS	Mandiri
98	JAWA TENGAH	BLORA	SMPN 1 SAMBONG	SMP/MTS	Nasional
99	JAWA TENGAH	BLORA	SMK MIGAS CEPU	SMA/MA/SMK	Nasional
100	JAWA TENGAH	BLORA	SMAN 2 BLORA	SMA/MA/SMK	Mandiri
101	JAWA TENGAH	BOYOLALI	SDN 8 BOYOLALI	SD/MI	Nasional
102	JAWA TENGAH	DEMAK	SDN BATURSARI 5	SD/MI	Mandiri
103	JAWA TENGAH	DEMAK	SMAN 1 KARANGTENGAH	SMA/MA/SMK	Nasional
104	JAWA TENGAH	JEPARA	SDN 2 PENDOSAWALAN	SD/MI	Mandiri
105	JAWA TENGAH	KENDAL	SMAN 2 KENDAL	SMA/MA/SMK	Mandiri
106	JAWA TENGAH	KENDAL	SMAN 1 SUKOREJO	SMA/MA/SMK	Nasional
107	JAWA TENGAH	KLATEN	SMPN 1 JATINOM	SMP/MTS	Mandiri
108	JAWA TENGAH	KUDUS	SD 1 RENDENG	SD/MI	Nasional
109	JAWA TENGAH	KUDUS	SMAN 1 GEBOG KUDUS	SMA/MA/SMK	Nasional
110	JAWA TENGAH	PATI	SMPN 1 TAMBAKROMO	SMP/MTS	Nasional
111	JAWA TENGAH	PATI	SMPN 4 PATI	SMP/MTS	Mandiri
112	JAWA TENGAH	PATI	SMPN 1 MARGOYOSO	SMP/MTS	Nasional
113	JAWA TENGAH	PATI	SMPN 7 PATI	SMP/MTS	Mandiri
114	JAWA TENGAH	PATI	SMPN 5 PATI	SMP/MTS	Mandiri
115	JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SDN KRADENAN 01	SD/MI	Nasional
116	JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SMPN 7 PEKALONGAN	SMP/MTS	Nasional
117	JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SMPN 1 TIRTO	SMP/MTS	Nasional
118	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	SMPN 2 BOBOTSARI	SMP/MTS	Mandiri
119	JAWA TENGAH	SEMARANG	SD KATOLIK SANG TIMUR	SD/MI	Mandiri
120	JAWA TENGAH	SEMARANG	SD VIRGO MARIA 2 BAWEN	SD/MI	Nasional
121	JAWA TENGAH	SEMARANG	SMP IT PAPB	SMP/MTS	Nasional
122	JAWA TENGAH	SEMARANG	SMPN 31 SEMARANG	SMP/MTS	Mandiri
123	JAWA TENGAH	SEMARANG	SMPN 39 SEMARANG	SMP/MTS	Mandiri
124	JAWA TENGAH	SEMARANG	SMAN 11 SEMARANG	SMA/MA/SMK	Mandiri

No	Provinsi	Kota / Kabupaten	Nama Sekolah	Tingkat Sekolah	Tingkat Penghargaan
125	JAWA TENGAH	SUKOHARJO	MIN 2 SUKOHARJO	SD/MI	Mandiri
126	JAWA TENGAH	SUKOHARJO	SD TARAKANITA SOLO BARU	SD/MI	Mandiri
127	JAWA TENGAH	SUKOHARJO	SMPN 2 SUKOHARJO	SMP/MTS	Nasional
128	JAWA TENGAH	SUKOHARJO	SMPN 3 SUKOHARJO	SMP/MTS	Mandiri
129	JAWA TENGAH	TEGAL	MIN 1 TEGAL	SD/MI	Nasional
130	JAWA TENGAH	TEGAL	SMAN 1 WELERI	SMA/MA/SMK	Mandiri
131	JAWA TENGAH	TEMANGGUNG	SD ALKAUTSAR TEMANGGUNG	SD/MI	Mandiri
132	JAWA TENGAH	TEMANGGUNG	SMPN 6 TEMANGGUNG	SMP/MTS	Mandiri
133	JAWA TENGAH	TEMANGGUNG	SMKN 2 TEMANGGUNG	SMP/MTS	Mandiri
134	JAWA TENGAH	TEMANGGUNG	SMAN 1 PARAKAN	SMA/MA/SMK	Mandiri
135	JAWA TENGAH	WONOSOBO	SDN 1 WONOSOBO	SD/MI	Mandiri
136	JAWA TENGAH	WONOSOBO	SMPN 2 KALIKAJAR	SMP/MTS	Nasional
137	JAWA TENGAH	WONOSOBO	SMPN 3 KEPIL	SMP/MTS	Mandiri
138	DI YOGYAKARTA	BANTUL	SDN BAKALAN	SD/MI	Mandiri
139	DI YOGYAKARTA	BANTUL	SDN 1 BANTUL	SD/MI	Mandiri
140	DI YOGYAKARTA	GUNUNG KIDUL	SDN PALIYAN II	SD/MI	Nasional
141	DI YOGYAKARTA	GUNUNG KIDUL	SMPN 2 NGLIPAR	SMP/MTS	Nasional
142	DI YOGYAKARTA	GUNUNG KIDUL	SMAN 2 WONOSARI	SMA/MA/SMK	Mandiri
143	DI YOGYAKARTA	KULON PROGO	SDN KALIMENUR	SD/MI	Nasional
144	DI YOGYAKARTA	KULON PROGO	MAN 2 KULON PROGO	SMA/MA/SMK	Mandiri
145	DI YOGYAKARTA	SLEMAN	SDN BANYUURIP 2	SD/MI	Nasional
146	DI YOGYAKARTA	SLEMAN	SDN MLATI 2	SD/MI	Nasional
147	DI YOGYAKARTA	SLEMAN	SMAN 1 NGEMPLAK	SMA/MA/SMK	Nasional
148	DI YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	SDN KOTAGEDE 3 YOGYAKARTA	SD/MI	Nasional
149	DI YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	SMP MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA	SMP/MTS	Mandiri
150	DI YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	SMAN 9 YOGYAKARTA	SMA/MA/SMK	Mandiri
151	BALI	BADUNG	SD NO 4 JIMBARAN	SD/MI	Mandiri
152	BALI	BULELENG	SMPN 3 SINGARAJA	SMP/MTS	Mandiri
153	BALI	DENPASAR	SMP WIDYA SAKTI DENPASAR	SMP/MTS	Mandiri
154	BALI	GIANYAR	SMPN 1 GIANYAR	SMP/MTS	Mandiri
155	BALI	JEMBRANA	SMPN 3 MENDOYO	SMP/MTS	Mandiri
156	BALI	TABANAN	SDN 1 MAMBANG	SD/MI	Mandiri

No	Provinsi	Kota / Kabupaten	Nama Sekolah	Tingkat Sekolah	Tingkat Penghargaan
157	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	MA. SAYANG IBU	SMA/MA/SMK	Mandiri
158	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG	SMP SANTO AUGUSTINUS KETAPANG	SMP/MTS	Mandiri
159	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	SDN 34 PONTIANAK KOTA	SD/MI	Mandiri
160	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	SMAN 3 PONTIANAK	SMA/MA/SMK	Nasional
161	KALIMANTAN BARAT	SINGKAWANG	SMPN 4 SINGKAWANG	SMP/MTS	Mandiri
162	KALIMANTAN SELATAN	BANJAR	SMPN 7 KARANG INTAN	SMP/MTS	Nasional
163	KALIMANTAN SELATAN	BANJAR	SMPN 2 MARTAPURA	SMP/MTS	Mandiri
164	KALIMANTAN SELATAN	BANJARBARU	SDN 1 LANDASAN ULIN TIMUR	SD/MI	Mandiri
165	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	SDN PENGAMBANGAN 5	SD/MI	Mandiri
166	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	SDN KEBUN BUNGA 1	SD/MI	Nasional
167	KALIMANTAN SELATAN	BARITO KUALA	SMKN 1 MARABAHAN	SMA/MA/SMK	Nasional
168	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	SMPN 1 KANDANGAN	SMP/MTS	Mandiri
169	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	SMAN 1 DAHA UTARA	SMA/MA/SMK	Nasional
170	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	SDN 2 BARABAI TIMUR	SD/MI	Nasional
171	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	MAN 1 HST	SMA/MA/SMK	Mandiri
172	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	SMAN 1 PAMINGGIR	SMA/MA/SMK	Mandiri
173	KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	SMKN 1 KOTABARU	SMA/MA/SMK	Nasional
174	KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	SMAS ITP TARJUN	SMA/MA/SMK	Mandiri
175	KALIMANTAN SELATAN	TABALONG	SMPN 2 MUARA UYA	SMP/MTS	Nasional
176	KALIMANTAN SELATAN	TABALONG	SMAN 1 TANTA	SMA/MA/SMK	Mandiri
177	KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	SMAN 1 SUNGAI LOBAN	SMA/MA/SMK	Mandiri
178	KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	SMAN 1 SIMPANG EMPAT	SMA/MA/SMK	Mandiri
179	KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	MTSN 4 TAPIN	SMP/MTS	Nasional
180	KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	SMPN 2 RANTAU	SMP/MTS	Mandiri
181	KALIMANTAN TIMUR	BALIKPAPAN	SDN 017 BALIKPAPAN TIMUR	SD/MI	Nasional
182	KALIMANTAN TIMUR	BALIKPAPAN	SDN 009 BALIKPAPAN UTARA	SD/MI	Mandiri
183	KALIMANTAN TIMUR	BALIKPAPAN	SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN	SD/MI	Nasional
184	KALIMANTAN TIMUR	BALIKPAPAN	SDN 009 BALIKPAPAN UTARA	SD/MI	Mandiri
185	KALIMANTAN TIMUR	BALIKPAPAN	SMAN 9 BALIKPAPAN	SMA/MA/SMK	Mandiri
186	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	SMPN 2 TALISAYAN	SMP/MTS	Nasional
187	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	SMPN 5 TANJUNG REDEB	SMP/MTS	Nasional
188	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	SMPN 2 TANJUNG REDEB	SMP/MTS	Mandiri

No	Provinsi	Kota / Kabupaten	Nama Sekolah	Tingkat Sekolah	Tingkat Penghargaan
189	KALIMANTAN TIMUR	BONTANG	SDN 002 BONTANG SELATAN	SD/MI	Nasional
190	KALIMANTAN TIMUR	BONTANG	SD ALAM BAITURRAHMAN BONTANG	SD/MI	Nasional
191	KALIMANTAN TIMUR	BONTANG	MAN BONTANG	SMA/MA/SMK	Mandiri
192	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SDIT AL IHSAN MUARA KAMAN	SD/MI	Nasional
193	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SDN 018 TENGGARONG	SD/MI	Mandiri
194	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SMPN 2 TENGGARONG	SMP/MTS	Nasional
195	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	SDN 013 SANGATTA UTARA	SD/MI	Nasional
196	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	SMPN 1 TELUK PANDAN	SMP/MTS	Mandiri
197	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	SMAN 2 SANGATTA UTARA	SMA/MA/SMK	Nasional
198	KALIMANTAN TIMUR	PASER	SMPN 6 TANAH GROGOT	SMP/MTS	Nasional
199	KALIMANTAN TIMUR	PASER	SMPN 8 TANAH GROGOT	SMP/MTS	Nasional
200	KALIMANTAN TIMUR	PASER	SMPN 2 BATU SOPANG	SMP/MTS	Mandiri
201	KALIMANTAN TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	SDN 013 PENAJAM	SD/MI	Mandiri
202	KALIMANTAN TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	SMPN 5 PPU	SMP/MTS	Nasional
203	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	SD ISLAM BUNGA BANGSA	SD/MI	Mandiri
204	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	SDN 004 SAMARINDA SEBERANG	SD/MI	Nasional
205	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	SMPN 29 SAMARINDA	SMP/MTS	Nasional
206	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	MTSN SAMARINDA	SMP/MTS	Mandiri
207	KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN (BULONGAN)	SMPN 2 BUNYU	SMP/MTS	Mandiri
208	KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN (BULONGAN)	SMPN 1 BUNYU	SMP/MTS	Mandiri
209	KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN (BULONGAN)	SMAN 1 TANJUNG PALAS	SMA/MA/SMK	Nasional
210	KALIMANTAN UTARA	TARAKAN	SDN 033 TARAKAN	SD/MI	Nasional
211	KALIMANTAN UTARA	TARAKAN	MTSN TARAKAN	SMP/MTS	Nasional
212	SULAWESI UTARA	KOTAMOBAGU	MAN 1 KOTAMOBAGU	SMA/MA/SMK	Nasional
213	GORONTALO	BOALEMO	MTSN 1 BOALEMO	SMP/MTS	Nasional
214	GORONTALO	GORONTALO UTARA	SMPN 1 ANGGREK	SMP/MTS	Nasional
215	SULAWESI TENGAH	PALU	SMPN 9 PALU	SMP/MTS	Nasional
216	SULAWESI BARAT	MAJENE	MIN 2 MAJENE	SD/MI	Nasional
217	SULAWESI SELATAN	BANTAENG	SDN 5 LEMBANG CINA	SD/MI	Mandiri
218	SULAWESI SELATAN	BONE	SD INPRES 6/75 CORAWALI	SD/MI	Nasional
219	SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	MTS BADAN AMAL	SMP/MTS	Mandiri
220	SULAWESI SELATAN	LUWU	SMAN 1 LUWU	SMA/MA/SMK	Mandiri

No	Provinsi	Kota / Kabupaten	Nama Sekolah	Tingkat Sekolah	Tingkat Penghargaan
221	SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR	UPTD SDN 221 MALILI	SD/MI	Mandiri
222	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	UPT SPF SDI UNGGULAN BTN PEMDA	SD/MI	Mandiri
223	SULAWESI SELATAN	MAROS	UPTD SDN 103 INPRES HASANUDDIN	SD/MI	Mandiri
224	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE KEPULAUAN	MAN MA'RANG PANGKAJENE KEPULAUAN	SMA/MA/SMK	Mandiri
225	SULAWESI SELATAN	PAREPARE	UPTD SMPN 1 PAREPARE	SMP/MTS	Nasional
226	SULAWESI SELATAN	PINRANG	SMAN 11 PINRANG	SMA/MA/SMK	Mandiri
227	SULAWESI SELATAN	SIDENRENG RAPPANG / RAPANG	UPT SDN 11 PANGKAJENE	SD/MI	Mandiri
228	SULAWESI TENGGARA	KENDARI	SDN 95 KENDARI	SD/MI	Nasional
229	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA	SDN 1 LAMOKATO	SD/MI	Nasional
230	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA	SMPN 1 KOLAKA	SMP/MTS	Mandiri

Lampiran 6. Surat Penyelarasan Target Kinerja

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT BADAN
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 14 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
E-mail: setbp2sdm@menlhk.go.id Telepon. (021) – 5730131 Fax. 5730131

Nomor : S.978 /SET.II /PEHKT /SET.9/11/2022 10 November 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Penyesuaian Data pada dokumen Perencanaan BP2SDM

Yth.
Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KLHK
di
Jakarta

Sehubungan dengan adanya perubahan arsitektur kinerja serta pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada Badan P2SDM serta dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Badan P2SDM - KLHK, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan Kehutanan nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Badan P2SDM telah melakukan penyesuaian pada arsitektur kinerja serta target dan alokasi anggaran per tahun melalui dokumen Renstra BP2SDM Tahun 2020-2024 (Revisi). Dokumen tersebut dapat diakses pada tautan https://bit.ly/RevisiRenstraBP2SDM.
2. Selama tahun 2022, terdapat beberapa kali penyesuaian anggaran yang menyebabkan perlunya penyesuaian target kinerja pada dokumen perencanaan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka penyempurnaan dokumen perencanaan BP2SDM, dapat kami sampaikan bahwa saat ini Badan P2SDM sedang melakukan penyesuaian target dan anggaran pada dokumen Rencana Kerja BP2SDM Tahun 2022 serta Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan,

A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

Tembusan:
- Kepala Badan P2SDM (sebagai laporan)

Lampiran 7. Surat Penyelarasan Target Kinerja pada Satker PGLHK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT BADAN
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 14 Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270
e-mail: setbp2sdm@menlhk.go.id Telp. (021) 5730131 Fax. 5730131

Nomor : S. 911/SET-II/PEMM/REN.2/10/2023 17 Oktober 2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Perbaikan Data Target Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Satker PGLHK

Kepada Yth.
Kepala Pusat Pengembangan Generasi LHK
di -
Serpong

Dalam rangka tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP Badan P2SDM Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal KLHK dan untuk meningkatkan pengelolaan SAKIP di Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian target di dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan Generasi LHK Tahun 2020-2024 (Revisi) halaman 19 antara IKK (kode T4.S1.1.1.4.1.1 "Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga Masyarakat/Komunitas yang peduli dan Berbudaya LHK") dengan IKP "Jumlah Lembaga/Komunitas Serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup" (selengkapnya sebagaimana terlampir).
2. Berkaitan dengan hal tersebut, Saudara agar menindaklanjutinya dengan menyesuaikan perbedaan target IKK dan IKP di dokumen Renstra Pusat PGLHK dalam kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plh. Sekretaris Badan,

Slamet Riyadi, S.H., MM.
NIP. 19731215 199803 2 003

Tembusan:
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Lampiran 8. Penghargaan Satker dengan Penilaian IKPA Terbaik Semester I Tahun 2023

Lampiran 9 Penghargaan Satker BPLHK Pematangsiantar sebagai Peringkat Pertama Nilai IKPA Triwulan I Tahun 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: KET-81/KPN.0204/2023

Diberikan kepada:

BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PEMATANG SIANTAR (237640)

sebagai

PERINGKAT PERTAMA
NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
TRIWULAN I TAHUN 2023 KATEGORI PAGU BESAR

Pematang Siantar, 10 Mei 2023
Plt. Kepala KPPN Pematang Siantar

Ida Royani Hutapea

Lampiran 10 Surat Hasil Penjaminan Mutu Evaluasi SAKIP Mandiri Satker lingkup Badan P2SDM

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 14 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
E-mail: setbp2sdm@menlhk.go.id Telepon. (021) – 5730131 Fax. 5730131

26 September 2023

Nomor : S. 147/P1SDM/SET.1I/REN.2/9/2023
Sifat : **Biasa**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penjaminan Mutu Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2023

Yth.
1. Sekretaris Badan P2SDM;
2. Kepala Pusat Penyuluhan;
3. Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM;
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK;
5. Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Para Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Para Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri;

di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri LHK Nomor 975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Pengelola SAKIP lingkup Badan P2SDM telah melaksanakan penjaminan mutu terhadap penilaian SAKIP Mandiri satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2023 melalui aplikasi eSAKIP KLHK.
2. Penjaminan mutu dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Hasil penjaminan mutu dituangkan dalam bentuk nilai sebagaimana lampiran 1.
4. Kelemahan dan rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP Satker lingkup Badan P2SDM secara umum sebagaimana lampiran 2, sedangkan secara rinci dapat dilihat pada aplikasi masing-masing Satker. Seluruh Satker agar dapat menindaklanjuti Rekomendasi tersebut untuk peningkatan akuntabilitas kinerja selanjutnya.
5. Hasil Penjaminan Mutu ini akan dijadikan dasar dalam perhitungan Nilai Pengelolaan Kinerja (NPK) Tahun 2023.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan,

A. Palguna Ruteka
NIP. 196509?4 199303 1 001

Lampiran 1. Surat Kepala Badan P2SDM
Nomor : S.147/P2SDM/SET.II/PEN.2/9/2023
Tanggal : 26 September 2023

REKAPITULASI HASIL PENJAMINAN MUTU EVALUASI SAKIP MANDIRI SATKER LINGKUP BADAN P2SDM TAHUN 2023

No	Satker	Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (25%)	Total (100%)	Predikat
1	Sekretariat Badan P2SDM	26,18	25,32	11,85	20,38	83,73	Memuaskan (A)
2	Pusat Penyuluhan	26,08	23,80	11,20	19,95	81,03	Memuaskan (A)
3	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	26,16	24,67	11,11	19,84	81,78	Memuaskan (A)
4	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	25,79	23,84	10,68	19,50	79,81	Sangat Baik (BB)
5	Pusat Pengembangan Generasi LHK	26,63	24,15	12,05	19,92	82,75	Memuaskan (A)
6	BPLHK Bogor	24,24	25,25	8,52	18,35	76,36	Sangat Baik (BB)
7	BPLHK PematangSiantar	23,00	23,34	8,20	18,17	72,71	Sangat Baik (BB)
8	BPLHK Samarinda	24,07	22,65	6,77	18,10	71,59	Sangat Baik (BB)
9	BPLHK Makassar	25,18	23,73	9,38	17,45	75,74	Sangat Baik (BB)
10	BPLHK Pekanbaru	26,33	25,56	10,44	19,03	81,36	Memuaskan (A)
11	BPLHK Kadipaten	26,10	25,42	11,68	19,34	82,54	Memuaskan (A)
12	BPLHK Kupang	25,58	24,66	11,29	19,04	80,57	Memuaskan (A)
13	SMKK N Manokwari	25,37	23,00	10,07	19,53	77,97	Sangat Baik (BB)
14	SMKK N Kadipaten	26,24	23,81	8,21	18,69	76,95	Sangat Baik (BB)
15	SMKK N Makassar	26,08	23,73	7,19	18,69	75,69	Sangat Baik (BB)
16	SMKK N Samarinda	22,46	23,25	9,11	19,18	74,00	Sangat Baik (BB)
17	SMKK N Pekanbaru	25,17	23,46	10,90	19,78	79,31	Sangat Baik (BB)
	Rata-Rata	25,33	24,10	9,92	19,11	78,46	Sangat Baik (BB)

Kepala Badan,

A. Palguna Puteka
NIP. 19650924 199303 1 001

Lampiran 2. Surat Kepala Badan P2SDM
Nomor : S-147/P2SDM/SET.II/REN.2/9/2023
Tanggal : 26 September 2023

DAFTAR KELEMAHAN DAN REKOMENDASI UMUM IMPLEMENTASI SAKIP SATKER LINGKUP BADAN P2SDM

No	Komponen	Kelemahan	Rekomendasi
1	Perencanaan Kinerja	Beberapa satuan kerja (UPT) masih belum sesuai dalam mencantumkan indikator kinerja kegiatan, dengan mencantumkan Rincian Output (RO) sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satker agar lebih memahami aturan penyusunan dokumen perencanaan. Mencantumkan Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output yang sesuai
		Satuan kerja masih belum mencantumkan pohon kinerja di dalam dokumen perencanaan	Satuan kerja agar menyusun pohon kinerja untuk dicantumkan di dalam dokumen perencanaan
		Belum seluruh satker melengkapi dokumen perencanaan dengan tanda tangan kepala Satker, tanggal pengesahan dan belum seluruhnya di upload pada website Satker	Satuan kerja agar melengkapi dokumen perencanaannya dengan tanda tangan kepala satker, tanggal pengesahan dan mengupload pada website satker
2	Pengukuran Kinerja	Belum seluruh satker melakukan pengukuran dan monitoring pencapaian kinerja secara berkala	Kepala Satker terlibat dalam melakukan pengukuran dan monitoring kinerja anggaran dan IKK secara berkala minimal setiap triwulan disertai dengan dokumen pendukung seperti notulen rapat
		Perubahan aktivitas maupun anggaran untuk optimalisasi kinerja belum didokumentasikan secara baik	Satker agar membuat nota dinas ataupun notulen/catatan terkait perubahan aktivitas kegiatan maupun pergeseran anggaran untuk optimalisasi kinerja
		Belum seluruh pegawai pada Satker mengerti dan peduli terhadap kinerja Satker termasuk pada pelaporan kinerja	Melakukan internalisasi terkait Indikator Kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja Satker pada seluruh pegawai kemudian melakuan survei terkait kepedulian pegawai terhadap kinerja Satker
3	Pelaporan Kinerja	Seluruh satker sudah selesai menyususun Laporan Kinerja namun masih terdapat beberapa satker belum menuliskan tanggal pengesahan dan belum menyampaikan surat penyampaian Laporan Kinerja kepada Kepala Badan P2SDM	Satker agar melengkapi tanggal pada halaman Kata Pengantar laporan Kinerja dan menyampaikan surat Laporan Kinerja kepada Kepala Badan P2SDM
		Belum seluruhnya satker menyusun Laporan Kinerja sesuai Standar dan belum membahas dan menganalisis lebih dalam mengenai IKK serta belum memasukkan unsur-unsur terkait efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian IKK	Satker agar lebih memahami standar penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri LHK Nomor 975 Tahun 2023

No	Komponen	Kelemahan	Rekomendasi
		Beberapa satker belum tersedia benchmarking capaian kinerja dan perbandingannya dengan unit lain	Agar membuat *benchmarking* dengan satker yang memiliki tugas dan fungsi yang sama
4	Evaluasi Internal	Dengan adanya aplikasi eSAKIP yang mewajibkan seluruh Satker untuk melakukan penilaian mandiri, sehingga masih ada beberapa Satker yang belum melakukan pertemuan/diskusi terkait verifikasi evaluasi SAKIP mandiri dan peningkatan kapasitas SDM terkait SAKIP secara periodik, dan menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi SAKIP Badan P2SDM di dalam Laporan Kinerja Satker.	Satker agar membuat pertemuan/diskusi terkait verifikasi evaluasi SAKIP mandiri dan peningkatan kapasitas SDM terkait SAKIP secara periodik. (operator diikutsertakan dalam kegiatan Bimtek SAKIP). Menuangkan tindak lanjut hasil rekomendasi evaluasi SAKIP pada Laporan Kinerja Satker.

Kepala Badan,

A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001